



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

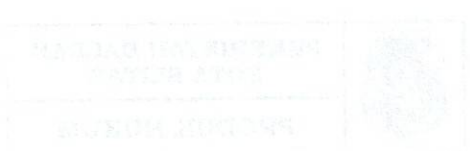
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);



!

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan



pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

### Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I   | : Pendahuluan                                                                |
| BAB II  | : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah       |
| BAB III | : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan                               |
| BAB IV  | : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan |
| BAB V   | : Penutup                                                                    |

- (2) Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- f. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- g. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- h. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- i. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- j. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;

- k. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- l. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- m. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- n. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- o. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- p. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- q. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- r. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- s. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- t. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- u. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- v. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- w. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- x. Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- y. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- z. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- bb. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- cc. Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025-2029; dan
- dd. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 19 September 2025  
WALIKOTA BLITAR,

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 19 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

## 19. RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan arah, tujuan, dan langkah strategis dalam membangun wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2025-2045 yang telah disahkan sebagai pedoman utama arah pembangunan jangka panjang Kota Blitar. Untuk menjadikan pelaksanaan pembangunan tersebut lebih sistematis, efektif dan terfokus maka dibutuhkan perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen ini berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut dalam jangka waktu lima tahun, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di perangkat daerah. Oleh karenanya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi pedoman arah pembangunan bidang pangan, perikanan dan pertanian selama periode lima tahun pertama pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,

lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD, sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029.

Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Renstra (Rencana Strategis) memiliki hubungan yang erat dalam konteks perencanaan pembangunan. RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahun yang menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara nasional. Sementara itu, Renstra adalah dokumen perencanaan yang lebih spesifik, dibuat oleh perangkat daerah, untuk menjabarkan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Renstra disusun berdasarkan RPJMN. Setiap kementerian/ lembaga atau perangkat daerah wajib menyelaraskan Renstra mereka dengan RPJMN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025 untuk memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan di tingkat nasional tercermin dalam kegiatan dan program di tingkat instansi atau daerah. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki hubungan yang erat. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra. Renstra, pada gilirannya, merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam lingkup masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis Renstra akan selaras dengan RPJMD Kota dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Renstra dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Tujuan Renstra disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.

c. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Blitar.

Keterkaitan Renstra dengan RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan adalah:

- 1) Renstra sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
  - 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/L
- Dalam menyusun Renstra perangkat daerah, perlu mempertimbangkan Renstra K/L untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan nasional. Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:
- 1) Keselarasan Tujuan. Renstra perangkat daerah dan Renstra K/L harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.
  - 2) Keterpaduan Program. Program-program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra K/L.
  - 3) Konsistensi Kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra K/L.
  - 4) Sinkronisasi Kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra K/L.
- e. Keterkaitan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan Renstra Instansi Vertikal Terkait di Tingkat Provinsi.
- Renstra kabupaten/kota harus mengacu pada RPJMD provinsi dan juga Renstra Instansi Vertikal Terkait di Tingkat Provinsi. Hal ini memastikan adanya keselarasan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan antara tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- f. Keterkaitan Renstra dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.

Renja (Rencana Kerja) memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra (Rencana Strategis). Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan pedoman utama dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan keselarasan dokumen perencanaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

- 1) Penjabaran Renstra. Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.
- 2) Keterpaduan Program. Program-program yang tercantum dalam Renja harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra.
- 3) Konsistensi Sasaran. Sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra.
- 4) Implementasi Renstra. Renja merupakan implementasi dari Renstra yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan.

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.  
Tahapan/ Proses Renstra



Sumber : **Permendagri 86 Tahun 2017**

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar pada dasarnya merupakan suatu proses penyesuaian pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Oleh karenanya kualitas dokumen Perubahan Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dearah Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
  - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. orientasi mengenai Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan selaras dengan RPJMD dan mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan;
  - b. analisis permasalahan;

- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. analisis isu strategis;
  - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
  - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.
  4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Keputusan Walikota Blitar.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
  29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
  30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 -2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah :

1. Untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029.
2. Untuk menyediakan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama Tahun Anggaran 2025-2029.

#### b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 ini adalah :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang.
3. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
4. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama 5 (lima) tahun mendatang.
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
  - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.1.7. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
  - 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis
  - 2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

#### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

#### BAB VII PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Blitar Nomor 50 Tahun 2022 sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyuluhan pertanian;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan budidaya;
- j. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- l. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan kerawanan pangan;
- m. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan keamanan pangan;
- n. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perizinan usaha pertanian;
- o. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- p. peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota;
- q. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

- r. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- s. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- t. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- u. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- v. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- y. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
- d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan
- e. Bidang Peternakan
- f. UPT Perikanan budidaya Air Tawar/Air Payau
- g. UPT Rumah potong Hewan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas, Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjalankan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;

- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- s. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- u. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- v. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan ketahanan pangan dan pertanian;
- w. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi;
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, konsumsi pangan, distribusi pangan, keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- h. peremajaan data dalam sistem informasi bidang Perikanan untuk tingkat kota;
- i. perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya, produksi, olahan, dan pemasaran hasil perikanan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan pencegahan, perlindungan, pemberantasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. identifikasi dan inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan;
- m. pengkoordinasian, pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan kegiatan Perikanan;
- n. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi bidang Perikanan;
- o. pemberian izin/rekomendasi di bidang perikanan;
- p. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- q. perencanaan, pengolahan, pendataan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- r. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- s. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan dan dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:

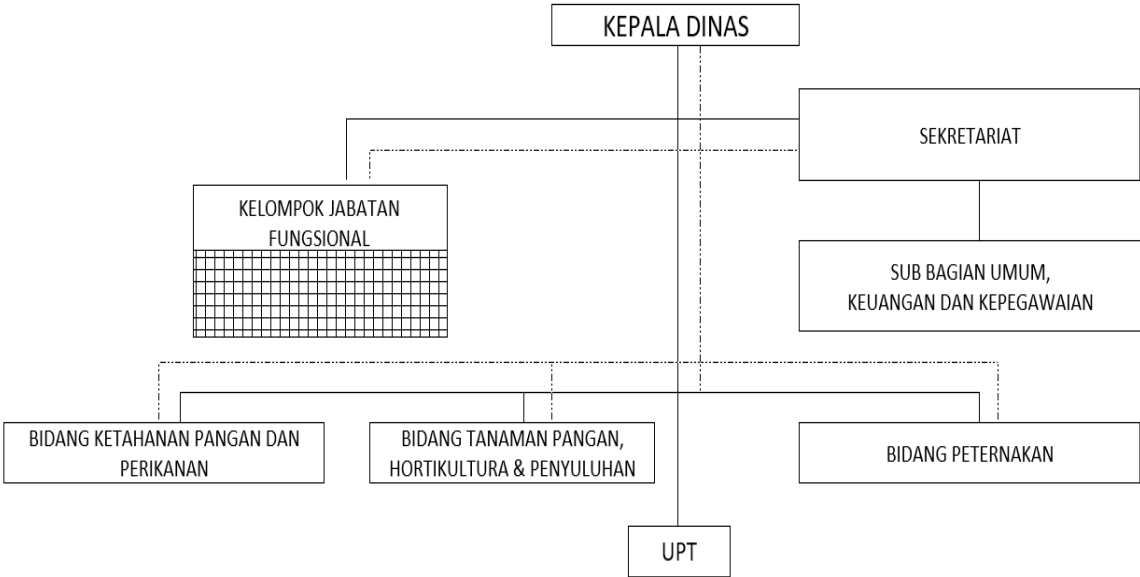
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- c. perencanaan operasional program bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- d. penginventarian, penelitian, pengkajian dan peremajaan data serta potensi dalam sistem informasi untuk tingkat kota pada bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, implementasi dan pengembangan kegiatan pada bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- h. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- i. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- j. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- k. melakukan penyuluhan dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- l. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih;

- m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- n. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- o. pemberian beibinagn penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
- p. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- r. pemberian izin/rekomendasi di bidang pertanian;
- s. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pertanian;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Peternakan. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Peternakan menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Peternakan;
- c. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang Peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang Peternakan sesuai kewenangannya;
- e. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. pengendalian penyakit hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- i. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Peternakan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundangan.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai. Berdasarkan data kepegawaian per Mei 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didukung keberadaan 50 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1  
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan          | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah Total Pegawai (orang) |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1   | Pasca Sarjana (S-2) | 0                 | 2                 | 2                            |
| 2   | Kedokteran Hewan    | 3                 | 3                 | 6                            |
| 3   | Sarjana (S-1)/D-IV  | 10                | 19                | 29                           |
| 4   | D-III               | 1                 | 1                 | 2                            |
| 5   | D-II                | -                 | -                 | 0                            |
| 6   | D-I                 | -                 | -                 | -                            |
| 7   | SLTA                | 8                 | 0                 | 8                            |
| 8   | SLTP                | 2                 | -                 | 2                            |
| 9   | SD                  | 1                 | -                 | 1                            |
|     | JUMLAH              | 25                | 25                | 50                           |

Tabel. 2.2  
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

| No. | Golongan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah Total Pegawai (orang) |
|-----|----------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|     | PNS      |                   |                   |                              |
| 1   | IV       | 3                 | 6                 | 9                            |
| 2   | III      | 12                | 15                | 27                           |
| 3   | II       | 5                 | -                 | 5                            |
| 4   | I        | 1                 | -                 | 1                            |
|     | PPPK     |                   |                   |                              |
| 1   | X        | 0                 | 1                 | 1                            |
| 2   | IX       | 1                 | 2                 | 3                            |
| 3   | VII      | 0                 | 1                 | 1                            |
| 4   | V        | 3                 | 0                 | 3                            |
|     | JUMLAH   | 25                | 25                | 50                           |

Tabel. 2.3  
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

| No | Jabatan                 | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah Total Pegawai (orang) |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1  | Jabatan Struktural      | 3                 | 5                 | 8                            |
| 2  | Jabatan Fungsional Umum | 9                 | 3                 | 12                           |
| 3  | Jabat Funsional Khusus  | 13                | 17                | 30                           |
|    | JUMLAH                  | 25                | 25                | 50                           |

Selain kualitas dan kuantitas SDM yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat menunjang kinerja organisasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memiliki beberapa aset tanah dan bangunan yang didukung sarana penunjang agribisnis yang cukup memadai. Jumlah aset tanah dan bangunan yang dikuasai sampai dengan Mei 2025 disajikan Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4  
Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah berdasarkan Kondisi

| Kode |   |   |    |    | Nama Bidang Barang                                | Jumlah berdasarkan Kondisi |       |
|------|---|---|----|----|---------------------------------------------------|----------------------------|-------|
|      |   |   |    |    |                                                   | Baik                       | Rusak |
| 1    | 3 | 2 | 01 | 01 | Gedung Kantor                                     | 1 unit                     | -     |
| 1    | 3 | 2 | 01 | 03 | Balai Penyuluh Pertanian (BPP)                    | 3 unit                     | -     |
| 1    | 3 | 2 | 02 | 01 | Rumah Potong Hewan                                | 3 unit                     | -     |
| 1    | 3 | 2 | 02 | 02 | Kantor UPT Budidaya Perikanan Air Tawar/Air Payau | 1 unit                     | -     |
| 1    | 3 | 2 | 02 | 05 | Alat Angkut Kendaraan Bermotor Roda 4             | 5 unit                     | -     |
| 1    | 3 | 2 | 03 | 01 | Alat Angkut Kendaraan Bermotor Roda 3             | 4 unit                     | -     |
| 1    | 3 | 2 | 03 | 02 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat                        | 73 unit                    | -     |
| 1    | 3 | 2 | 03 | 03 | Komputer/Laptop                                   | 24 unit                    | -     |

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar mempunyai 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu UPT Rumah Potong Hewan (RPH) dan UPT Budidaya Perikanan Air Tawar / Air Payau. UPT Rumah Potong Hewan (RPH) memiliki 2 (unit) pelayanan yaitu RPH Unggas dan RPH Ruminansia (sapi, kambing, babi). UPT RPH ini telah didukung peralatan yang memadai dan telah memiliki sertifikat Halal dari MUI serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Dengan ini UPT RPH telah memenuhi persyaratan teknis baik dari segi kehalalan produknya maupun keamanan produknya sehingga produk yang dihasilkan terjamin Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

UPT Budidaya Perikanan Air Tawar / Air Payau memiliki 2 (unit) pelayanan yaitu Balai Benih Ikan (BBI) dan Sentra Usaha Ikan Hias dan Koi (SUKHOI). Balai Benih Ikan telah didukung sarana prasaran yang memadai yang terdiri dari kolam indukan, kolam, pembesaran dan kolam karantina. Komoditas yang dibudidayakan berupa benih ikan Nila, Lele dan Koi. Sedangkan untuk Sentra Usaha Ikan Hias dan Koi (SUKHOI) memiliki 1 (unit) kantor dan 9 (Sembilan) kios ikan yang disewakan kepada pelaku usaha ikan hias di Kota Blitar.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Daerah Kota Blitar

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar selama tahun 2021-2025 berpedoman pada RENSTRA Tahun 2021-2026. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.

Tabel. 2.5  
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

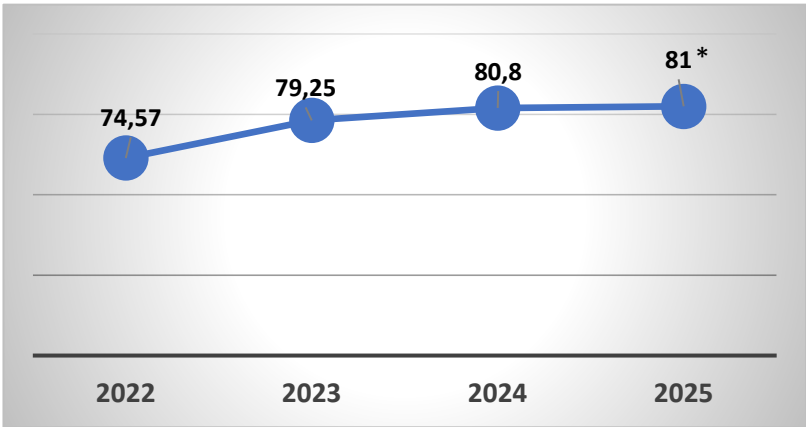
| NO  | Indikator Kinerja                                                     | Satuan        | IKU/S<br>PM/<br>IKK | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |               |               |               | Realisasi Capaian Tahun ke- |               |               |                           | Tingkat Capaian pada Tahun ke- |               |               |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
|     |                                                                       |               |                     | Tahun<br>2022                             | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2022               | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Proyeksi<br>Tahun<br>2025 | Tahun<br>2022                  | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Proyeksi<br>Tahun<br>2025 |
| (1) | (2)                                                                   | (3)           | (4)                 | (5)                                       | (6)           | (7)           | (8)           | (9)                         | (10)          | (11)          | (12)                      | (13)                           | (14)          | (15)          | (16)                      |
|     | Urusan Pangan                                                         |               |                     |                                           |               |               |               |                             |               |               |                           |                                |               |               |                           |
| 1   | Indeks Ketahanan Pangan                                               | Angka         |                     | 74,18                                     | 74,68         | 75,18         | 75,68         | 74,57                       | 79,25         | 80,8          | 81*                       | 100,53                         | 106,12        | 107,48        | 107,03                    |
| 2   | Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita                                  | Persen        |                     | N/A                                       | N/A           | 42,36         | 42,16         | 42,74                       | 43,38         | 47,40         | 44,25*                    | N/A                            | N/A           | 88,11         | 95,04                     |
| 3   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi                               | Angka         | IKU                 | 86,25                                     | 86,5          | 86,75         | 87            | 86,31                       | 87,7          | 88,87         | 88,90*                    | 100,07                         | 101,39        | 102,44        | 102,18                    |
| 4   | Persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan                       | Persen        | IKK                 | 44,83                                     | 45,33         | 45,83         | 46,33         | 100,43                      | 107,39        | 194,77        | 195*                      | 224,02                         | 236,91        | 424,98        | 420,89                    |
|     | Urusan Pertanian                                                      |               |                     |                                           |               |               |               |                             |               |               |                           |                                |               |               |                           |
| 1   | PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)     | Milyar Rupiah |                     | 196,82                                    | 197,81        | 198,8         | 199,79        | 200,34                      | 213,52        | 200,43        | 201,21*                   | 101,79                         | 107,94        | 100,82        | 100,71                    |
| 2   | Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura                       | Kwintal       | IKU                 | 198.186,93                                | 198.206,74    | 220.141,40    | 198.444,66    | 245.151                     | 240.477       | 173.640,00    | 198.444,70*               | 123,70                         | 121,33        | 78,88         | 100,00                    |
| 3   | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                          | ton/ha        | IKK                 | 18,64                                     | 18,65         | 18,66         | 18,67         | 7,16                        | 687,07        | 491,6         | 498*                      | 38,41                          | 3684,02       | 2634,51       | 2667,38                   |
| 4   | Jumlah produksi hasil peternakan                                      | Kwintal       | IKU                 | 84.321,66                                 | 84.651,19     | 100.123,00    | 85.042,36     | 104.984,48                  | 100.122,81    | 102.693,97    | 103.600*                  | 124,50                         | 118,28        | 102,57        | 121,82                    |
| 5   | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | persen        | IKK                 | 5                                         | 5             | 5             | 5             | 44,07                       | -69,41        | 87,89         | 5*                        | -681,40                        | 1588,20       | -1557,80      | 100,00                    |
| 6   | Nilai Tukar Petani                                                    | Angka         |                     | NA                                        | NA            | 101,67        | 102,17        | NA                          | NA            | 101,92        | 102,17*                   | N/A                            | N/A           | 100,25        | 100,00                    |
| 7   | Nilai produksi hasil pertanian                                        | Ribu Rupiah   |                     | NA                                        | NA            | 92.181.425,08 | 94.025.053,58 | NA                          | NA            | 115.849.972   | 116.660.922*              | N/A                            | N/A           | 125,68        | 124,07                    |
| 8   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                          | Angka         |                     | 84,7                                      | 84,71         | 85,23         | 84,75         | 85,56                       | 84,77         | 85,23         | 86,26                     | 101,02                         | 100,07        | 100,00        | 101,78                    |
|     | Urusan Perikanan                                                      |               |                     |                                           |               |               |               |                             |               |               |                           |                                |               |               |                           |
| 1   | Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi                          | Kwintal       | IKU, IKK            | 2.404,80                                  | 2.464,92      | 2.489,33      | 2.519,10      | 2412,4                      | 2.485         | 2.503,40      | 2.519,10*                 | 100,32                         | 100,81        | 100,57        | 100,00                    |
| 2   | Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias                              | Ekor          | IKU                 | 4.698.482                                 | 4.719.625     | 4.740.863     | 4.762.197     | 4.699.324                   | 4.719.733     | 4.746.797     | 4.762.197*                | 100,02                         | 100,00        | 100,13        | 100,00                    |
| 3   | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan                                          | Angka         |                     | NA                                        | NA            | 101           | 101,5         | NA                          | NA            | 102,5         | 102,6*                    | N/A                            | N/A           | 101,49        | 101,08                    |
| 4   | Nilai produksi hasil perikanan                                        | Ribu Rupiah   |                     | NA                                        | NA            | 34.977.794,39 | 35.677.350,27 | NA                          | NA            | 37.829.168    | 38.207.460*               | N/A                            | N/A           | 108,15        | 107,09                    |

Keterangan : \* merupakan angka proyeksi

a. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Indikator ukuran ketahanan pangan suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Pangsa pengeluaran pangan (PPP), Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan. IKP merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Nilai IKP Kota Blitar dalam rentang waktu 2022-2025\* menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik. 2.1  
Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2022-2025

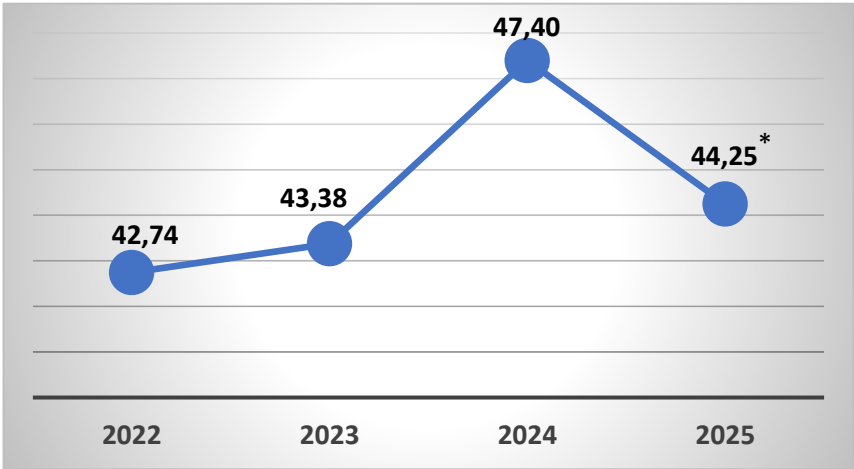


Berdasarkan grafik diatas, terdapat kenaikan IKP yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, nilai indeks adalah 74,57. Walaupun masih termasuk dalam zona hijau untuk kategori kota, dilain sisi juga menunjukkan tantangan yang cukup besar dalam mencapai ketahanan pangan yang optimal. Pada tahun 2023 IKP naik cukup signifikan menjadi 79,25, menunjukkan upaya yang berhasil untuk mengatasi tantangan tersebut. Peningkatan terus berlanjut hingga diproyeksi mencapai 81 pada tahun 2025, yang mencerminkan stabilitas dan efektivitas kebijakan serta program terkait pangan. Meskipun demikian, nilai 81 pada tahun 2025 masih belum mencapai angka 100, yang menandakan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Selain perbaikan kondisi ketahanan setiap tahunnya, perlu di cermati bahwa pada tahun 2023-2025 kenaikan mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh terjadinya inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan pokok pada kurun waktu 2023-2025 yang berakibat juga terjadinya kenaikan pangsa pengeluaran pangan per kapita yang menjadi salah satu komponen perhitungan IKP.

Pangsa pengeluaran pangan (PPP) adalah proporsi pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan untuk membeli makanan dari total pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, semakin besar kemungkinan rumah tangga tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Grafik. 2.2

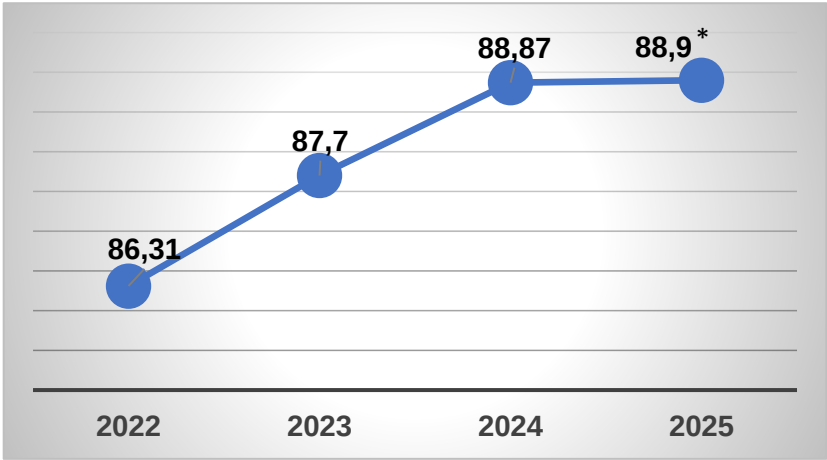
Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita Kota Blitar Tahun 2022-2025



Berdasarkan grafik diatas Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita dari tahun 2022 hingga 2025 mengalami tren yang fluktuatif. Pada awalnya, terjadi kenaikan signifikan, diikuti dengan penurunan di tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita mengalami peningkatan dari 42,74% pada tahun 2022 menjadi 47,40% pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa pengeluaran masyarakat untuk pangan semakin besar, yang bisa disebabkan oleh inflasi harga pangan yang tinggi atau stagnasi pendapatan serta perubahan pola konsumsi, misalnya peningkatan konsumsi pangan olahan yang lebih mahal. Pada tahun 2025, diproyeksikan terjadi penurunan tajam menjadi 44,25%. Penurunan ini adalah hal yang positif karena menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan stabilitas harga pangan. Idealnya, pangsa pengeluaran pangan per kapita yang rendah menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Selain IKP dan pangsa pengeluaran pangan, kondisi ketahanan pangan daerah juga diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mengukur pemenuhan konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam bahan makanan atau kelompok bahan makanan yang didasarkan pada sumbangan sosial, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi, yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragaman dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Blitar pada tahun 2022-2025 disajikan dalam grafik berikut :

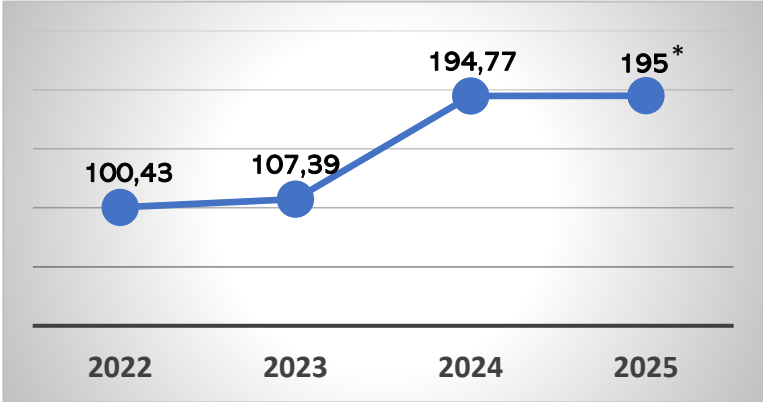
Grafik. 2.3  
Skor Pola Pangan Harapan Kota Blitar Tahun 2022-2025



Berdasarkan grafik diatas Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dalam kurun waktu tahun 2022-2025 terus mengalami peningkatan dari 86,31 pada tahun 2022 diproyeksikan menjadi 88,90 pada tahun 2025, naik 2,59 poin selama kurun waktu 4 tahun. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Kenaikan yang terjadi secara konsisten ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam program-program edukasi gizi dan diversifikasi pangan. Skor PPH yang semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat semakin seimbang dan beragam, tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas pokok.

Ketersediaan pangan di Kota Blitar selain berasal dari produksi dalam daerah juga berasal dari luar daerah mengingat Kota Blitar sebagai pusat perdagangan di wilayah Blitar Raya. Persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pangan yang selama tahun 2022-2025 menunjukkan tren yang positif sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Grafik. 2.4  
Persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan (persen) Tahun 2022-2025



Pada tahun 2022, ketersediaan pangan berada pada 100,43%, sedikit di atas kebutuhan minimum. Angka ini meningkat menjadi 107,39% pada tahun 2023, menandakan adanya perbaikan kapasitas produksi. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 194,77%, dan stabil pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 195%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki ketersediaan pangan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

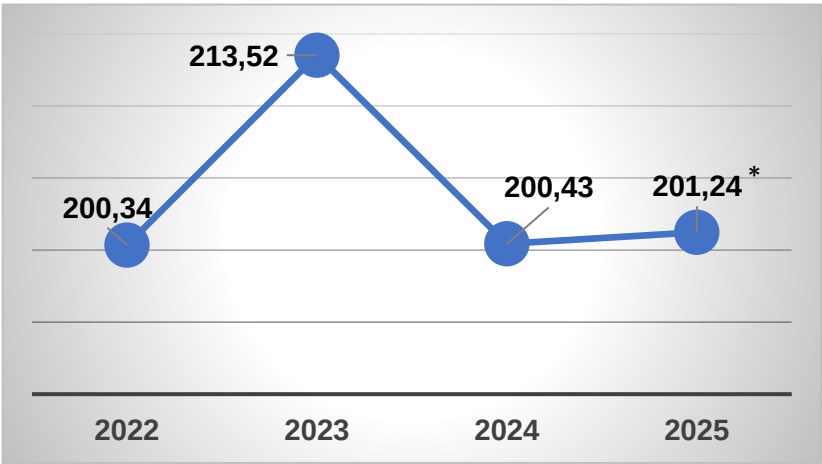
Dari capaian indikator IKP, pangsa pengeluaran pangan per kapita, skor PPH dan persentase ketersediaan pangan sesuai kebutuhan dapat disimpulkan bahwa kondisi ketahanan pangan masyarakat di Kota Blitar mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2022-2025. Keberhasilan ini didorong oleh peningkatan produktivitas pertanian, perdagangan antar wilayah yang mendukung stok pangan, serta perbaikan sistem distribusi. Peningkatan kondisi ketahanan pangan masyarakat tersebut dilakukan dengan upaya pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan masyarakat, penanganan rawan dengan pemberian bantuan bahan pangan kepada balita stunting, pemanfaatan pekarangan melalui P2L, penanganan kemiskinan, pemantauan harga bahan pangan. Selain itu juga mendorong kesadaran masyarakat untuk peningkatan kualitas konsumsi pangan antara lain melalui introduksi pengolahan makanan berbahan non beras, serta berbagai penyuluhan/sosialisasi tentang Gerakan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman). Upaya peningkatan ketahanan daerah juga dilakukan melalui penjaminan ketersediaan bahan pangan pokok yang mencukupi dari segi distribusi, produksi dan ketersediaannya sehingga mencukupi kebutuhan energi masyarakat Kota Blitar dengan mengoptimalkan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan melalui Pekarangan Pangan Lestari guna pemenuhan gizi keluarga. Namun, tantangan masih ada, seperti risiko

perubahan iklim, distribusi yang belum merata, dan potensi surplus berlebih yang dapat menekan harga komoditas di tingkat produsen. Untuk itu, langkah tindak lanjut yang perlu ditempuh antara lain diversifikasi pangan, penguatan sistem distribusi, penyediaan cadangan pangan daerah yang diperkuat dengan peningkatan ketersediaan pangan tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan yang efektif, efisien dan berkelanjutan (*smart farming*). Dengan strategi tersebut, ketersediaan pangan tidak hanya melimpah, tetapi juga terdistribusi merata dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kota Blitar.

b. Urusan Pertanian

Capaian kinerja urusan pertanian dan perikanan secara komposit dilihat dari indikator PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. PDRB kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah nilai total produksi barang dan jasa dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Perkembangan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Blitar selama kurun waktu 2022-2025 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik. 2.5  
PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Milyar Rupiah)  
Kota Blitar Tahun 2022-2025

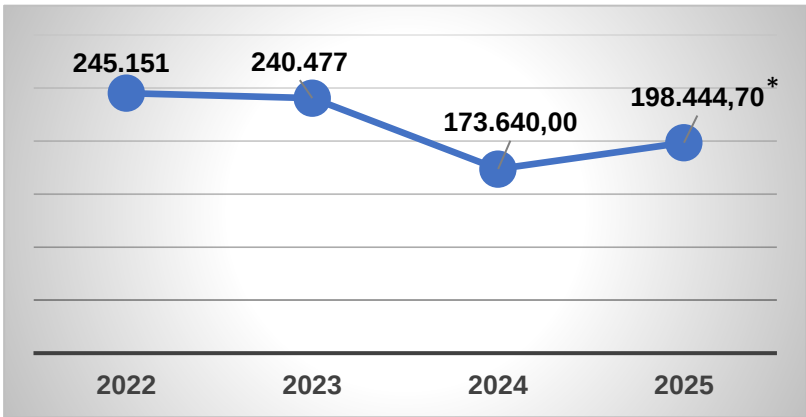


Grafik diatas menunjukkan bahwa PDRB kategori ini melonjak tajam dari Rp 200,34 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 213,52 miliar pada tahun 2023. Kenaikan signifikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun tersebut. Namun, terjadi penurunan drastis di tahun 2024 menjadi Rp 200,43 miliar, hampir kembali ke angka tahun 2022. Meskipun diproyeksikan ada sedikit kenaikan di tahun 2025 menjadi Rp 201,24 miliar, angkanya masih jauh di bawah puncak tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa sektor ini rentan terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi produksi. Terjadinya fenomena el nino yang memicu kekeringan panjang pada kurun waktu 2023-2024 menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama untuk komoditas padi dan jagung. Selain itu penurunan harga jual komoditas pertanian tertama saat musim panen raya menyebabkan nilai ekonomi yang dihasilkan juga menurun.

Realisasi jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam kurun waktu tahun 2022-2025 menunjukan tren yang fluktuatif dengan penurunan signifikan diikuti oleh sedikit kenaikan sebagaimana disajikan dalam grafik berikut.

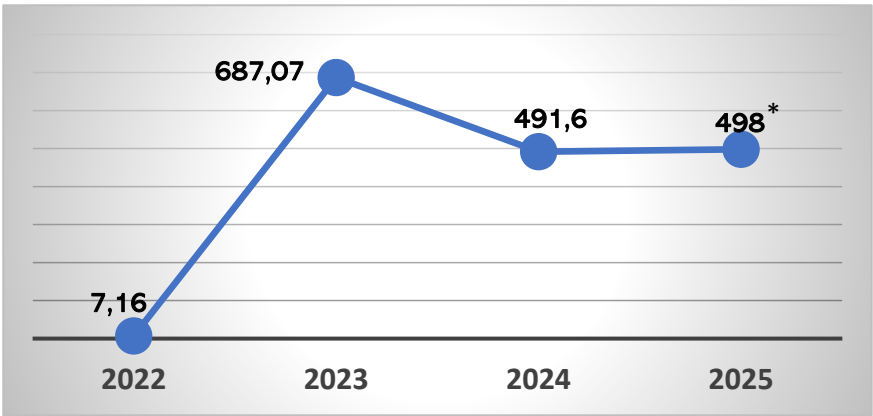
Grafik. 2.6

Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (kuintal) Kota Blitar Tahun 2022-2025



Grafik diatas menunjukkan bahwa produksi tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan drastis dari 245.151 kuintal pada tahun 2022 menjadi 173.640 kuintal pada tahun 2024. Penurunan ini sangat berdampak pada ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Namun, ada sedikit perbaikan di tahun 2025, di mana produksi diproyeksikan naik menjadi 198.444,70 kuintal. Meskipun demikian, angka ini masih jauh di bawah level produksi tahun 2022 dan 2023. Demikian juga untuk produktivitas pertanian (tanaman pangan utama) pada tahun 2022-2025 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKK) urusan pertanian menunjukkan tren fluktuatif sebagaimana grafik berikut ini.

Grafik. 2.7  
Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun (Ton/Ha) Kota Blitar Tahun 2022-2025

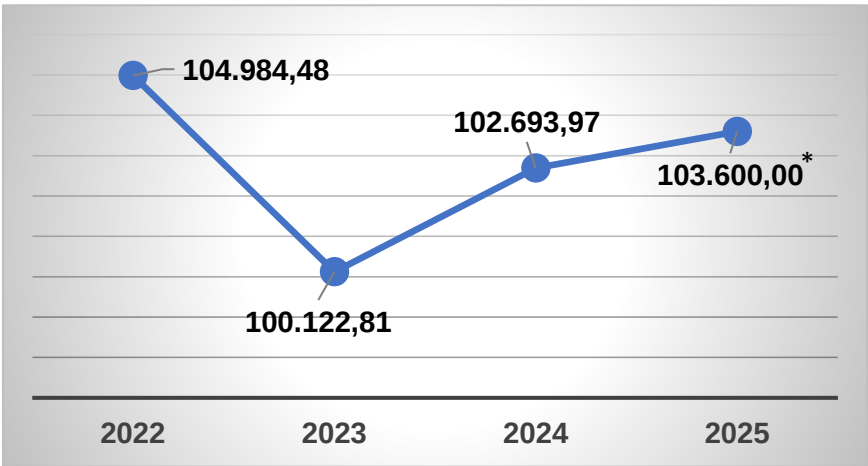


Penurunan ekstrem pada tahun 2023-2024 disebabkan terjadinya cuaca ekstrem (kekeringan panjang) akibat fenomena el-nino yang menyebabkan mundurnya waktu tanam dan panen, serta menurunnya produktivitas terutama untuk tanaman pangan khususnya padi dan jagung. Selain itu pengurangan kuota pupuk bersubsidi menyebabkan petani kesulitan untuk mengelola lahannya secara optimal. Upaya yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022-2025 cukup efektif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Untuk mengatasi fluktuasi dan memastikan pertumbuhan produksi yang berkelanjutan, beberapa langkah strategis dapat dilakukan adalah optimalisasi dan pembangunan prasarana pertanian (JUT, JITUT, Pintu Air), pengawasan dan penyediaan sarana pertanian (pupuk, pestisida, obat-obatan), peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pertanian melalui pembinaan, pelatihan teknologi pertanian serta regenerasi petani muda. Selain itu terus diupayakan meminimalisir alih

fungsi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang (LP2B).

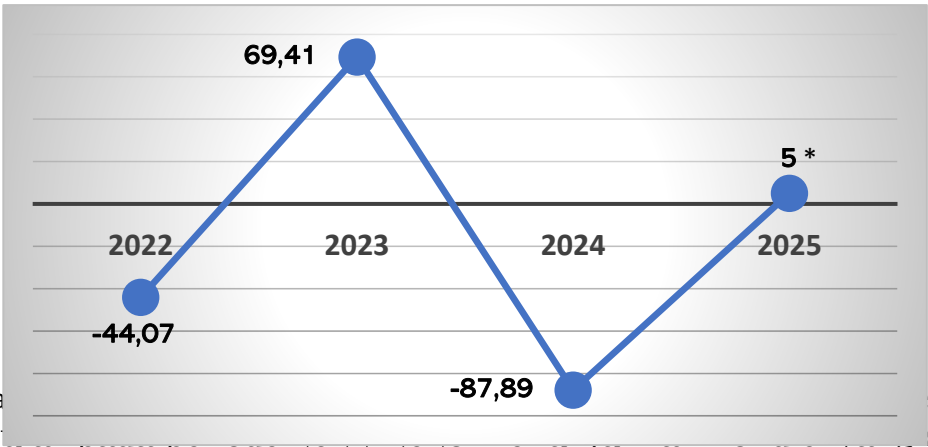
Selain bidang tanaman pangan dan hortikultura, kinerja sektor pertanian juga dilihat dari capaian kinerja bidang peternakan yang ditunjukkan dengan indikator jumlah produksi hasil peternakan yang terdiri dari daging, telur dan susu.

Grafik. 2.8  
Jumlah Produksi Hasil Peternakan (kuintal) Kota Blitar Tahun 2022-2025



Berdasarkan grafik 2.8 di atas, produksi hasil peternakan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 mengalami penurunan 4,6% kemudian tahun 2024-2025 mulai meningkat meskipun belum menyamai produksi tahun 2022. Penurunan produksi hasil peternakan pada tahun 2023 merupakan dampak lanjutan dari wabah penyakit PMK dan LSD yang terjadi pada kurun waktu 2021-2022 yang menyebabkan penurunan produksi daging ternak besar (sapi dan kambing) dan penurunan produksi susu pada sapi perah. Selain itu terjadinya kenaikan harga pakan ternak terutama jagung yang menyebabkan menurunnya jumlah ternak unggas yang dipelihara. Pada tahun 2024 terjadi pemulihan produksi (+2,6%) yang menandakan adaptasi peternak melalui upaya vaksinasi masal dan massif serta manajemen kesehatan ternak. Kondisi ini selaran dengan angka kejadian kasus penyakit menular ternak mulai tahun 2022-2025. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pertanian sebagaimana disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik. 2.9  
Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (persen) Kota Blitar Tahun 2022-2025



Data penyakit hewan menular sangat fluktuatif. Pada tahun 2022 tercatat -44,07% yang mengindikasikan

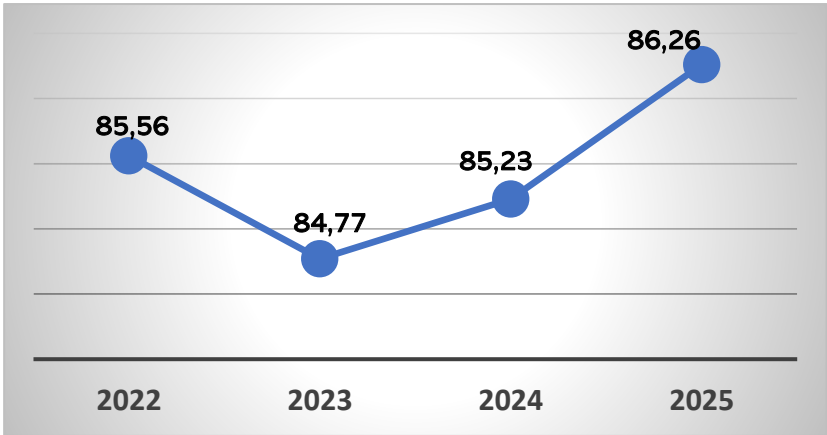
peningkatan kasus cukup besar. Tahun 2023 mengalami perbaikan signifikan dengan penurunan kasus sebesar 69,41%, menunjukkan keberhasilan program pengendalian. Namun, pada 2024 terjadi lonjakan kasus sebesar -87,89%. Pada 2025, kondisi mulai membaik dengan proyeksi angka penurunan positif sebesar 5%, walaupun penurunannya masih kecil dan belum stabil.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah melalui peningkatan kesehatan hewan ternak (vaksinasi dan pelayanan kesehatan hewan) serta pembinaan dan pendampingan kelompok ternak. Peningkatan kesehatan ternak ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan ternak gratis terutama untuk ternak sapi dan kambing, vaksinasi PMK dan LSD gratis, serta sebagai sarana pemberian sosialisasi/pembinaan tentang penyakit hewan menular. Selain itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap konsumsi produk asal hewan, juga dilakukan peningkatan jaminan kesehatan dan keamanan bahan asal hewan dengan pemeriksaan sampel bahan asal hewan dari kemungkinan cemaran bahan berbahaya. Peningkatan kapasitas dan kapasitas peternak serta sosialisasi Kesehatan masyarakat veteriner dilakukan melalui sosialisasi kepada peternak dan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media publikasi lainnya (talk show radio, leaflet, banner). Akan tetapi keterbatasan fasilitas kesehatan hewan, minimnya tenaga medis, serta faktor lingkungan masih menjadi tantangan utama. Pada bidang peternakan, terbatasnya produksi hasil peternakan juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan lahan. Untuk itu perlu upaya memaksimalkan hasil ternak yang ada diantaranya dengan peningkatan pengawasan dan layanan Kesehatan hewan yang dilakukan secara berkala, tepat dan cepat serta perlunya sosialisai dan aplikasi peternakan perkotaan yang ramah lingkungan. Dalam rangka menyediakan kualitas hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, perlu penyediaan sarana dan prasarana peternakan yang memenuhi dan berstandar nasional (RPH dan RPHU) dengan menambah beberapa fasilitas yang masih dibutuhkan. Secara umum RPHU Kota Blitar sudah memenuhi standar (bersertifikat NKV dan Halal MUI), untuk itu dengan penambahan fasilitas baik di RPHU maupun RPH akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pendampingan dan pembinaan di utamakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan terutama dalam manajemen budidaya yaitu pembuatan pakan secara mandiri, pengolahan dan pemanfaatan limbah ternak.

Dalam rangka penguatan birokrasi guna memberikan pelayanan terbaik dilaksanakan dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang diukur melalui nilai implementasi SAKIP. Implementasi SAKIP bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui SAKIP, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyusun perencanaan kinerja yang jelas, melaksanakan program secara efektif dan efisien, serta mempertanggungjawabkan hasilnya secara terukur kepada publik. Perkembangan Nilai Implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022-2025 ditampilkan dalam grafik berikut.

Grafik. 2.10  
Nilai Implemetasi Sakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tahun 2022-2025

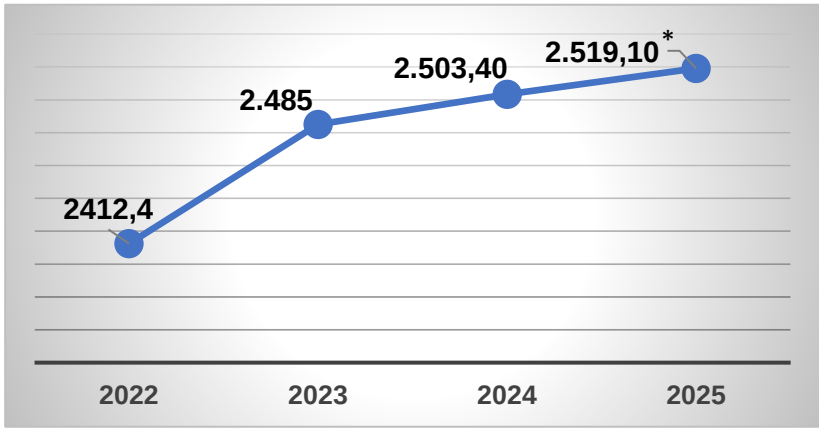


Perkembangan nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada periode 2022–2025 menunjukkan tren yang positif meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2023. Penurunan ini menjadi refleksi atas tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program. Namun, berkat upaya perbaikan dan penguatan sistem akuntabilitas, nilai SAKIP kembali meningkat pada 2024 dan mencapai capaian tertinggi di tahun 2025 sebesar 86,26. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat daerah semakin matang dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

c. Urusan Perikanan

Kinerja sektor perikanan Kota Blitar yang ditunjukkan melalui indikator jumlah produksi ikan konsumsi dan jumlah produksi ikan hias mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat pada Tahun 2022-2025 sebagaimana disajikan pada grafik berikut. Jumlah produksi ikan konsumsi juga merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan perikanan.

Grafik. 2.11  
Jumlah Produksi Ikan Konsumsi (kuintal) Kota Blitar Tahun 2022-2025

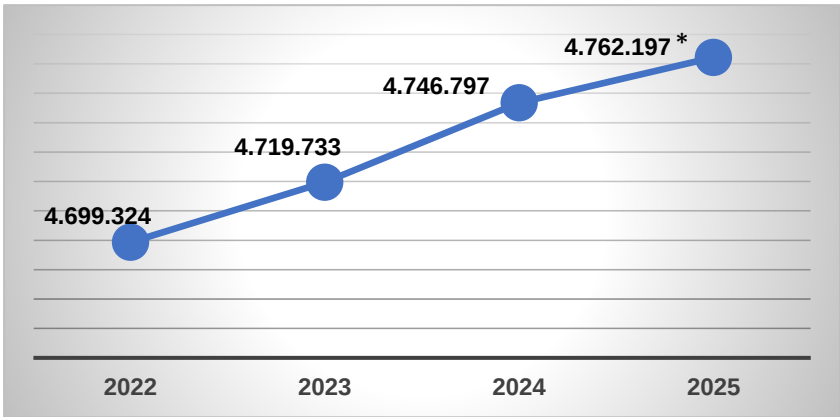


Grafik diatas menunjukkan kenaikan yang konsisten jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi dari tahun 2022 hingga 2025. Produksi meningkat dari 2.412,4 kuintal pada 2022 diproyeksikan menjadi 2.519,10 kuintal pada 2025. Ikan konsumsi ini didominasi oleh jenis ikan Nila, Lele, Patin dan Gabus. Tren positif ini menandakan adanya pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam sektor perikanan budidaya. Peningkatan ini tidak tajam, melainkan bertahap, yang bisa mengindikasikan bahwa

pertumbuhan tersebut didasari oleh faktor-faktor fundamental yang kuat dan bukan lonjakan sesaat.

Upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan produksi ikan konsumsi adalah pelatihan dan pembinaan budidaya ikan dan mutu produk hasil perikanan (CPIB, CBIB), pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan dengan sararan pembudidaya dan kelompok pebudidaya ikan di Kota Blitar. Selain pembinaan dan pengelolaan secara on farm (hulu) juga dilakukan secara off farm (hilir). Pembinaan dan pengelolaan perikanan secara off farm difokuskan pada kelompok usaha perikanan. Di Kota Blitar terdapat 26 usaha pengolahan perikanan dan 47 usaha pemasaran perikanan (pokdakan dan pohlasar). Karena secara tidak langsung kapasitas produksi *off farm* akan mempengaruhi permintaan terhadap produksi hasil perikanan. Selama ini kebutuhan bahan baku usaha perikanan *off farm* masih banyak berasal dari luar Kota Blitar. Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan diversifikasi olahan hasil perikanan, pembinaan peningkatan mutu olahan hasil perikanan serta pelatihan smart marketing mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produk hasil perikanan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pemasaran baik untuk peningkatan konsumsi ikan di Kota Blitar sendiri maupun di luar daerah. Dengan peningkatan mutu dan perluasan jaringan pemasaran akan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kontribusi ekonomi sektor perikanan di Kota Blitar.

Grafik. 2.12  
Jumlah Produksi Ikan Hias (ekor) Kota Blitar Tahun 2022-2025

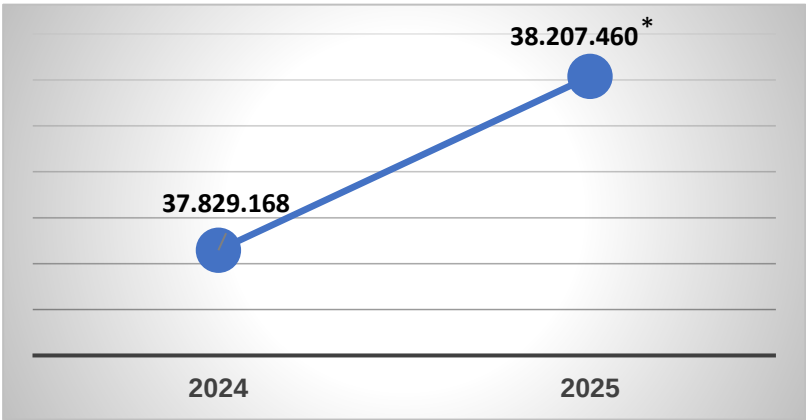


Sedangkan untuk hasil produksi ikan hias menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2022 sampai dengan proyeksi tahun 2025 dengan pertumbuhan relative lambat (kurang dari 1%) sebagaimana disajikan dalam grafik diatas. Hal ini menandakan bahwa kapasitas produksi sudah tinggi namun belum ada lonjakan yang signifikan. Hal ini juga mencerminkan kondisi pasar yang cukup terjaga meski perlu strategi lebih untuk peningkatan nilai tambah agar tidak stagnan. Seperti diketahui, Kota Blitar dikenal sebagai salah satu sentra ikan hias seperti koi, koki, cupang dan guppy. Selain itu dukungan komunitas pembudidaya ikan hias dan adanya sarana pasar lokal untuk ikan hias (SUKHOI) merupakan modal penting dalam pengembangan budidaya ikan hias. Dengan lahan perkotaan yang memiliki keterbatasan luas, maka peningkatan produksi ikan hias dapat dilakukan dengan peningkatan teknologi budidaya, peningkatan kapasitas logistic pengiriman ikan hias, diversifikasi jenis ikan hias serta pemanfaatan digital marketing untuk memperluas jaringan pemasaran. Selain itu pelaksanaan promosi melalui even pameran dan bursa perlu terus dilaksanakan mengingat produksi ikan hias sangat tergantung pada permintaan pasar dan penghobi ikan hias.

Dilihat dari nilai produksi hasil perikanan yang terdiri dari nilai produksi ikan segar dan olahan hasil perikanan dan baru dihitung mulai tahun 2024-

2025 menunjukkan tren peningkatan sebagaimana disajikan dalam diagram dibawah ini.

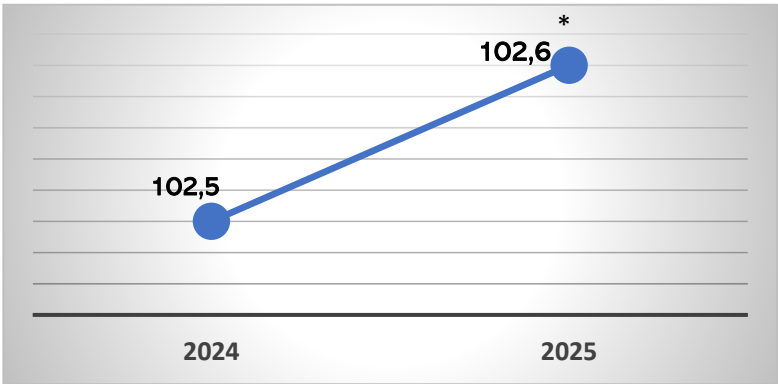
Grafik. 2.13  
Nilai Produksi Hasil Perikanan (juta rupiah) Kota Blitar Tahun 2024-2025



Nilai produksi hasil perikanan Kota Blitar pada tahun 2024 mencapai 37,8 juta, dan diproyeksikan meningkat menjadi 38,2 juta pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan tren positif meskipun masih relatif kecil, sekitar 1%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan produktivitas perikanan yang ditopang oleh meningkatnya permintaan konsumsi ikan, dukungan kebijakan pemerintah, serta penerapan teknologi yang lebih efisien. Namun, capaian ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tingginya biaya produksi, perubahan iklim, penyakit ikan, keterbatasan modal, serta persaingan dengan produk luar. Jika hambatan ini tidak segera diatasi, maka pertumbuhan nilai produksi berpotensi stagnan. Beberapa upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah berupa diversifikasi produk olahan bernilai tambah, pelatihan dan pembinaan kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan perluasan akses pasar melalui pelatihan pemanfaatan e-commerce.

Berdasarkan data Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Kota Blitar, pada tahun 2024 tercatat sebesar 102,5 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 102,6 pada tahun 2025. Nilai NTPI yang berada di atas angka 100 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan relatif baik, karena harga yang diterima pembudidaya lebih besar dibandingkan harga yang dibayarkan untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga. Namun demikian, kenaikan sebesar 0,1 poin menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masih sangat terbatas dan berjalan lambat. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Kota Blitar Tahun 2024-2025 disajikan dalam grafik dibawah ini.

Grafik. 2.11  
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Kota Blitar Tahun 2024-2025



Secara umum, terdapat beberapa faktor pendorong yang berkontribusi terhadap capaian NTPI positif, antara lain stabilnya harga jual ikan di pasar,

meningkatnya permintaan baik di pasar serta penerapan teknologi budidaya yang lebih efisien. Meskipun demikian, pembudidaya ikan masih menghadapi sejumlah faktor penghambat, seperti kenaikan harga pakan, listrik, dan obat-obatan, fluktuasi permintaan pasar dan kompetisi dengan produk luar, ancaman penyakit ikan yang menurunkan produktivitas, serta keterbatasan akses permodalan bagi skala kecil. Kondisi ini membuat peningkatan NTPI belum signifikan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah pelaksana tugas untuk urusan pangan, pertanian dan perikanan, maka kelompok sasaran pelayanan dari Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian adalah komponen masyarakat yang bergerak dalam usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan. Identifikasi kelompok sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.5  
Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| No. | Kelompok Sasaran Pelayanan                                           | Bentuk Layanan Yang Diberikan Perangkat Daerah                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | URUSAN PANGAN                                                        |                                                                                           |
|     | Kelompok Wanita Tani (KWT)                                           | Pelatihan dan pendampingan penganekaragaman konsumsi pangan                               |
|     | TP PKK Kec./Kelurahan                                                | Pelatihan dan pendampingan penganekaragaman konsumsi pangan                               |
|     | Masyarakat rentan rawan pangan (balita stunting dan keluarga miskin) | Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan bantuan bahan pangan                     |
| B.  | URUSAN PERIKANAN                                                     |                                                                                           |
|     | Kelompok Pembudidaya ikan (pokdakan)                                 | Pelatihan, fasilitasi promosi, pendampingan budidaya ikan konsumsi dan ikan hias          |
|     | Kelompok pengolah dan pemasar ikan (poklasar)                        | Pelatihan, fasilitasi promosi, pendampingan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan      |
|     | Siswa sekolah                                                        | Sosialisasi Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)                                                |
| c.  | URUSAN PERTANIAN                                                     |                                                                                           |
|     | Kelompok Tani                                                        | Pelatihan dan pendampingan budidaya pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian. |
|     | Kelompok wanita tani                                                 | Pelatihan dan pendampingan budidaya pertanian                                             |
|     | Siswa sekolah                                                        | Sosialisasi budidaya pertanian untuk petani muda.                                         |
|     | Peternak                                                             | Pelatihan dan pendampingan bidang peternakan                                              |

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja perangkat daerah adalah organisasi atau pihak di luar struktur resmi pemerintah daerah yang bekerja sama dengan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Mitra kerja adalah pihak yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program agar hasil yang dicapai lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan. Mitra kerja ini meliputi semua organisasi atau pihak di luar struktur resmi pemerintah daerah baik sebagai pihak yang bekerjasama maupun sasaran penerima program ketahanan pangan dan pertanian. Identifikasi mitra kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6  
Mitra Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| No. | Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan         | Bentuk Kemitraan/Dukungan                                                                 | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) | Sasaran penerima program pembangunan pertanian.                                           | Eksternal  |
| 2.  | Kelompok Budidaya Perikanan (Pokdakan)                    | Sasaran penerima program pembangunan perikanan.                                           | Eksternal  |
| 3.  | Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklasar)  | Sasaran penerima program pembangunan perikanan.                                           | Eksternal  |
| 4.  | Kelompok Wanita Tani (KWT)                                | Sasaran penerima program ketahanan pangan.                                                | Eksternal  |
| 5.  | Kelompok pencinta ikan hias di Kota Blitar                | Sasaran penerima program pembangunan perikanan.                                           | Eksternal  |
| 6.  | Dinas Kesehatan                                           | Penyedia Data Masyarakat Rentan Rawan Pangan (balita gizi kurang)                         | Internal   |
| 7.  | Dinas Sosial                                              | Penyedia Data Masyarakat Rentan Rawan Pangan (masyarakat miskin)                          | Internal   |
| 8.  | Dinas Pendidikan                                          | Penyedia data dan sasaran program Gemarikan dan petani muda Kota Blitar                   | Internal   |
| 9.  | Dinas Kominfotik                                          | Penyedia aplikasi dan publikasi Data Statistik pertanian, perikanan dan ketahanan pangan. | Internal   |
| 10. | BULOG                                                     | Pengelola Pemberian Bantuan Pangan Pemerintah (BNPT), Penyedia cadangan pangan daerah.    | Eksternal  |
| 11. | BPS                                                       | Penyedia dan publikasi Data Statistik pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.          | Eksternal  |
| 12. | LSM dan Lembaga swadaya masyarakat                        | Pendamping petani (program pemberdayaan) dan pendukung pertanian berkelanjutan.           | Eksternal  |

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain berfungsi sebagai entitas bisnis untuk memperoleh keuntungan, BUMD juga mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah (OPD) dengan menjadi instrumen pembangunan daerah melalui pelayanan publik, penyediaan barang/jasa, pengelolaan SDA, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Identifikasi dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.7  
Dukungan BUMD terhadap Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

| No. | Nama BUMD        | Bentuk Dukungan                                                                        |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bank Kota Blitar | Pemberian fasilitasi permodalan untuk pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan |

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama antar daerah adalah usaha bersama antar dua atau lebih daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, demi mencapai efisiensi, efektivitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini bisa berwujud kerja sama sukarela atau kerja sama wajib (misalnya pada daerah perbatasan), dan tujuannya adalah untuk mengatasi masalah bersama, memanfaatkan potensi daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam

rangka mewujudkan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian, peternakan dan perikanan maka Pemerintah Kota Blitar bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah lainnya sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8  
Daftar Kerjasama Antar Daerah

| No. | Kerjasama Dengan Daerah Lain | Bentuk Kerjasama                                                                                                                                                                                            | Perjanjian Kerjasama                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pemerintah DKI Jakarta       | 1. Perdagangan komoditas pertanian, peternakan dan perikanan.<br>2. Pengembangan sumber daya manusia.<br>3. Pengawasan keamanan pangan<br>4. Pertukarab data dan informasi harga dan stok pangan strategis. | PKS antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Blitar<br>Nomor : 3551/PT.09/00<br>Nomor : 100.3.7/16/410.116/2025<br>Tanggal : 14 Agustus 2025 |

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Potensi daerah adalah kemampuan atau daya yang dimiliki oleh suatu wilayah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan daerah tersebut. Dalam urusan pangan, pertanian dan perikanan, Kota Blitar memiliki cukup potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi modal utama dalam pembangunan ketahanan pangan daerah yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya manusia sebagaimana berikut :

a. Komoditas unggulan

Kota Blitar dikenal sebagai salah satu penghasil produk hortikultura yang cukup terkenal yaitu Belimbing Karangsari yang pemasarannya telah mencapai luar daerah dan luar pulau. Selain produk segar, komoditas Belimbing Karangsari juga dipasarkan dalam bentuk olahan. Produk pertanian lainnya yang menjadi potensi Kota Blitar adalah padi sehat, jagung, sayuran (sawi, cabe). Kota Blitar juga dikenal sebagai sentra penghasil ikan hias terutama jenis ikan koi, cupang dan guppy. Didirikannya Sentra Usaha Ikan Hias dan Koi (SUKHOI) mengukuhkan Kota Blitar sebagai Ibu Kota Koi Indonesia. Di bidang peternakan, Kota Blitar merupakan salah satu sentra pergudangan telur ayam ras yang menjadi pemasok utama kebutuhan telur di Pulau Jawa.

b. Ketersediaan Lahan Pertanian

Walaupun sebagai daerah perkotaan berdasarkan data BPS dalam Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2025, Kota Blitar memiliki luas baku sawah sebesar 980 hektar, akan tetapi 303 hektar merupakan lahan sawah yang memenuhi kriteria sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang kedepan akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar. Adanya lahan sawah yang berpotensi sebagai LP2B ini tentunya menjadi modal utama dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kota Blitar.

c. Ketersediaan Prasarana Pertanian.

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan pertanian. Prasarana pertanian meliputi Jalan Pertanian (JUT dan JP), Jaringan Irigasi (JITUT), Pintu Air, Balai Penyuluhan Pertanian, Rumah Potong Hewan (RPH). Sampai dengan tahun 2024, ketersediaan prasarana pertanian yang idela dan berfungsi dengan

baik (JITUT, Pintu Air, Jalan Pertanian) di Kota Blitar telah mencapai 69,99 % dari total kebutuhan. Sedangkan untuk BPP telah tersedia 1 unit BPP di masing-masing kecamatan dan 3 unit RPH yang terdiri dari 1 unit RPH Unggas, 1 unit RPH Ruminansia (sapi dan kambing) dan 1 unit RPH Babi.

d. Kondisi Geografis.

Kota Blitar dengan luas  $\pm 32$  km<sup>2</sup> merupakan kota terkecil nomor 2 di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Sebagai daerah perkotaan yang terletak di tengah wilayah Kabupaten Blitar, Kota Blitar berperan penting dalam pergerakan ekonomi di Blitar Raya. Hal ini memberikan keuntungan bagi Kota Blitar terutama dalam penyediaan bahan pangan dimana mayoritas penyediaan bahan pangan di Kota Blitar berasal dari perdagangan antar daerah. Sebagai sentra perdagangan di Blitar Raya Kota Blitar memiliki potensi besar sebagai lokasi *port hub* dan pergudangan.

e. Sumber Daya Manusia Pertanian

Berdasarkan data BPS dalam Sensus Pertanian Tahun 2023, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) di Kota Blitar sebanyak 5.244 unit, dimana 37,72% (1.978 unit) bergerak disubsektor tanaman pangan, 28,39% (1.489 unit) bergerak disubsektor hortikultura, 62,01% (3.252 unit) bergerak disubsektor peternakan, 8,37% (439 unit) bergerak disubsektor perikanan dan 5,39% (283 unit) bergerak disubsektor kehutanan, perkebunan dan jasa pertanian. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Blitar yang bergerak disektor pertanian dan perikanan cukup besar.

## 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Penurunan Luas Lahan Pertanian

Ketersediaan lahan pertanian merupakan modal penting dalam usaha sektor pangan, pertanian dan perikanan. Luas baku sawah di Kota Blitar telah mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS dalam Kota Blitar Dalam Angka luas baku sawah mengalami penurunan 46 hektar dalam kurun waktu tahun 2022-2024 dari 1.026 hektar pada tahun 2022 menjadi 980 hektar pada tahun 2024, rata – rata terjadi penurunan 15,33 hektar setiap tahunnya. Penurunan ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan, industri dan fasilitas umum.

b. Belum Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Pembudidaya Ikan

Kesejahteraan petani merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan pertanian. Salah satu proxy yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada tahun 2024 telah dilaksanakan survey kesejahteraan petani di Kota Blitar yang dilaksanakan dalam kondisi terbatas, mengingat wilayah perkotaan tidak tercakup dalam penghitungan NTP regional. Walaupun demikian hasil dari survey ini cukup memberikan gambaran terhadap kesejahteraan petani di Kota Blitar. Nilai NTP > 100 menunjukkan bahwa rumah tangga petani yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan lainnya dan menabung. Pada tahun 2024 nilai rata – rata NTP di kota Blitar sebesar 101,74point masih sangat jauh jika dibandingkan dengan perolehan rata-rata NTP Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 112,21 point. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pertanian dan perikanan di Kota Blitar cukup mampu memenuhi kebutuhan dari petani akan tetapi masih sangat kecil sehingga rawan mengalami penurunan (defisit) apabila terjadi gejolak, baik secara ekonomi (inflasi), cuaca ekstrim dan kenaikan harga sarana produksi.

c. Produksi hasil pertanian dan perikanan yang fluktuatif

Produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan merupakan komponen utama dalam perhitungan PDRB sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan dan perhitungan NTP. Produksi pertanian dan perikanan mengalami fluktuasi mulai tahun 2022-2025 yang berdampak pada ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Fluktuasi produksi pertanian dan perikanan disebabkan terjadinya cuaca ekstrem (kekeringan panjang) akibat fenomena el-nino yang menyebabkan mundurnya waktu tanam dan panen, wabah penyakit hewan serta menurunnya produktivitas terutama untuk tanaman pangan khususnya padi dan jagung.

d. Masih adanya prasarana pertanian yang belum ideal.

Sampai tahun 2024, di Kota Blitar telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian berupa JITU sebanyak 113.318 meter memenuhi 69,92 % dari kebutuhan, Jalan Pertanian sebanyak 4.269 meter memenuhi 71,93% dari kebutuhan, pintu air sebanyak 81 unit memenuhi 53,29% dari kebutuhan dan 3 unit RPH. Walaupun secara keseluruhan lahan sawah di Kota Blitar merupakan lahan sawah dengan irigasi teknis, akan tetapi masih terdapat saluran irigasi dalam bentuk saluran tanah ataupun sudah rusak parah sehingga tidak berfungsi secara optimal yang menyebabkan peningkatan kehilangan air. Oleh karenanya masih diperlukan optimalisasi prasarana pertanian agar tersedia dalam kondisi baik dan dapat berfungsi secara optimal. Selain itu masih terdapat beberapa prasarana yang sangat diperlukan keberadaannya yaitu Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) untuk mendukung pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium ikan yang presentatif untuk mendukung peningkatan kualitas hasil perikanan di Kota Blitar.

e. Ancaman Terjadinya Wabah Penyakit Hewan

Wabah penyakit hewan merupakan ancaman serius terhadap produksi hasil peternakan terutama di daerah perkotaan dengan jumlah lahan yang terbatas. Pada tahun 2022 terjadi 729 kasus penyakit hewan, meningkat sebanyak 44,07% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kasus penyakit ini disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi yang berdampak pada penurunan produksi daging dan susu. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 dimana jumlah kasus penyakit hewan sebanyak 223 kasus, turun sebesar 69,41% dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2024, jumlah kejadian kasus penyakit hewan ini mengalami kenaikan lagi sebesar 87,89% dari tahun 2023 yang didominasi oleh penyakit cacangan karena sanitasi kandang yang buruk akibat perubahan cuaca ekstrim serta munculnya kembali penyakit PMK. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya wabah penyakit ternak masih sangat besar dan merupakan ancaman yang serius terhadap usaha peternakan maupun keamanan bahan pangan asal hewan.

f. Daya Saing Produk Pertanian Dan Perikanan Belum Optimal

Daya saing produk pertanian dan perikanan adalah kemampuan suatu produk untuk bersaing di pasar, baik domestik maupun internasional, dalam hal harga, kualitas, kontinuitas pasokan, nilai tambah, serta keberlanjutan produksi. Daya saing yang kuat akan mampu meningkatkan nilai jual, memperluas akses pasar, dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan petani. Nilai produksi hasil pertanian tahun 2024 sebesar Rp. 116.660.922.000,00 dan hampir keseluruhannya berasal dari produk pertanian segar tanpa tambahan perlakuan khusus. Sedangkan nilai produksi hasil perikanan tahun 2024 sebesar Rp. 37.829.168,00 dimana 63,07% diantaranya bersumber dari usaha olahan perikanan. Dari 100 pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam 11 Poklasar, baru sejumlah 27% pelaku usaha yang memiliki jaminan mutu untuk layak dipasarkan (kepelimilikan PIRT, NIB dan sertifikat halal). Selain itu pemasaran produk masih sangat tergantung pada permintaan

pasar lokal dan promosi produk juga sangat tergantung pada pelaksanaan even-even lokal. Kontinuitas produksi juga masih menjadi permasalahan tersendiri mengingat produk pertanian sebagian besar merupakan produk musiman ditambah lagi adanya keterbatasan lahan diperkotaan, sehingga inovasi teknologi dan penyediaan sarana prasarana untuk menjamin kontinuitas produksi sangat diperlukan.

- g. Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat Belum Optimal.  
Salah satu pilar ketahanan pangan daerah adalah melalui pemenuhan konsumsi pangan masyarakat yang dapat dilihat dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemenuhan kualitas dan konsumsi pangan dapat dilihat dari capaian Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan data BPS, capaian PoU Kota Blitar tahun 2024 sebesar 5,24% dan menjadi yang terendah dibandingkan wilayah pemerintah kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk skor PPH pada tahun 2024 sebesar 88,87 masih terpaut cukup jauh dari skor maksimal yaitu 100. Sedangkan Badan Pangan Nasional mencatat skor PPH Nasional adalah 93,5 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada upaya konkrit dan sistematis untuk peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat agar tercapai stabilitasi ketahanan pangan daerah.
- h. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Belum Optimal  
Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan performa birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu indikator dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah melalui akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Secara keseluruhan, Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022–2025 menunjukkan pergerakan fluktuatif tetapi cenderung meningkat. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2023 (84,77), nilai SAKIP kembali naik dan mencapai puncaknya pada 2025 (86,26). Hal ini menandakan adanya proses pembelajaran, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja perangkat daerah. Salah satu tolak ukur dalam kesuksesan implementasi sakip adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan baik dalam urusan pertanian, perikanan dan pangan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sampai dengan tahun 2025 IKM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar 86,73 (Sangat Memuaskan) dari nilai maksimal 100. Meskipun demikian nilai IKM ini masih belum optimal, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kepuasan masyarakat terutama melalui penyediaan sarana prasarana pendukung dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan alat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam Renstra dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Hasil KLHS, seperti isu prioritas dan skenario pembangunan berkelanjutan, menjadi masukan dan dasar bagi perumusan isu-isu strategis, tujuan, serta kebijakan yang akan tercantum dalam Renstra agar lebih selaras dengan kelestarian lingkungan. Identifikasi isu strategis dalam KLHS RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 untuk lingkup urusan pangan, pertanian dan perikanan disajikan dalam tabel berikut.

|                    |               |           |
|--------------------|---------------|-----------|
| Isu Strategis KLHS | No. Indikator | Indikator |
|--------------------|---------------|-----------|

|                                                         |        |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | 2.1.1* | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)                                         |
| Pengentasan Kemiskinan                                  | 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan |

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

2.2.4.1 Isu Global

1. Sustainable Development Goals (SDG's). Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Dalam tujuan SDGs yang ke 2 disampaikan bahwa untuk mengakhiri segala bentuk kelaparan dan malnutrisi pada tahun 2030, memastikan semua orang terutama anak-anak memiliki makanan yang cukup dan bergizi sepanjang tahun. Hal ini mencakup upaya mempromosikan pertanian berkelanjutan, mendukung petani skala kecil, dan akses yang setara terhadap lahan, teknologi, dan pasar. SDGs juga membutuhkan kerja sama internasional untuk memastikan investasi dalam infrastruktur dan teknologi guna meningkatkan produktivitas pertanian.
2. Isu Strategis Global Dalam RPJMN Tahun 2025-2029.  
Kondisi kecenderungan global dapat mempengaruhi dunia dalam jangka panjang, baik berupa tren kondisi, tantangan maupun peluang. Beberapa kecenderungan global kedepan disampaikan oleh Beppenas dalam hasil kajian RPJMN 2025-2029 sebagaimana gambar dibawah ini.



Isu-isu global tersebut diatas yang berkaitan dengan urusan pangan, pertanian dan perikanan adalah sebagai berikut:

**Decarbonization.** Decarbonization adalah proses mengurangi atau menghilangkan emisi karbon dioksida (CO2) dari berbagai sektor, sistem, dan kegiatan. Tujuan dari de-karbonisasi adalah untuk mengurangi efek pemanasan global yang disebabkan oleh CO2, yang merupakan gas rumah kaca utama. Beberapa manfaat de-karbonisasi antara lain: mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, menyempurnakan keamanan energi, menawarkan manfaat ekonomi dari investasi pada teknologi low-carbon, dan menciptakan lapangan kerja dalam sektor energi terbarukan. Namun, de-karbonisasi juga memiliki beberapa tantangan, seperti biaya awal yang lebih tinggi untuk mengembangkan teknologi low-carbon, kompleksitas dalam

mengembangkan strategi de-karbonisasi yang efektif, dampak potensial pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan bakar fosil, dan perlu kerjasama internasional dan koordinasi untuk mencapai tujuan global. Dalam urusan pangan, pertanian dan perikanan, de-karbonisasi sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan dengan menjaga stabilitas iklim dan mengurangi risiko gagal panen serta mendorong pola pangan yang berkelanjutan.

**Green Development.** Green development (pembangunan hijau) adalah proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang dan berkelimpahan, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuan dari pembangunan hijau adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam urusan pangan, pertanian dan perikanan, green development menekankan produksi pangan yang tidak merusak lingkungan, seperti pengurangan penggunaan bahan kimia berlebih, penerapan *eco-friendly food system* dan perlindungan lahan produktif.

**Automation, Internet of Things and Digitization.**

Internet of Things (IoT), automation dan digitalisasi adalah jaringan dari perangkat fisik yang berkomunikasi dengan perangkat lainnya dan menukar data melalui internet. IoT memiliki aplikasi luas di berbagai industri dari teknologi konsumen hingga industri otomotif dan kesehatan. Namun demikian, IoT juga menimbulkan tantangan terkait keamanan, interoperabilitas, pengelolaan data, infrastruktur jaringan, dan analisis data. IoT memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui penerapan *smart farming* untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi penggunaan sumberdaya secara berlebihan serta memperkuat daya saing petani dengan akses informasi, teknologi dan pasar yang lebih luas.

**Ekonomi Sirkular.** Prinsip Dasar Ekonomi Sirkular adalah membuat uang dan sumber daya baru melalui berbagai cara, seperti produksi, ekstraksi, dan konversi; menggunakan uang dan sumber daya untuk memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa; dan menghancurkan uang dan sumber daya yang tidak lagi digunakan atau tidak lagi memiliki nilai. Ekonomi sirkular adalah konsep yang penting dalam menggambarkan bagaimana uang dan sumber daya dibuat, digunakan, dan dihancurkan dalam sebuah sistem ekonomi. Dalam pembangunan pertanian, ekonomi sirkular diterapkan dalam praktik pertanian sirkular yang merupakan konsep integrasi seperti penggunaan pupuk organik (kotoran ternak), benih tahan penyakit serta pengelolaan air secara berulang (*reuse dan recycle*) dalam sistem irigasi.

**Aglomerasi.** Aglomerasi adalah proses di mana beberapa unit individual atau organisasi yang berbeda-beda bergabung untuk membentuk satu unit yang lebih besar dan lebih efektif. Secara global, aglomerasi dianggap sebagai motor pertumbuhan ekonomi karena menciptakan efisiensi, konektivitas, serta akses pasar yang luas. Dalam beberapa bidang, aglomerasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan. Aglomerasi memberikan peluang untuk pembangunan ketahanan pangan diantaranya adalah akses pasar yang luas, berkembangnya agroindustri dan industri perikanan, inovasi pertanian perkotaan, serta peningkatan nilai tambah produk. Namun demikian, aglomerasi juga menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan, termasuk dalam penyediaan pangan, pengelolaan pertanian, dan

perikanan antara lain alih fungsi lahan pertanian, ketergantungan pasokan dari luar kota, tekanan berlebih pada sumber daya, serta meningkatnya emisi dari distribusi pangan. Oleh karena itu, pengelolaan aglomerasi perlu mengintegrasikan sistem pangan, pertanian, dan perikanan yang berkelanjutan dan inklusif, misalnya dengan memperkuat urban farming, logistik pangan hijau, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan.

3. Perubahan Iklim Global. Peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sector pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sector terdampak.
4. Proteksi Perdagangan. Memasuki periode 2025–2030, perdagangan internasional menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya tren proteksi perdagangan yang dijalankan oleh berbagai negara. Tidak lagi memperkuat keterbukaan pasar, banyak negara justru mengedepankan kebijakan proteksionis sebagai respons terhadap tekanan geopolitik, perubahan iklim, krisis pangan, serta ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini membawa konsekuensi penting terhadap arah pembangunan global. Namun demikian kebijakan proteksi perdagangan dapat melindungi produksi pangan lokal, menjaga pendapatan petani, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat diversifikasi pangan domestic. Akan tetapi proteksi berlebihan juga dapat meningkatkan harga pangan, membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah, dan menimbulkan ketegangan dagang internasional.

#### 2.2.4.2 Isu Nasional

RPJMN 2025-2029.

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan ke 2 yaitu Memantapkan Sistem Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan sasaran meningkatnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) terdapat beberapa isu strategis :

- Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan.
- Menurunnya lahan baku sawah
- Sekitar 89,54% lahan pertanian, berstatus kurang berkelanjutan.
- Terjadinya stagnasi/penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- Relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan.
- Sekitar 12,1% kabupaten/kota mengalami rentan rawa pangan.
- Perlunya penguatan cadangan pangan nasional untuk menghadapi berbagai kondisi.
- Berfluktuasinya harga pangan antar musim dan antar wilayah.
- Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sector pertanian.
- Menurunnya proporsi petani/nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian.

#### 2.2.4.3 Isu Strategis Regional

##### a. RPJMN 2025-2029.

Isu Wilayah Jawa yang berkaitan dengan urusan pangan, pertanian dan perikanan adalah :

- Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.

- Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan.
  - Prevalensi stunting, wasting, dan underweight masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023).
  - Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi DIY mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantong kemiskinan tinggi.
- b. RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029
- Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani. Kedaulatan Pangan Jawa Timur terkonfirmasi dari tingginya kontribusi komoditas agro (pertanian dalam arti luas) Jawa Timur terhadap nasional, sehingga menjadi lumbung pangan nasional. Kebutuhan pangan di Jawa Timur hampir seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik. Surplus komoditas pangan pertanian di Jawa Timur selain didukung potensi sumber daya alam yang sesuai, juga sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur pendukung yang cukup baik. Adapun demikian, masih didapati di Jawa Timur adanya kelangkaan bahan pangan pokok di tempat dan waktu tertentu. Hal ini karena ada hasil produksi pangan dan Agro Jawa Timur dibeli oleh Provinsi lain dengan jumlah yang banyak sehingga pernah terjadi kelangkaan stok. Ke depan Jawa Timur memerlukan penataan logistic dan stok pangan dan pertanian strategis lainnya untuk menjaga kestabilan stok dan harga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk menjaga kedaulatan pangan Jawa Timur dan mendukung swasembada pangan nasional ke depan, perlu dilakukan upaya regenerasi petani sebagai produsen komoditas pangan pertanian. Dari sisi kesejahteraan pelaku usaha pangan dan agro, Nilai Tukar Petani (NTP) tahunan di Provinsi Jawa Timur beberapa tahun terakhir terus tumbuh. Pertumbuhan NTP tahunan pada beberapa kurun waktu ini, selain terdorong dari naiknya harga beras, juga ditopang dari kondisi makro ekonomi pedesaan yang meningkat. Peningkatan kesejahteraan petani ini perlu dipertahankan lebih lanjut dengan upaya menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, meningkatkan efisiensi produksi melalui intensifikasi dan penguatan saprodi hulu produksi, dan membuat nilai tambah hilir olahan produk pangan pertanian di tingkat petani. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Visi Jawa Timur 5 (lima) tahun kedepan adalah “BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045”, dijabarkan dalam 8 (delapan) misi yang disebut Nawa Bhakti Satya. Pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Jawa Timur tercantum dalam Nawa Bhati Satya ke -7 yaitu JATIM AGRO dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Dalam rangka mengawal keberhasilan Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan serta Meningkatkan Kedaulatan Pangan, telah dirumuskan sasaran-sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Misi Jatim Agro, ditetapkan strategi hilirisasi sektor Agro mendukung ketahanan pangan dengan Fokus pembangunan melalui pengembangan komoditas unggulan dan dukungan infrastruktur esensial, dengan arah kebijakan :
- Hilirisasi SDA agro melalui pengembangan pengolahan agro komoditas unggulan, penerapan close loop model, korporasi petani, dan ekonomi biru.

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan sektor agro dan pengembangan pemasaran agro.
  - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
  - Pemantapan hulu agro melalui peningkatan produktivitas melalui pengembangan pertanian dan perikanan modern serta infrastruktur esensial untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- c. RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029
- Isu-isu strategis Kota Blitar dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :
- Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
  - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
  - Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi
  - Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
  - Satu Data
  - Pelayanan Pemerintah menuju Smart Governance
  - Penciptaan Wilayah Aman dan Kondusif serta Perlindungan Masyarakat
  - Ketahanan Pangan
- d. Perubahan Iklim. Perubahan iklim global semakin nyata dampaknya terhadap sektor pembangunan, khususnya pada pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Fenomena perubahan pola cuaca, peningkatan suhu, kekeringan berkepanjangan, curah hujan ekstrem, serta kenaikan permukaan laut telah mengubah ekosistem produksi pangan. Hal ini menjadikan pembangunan pertanian dan perikanan menghadapi tantangan baru yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- e. Alih Fungsi Lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta ekspansi sektor industri dan infrastruktur telah mendorong lahan-lahan produktif berubah menjadi kawasan permukiman, jalan, atau peruntukan non-pertanian lainnya. Kondisi ini mengurangi ketersediaan lahan subur yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan pangan. Luas Baku Sawah Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun 2019 seluas 1.214.909,06 ha menjadi 1.207.977,383 ha pada tahun 2024.
- f. Kerusakan lingkungan. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan dalam pertanian, seperti pupuk anorganik, pestisida, dan herbisida, seringkali dianggap sebagai jalan cepat untuk meningkatkan produktivitas. Namun, praktik ini justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak luas terhadap pembangunan pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan. Residu bahan kimia yang menumpuk di tanah dapat menurunkan kesuburan lahan dalam jangka panjang, merusak biodiversitas mikroorganisme tanah, serta menurunkan kualitas air irigasi. Petani yang semula mendapatkan hasil panen lebih tinggi justru terjebak pada ketergantungan input kimia yang mahal, sehingga biaya produksi meningkat dan keuntungan menurun.
- g. Diversifikasi Pangan Lokal. Ketergantungan yang tinggi terhadap beras menjadikan sistem pangan daerah sangat rentan. Sebagian besar masyarakat masih menempatkan beras sebagai sumber karbohidrat utama, sementara potensi pangan lokal seperti jagung, ubi, pisang, maupun umbi-umbian belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan diversifikasi pangan berjalan lambat, sehingga ketika terjadi gangguan produksi padi akibat iklim, alih fungsi lahan, atau gangguan distribusi, stabilitas pangan nasional langsung terguncang.

Di sisi lain, indikator PoU (*Prevalence of Undernourishment*) menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk yang tidak mendapatkan asupan energi cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Meskipun produksi beras relatif mencukupi, tingginya PoU menunjukkan bahwa akses dan kualitas konsumsi pangan masyarakat masih belum merata. Hal ini menandakan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan beras, tetapi juga soal keterjangkauan, keberagaman, dan nilai gizi pangan. Ketergantungan pada satu komoditas membuat konsumsi pangan masyarakat kurang beragam, sehingga rawan kekurangan zat gizi mikro meski energi tercukupi. Dilain sisi ketidakstabilan pasokan terutama harga beras langsung berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan harian, yang pada akhirnya memperburuk PoU. Untuk itu, pembangunan ketahanan pangan ke depan harus mengurangi ketergantungan pada beras melalui diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, sekaligus menurunkan PoU dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi seimbang. Strategi yang dapat ditempuh antara lain: penguatan cadangan pangan daerah, peningkatan produksi dan konsumsi pangan non-beras, subsidi dan perlindungan pangan untuk masyarakat rentan, serta edukasi gizi seimbang melalui pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

#### 2.2.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, telaahan isu global, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, isu/kebijakan Kota Blitar, dan KLHS RPJMD Kota Blitar, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                               | Permasalahan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah                                                                                              | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Komoditas unggulan Kota Blitar</li><li>• Ketersediaan lahan pertanian</li><li>• Ketersediaan prasarana pertanian</li><li>• Kondisi Geografis</li><li>• Sumberdaya Manusia Pertanian</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penurunan luas lahan pertanian</li><li>• Belum terwujudnya kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan</li><li>• Masih adanya prasana pertanian yang belum ideal.</li><li>• Ancaman terjadinya wabah penyakit hewan</li><li>• Daya Saing Produk Pertanian Dan Perikanan Belum Optimal</li><li>• Kualitas dan Kuantitas Konsumsi Pangan Masyarakat Belum Optimal</li><li>• Produksi hasil pertanian dan perikanan yang fluktuatif</li><li>• Kinerja pelayanan perangkat daerah yang belum optimal</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengentasan Kemiskinan</li><li>• Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengakhiri segala bentuk kelaparan dan malnutrisi pada tahun 2030</li><li>• Perubahan Iklim Global.</li><li>• Proteksi Perdagangan.</li><li>• Geopolitik dan Geoekonomi</li><li>• Decarbonization</li><li>• Green Development</li><li>• Automation, Internet of Things and Digitization</li><li>• Ekonomi sekuler</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya jumlah dan keragaman permintaan akan bahan pangan.</li><li>• Menurunnya lahan baku sawah</li><li>• Sekitar 89,54% lahan pertanian, berstatus kurang berkelanjutan.</li><li>• Terjadinya stagnasi/penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan.</li><li>• Relatif tingginya ketergantungan terhadap inpor pangan.</li><li>• Perlunya penguatan cadangan pangan nasional untuk menghadapi berbagai kondisi.</li><li>• Berfluktuasinya harga pangan anatr musim dan antar wilayah.</li><li>• Rendahnya kesejahteraan petani/nelayan dan nilai tambah tenaga kerja sector pertanian.</li><li>• Menurunnya proporsi petani/ nelayan muda dan rendahnya adopsi teknologi pertanian.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani.</li><li>• Perubahan Iklim. Terjadi Bencana Banjir dan Kekeringan diareal pertanian berdampak penurunan produksi tanaman pangan dan hortikultura</li><li>• Alih Fungsi Lahan. Luas Baku Sawah Jawa Timur tahun 2019 seluas 1.214.909,06 ha menjadi 1.207.977,383 ha (2024)</li><li>• Kerusakan lingkungan. Penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan irigasi yang berlebihan menyebabkan pencemaran air dan tanah</li><li>• Diversifikasi Pangan Lokal. Mengurangi ketergantungan pada beras menurunkan PoU dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat (B2SA) mendukung program Nasional MBG</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya diversifikasi konsumsi dan ketersediaan pangan masyarakat.</li><li>• Alih Fungsi Lahan pertanian</li><li>• Belum optimalnya produktivitas produk pertanian dan perikanan</li><li>• Belum optimalnya daya saing produk pertanian dan perikanan</li><li>• Perubahan iklim yang menyebabkan bencana dan ancaman OPT</li><li>• Ancaman wabah penyakit hewan</li><li>• Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah</li></ul> |

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

##### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka menjawab isu strategis perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Formulasi tujuan pembangunan perangkat daerah lima tahun kedepan mempertimbangkan pencapaian sasaran visi RPJPD Kota Blitar 2025-2045 serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar yang tercantum dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam penentuan indicator tujuan dan sasaran pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga memperhatikan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang termuat pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 dan Indikator Kinerja Daerah sebagai salah satu upaya untuk mengawal pencapaian target IUP dan IKD di tiap tahapan pembangunan. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                           | Tujuan                                                                        | Sasaran                                 | Indikator                                                                 | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baseline 2024   | Satuan | Target Tahun    |                 |                 |                 |                 |                 |                       | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----|
|    |                                                               |                                                                               |                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | akhir periode Renstra |     |
|    | Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat | Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau |                                         | Indeks Ketahanan Pangan (IKP)                                             | Suatu sistem penilaian yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.                                  | Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (zona hijau menandakan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik). | 80.80           | Angka  | 80.95           | 81.56           | 82.31           | 83.06           | 84.81           | 84.56           | 84.56                 |     |
|    |                                                               |                                                                               | Tercukupinya Konsumsi Pangan Masyarakat | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. | Presentase penduduk yang mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan energinya. Pengkategorian persentase PoU dibagi dalam 5 status yaitu sangat rendah bila PoU <2,5%, rendah nilai PoU 2,5% sd 4%, sedang nilai PoU 5%-19%, tinggi nilai PoU 20%-34% dan sangat tinggi nilai PoU > 35%.                                      | 5.42            | Persen | 5.48            | 5.28            | 5.08            | 4.88            | 4.68            | 4.48            | 4.48                  |     |
|    |                                                               | Meningkatnya Kesejahteraan Petani                                             |                                         | PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                   | Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.                                                                         | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar                                                                                                                                                                                                              | 200.430.000.000 | Rupiah | 200.430.000.000 | 200.630.000.000 | 200.830.000.000 | 201.030.000.000 | 201.230.000.000 | 201.430.000.000 | 201.430.000.000       |     |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran                                             | Indikator                                      | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                       | Formulasi Perhitungan                                                            | Baseline 2024 | Satuan                  | Target Tahun |        |        |       |        |        |                       | Ket |
|----|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------------------|-----|
|    |                                     |        |                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |               |                         | 2025         | 2026   | 2027   | 2028  | 2029   | 2030   | akhir periode Renstra |     |
|    |                                     |        | Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan | Produktivitas Daging                           | Ukuran kemampuan produksi daging (karkas + edible offal) / ekor ternak (kg/ekor)                                                                                                                                                                                           | Jumlah rata-rata produksi daging (karkas + edible offal) / ekor ternak (kg/ekor) | 45.73         | kg/ekor                 | 45.73        | 45.73  | 45.73  | 45.73 | 45.73  | 45.73  | 45.73                 | IKU |
|    |                                     |        |                                                     | Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Hias     | Produktivitas perikanan budidaya ikan hias dihitung dengan membandingkan jumlah produksi ikan hias dengan luas lahan atau volume tempat pemeliharaan. Secara sederhana, bisa dihitung sebagai jumlah ikan hias (ekor) per unit luas (m2) atau volume (m3).                 | Jumlah ikan hias (ekor) / luas kolam yang diusahakan (m3)                        | 103.03        | ekor/meter <sup>3</sup> | 103.36       | 103.57 | 103.78 | 104   | 104.21 | 104.41 | 104.41                | IKU |
|    |                                     |        |                                                     | Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Konsumsi | Produktivitas perikanan budidaya ikan konsumsi dihitung dengan membandingkan jumlah produksi ikan konsumsi dalam kg dengan luas lahan atau volume tempat pemeliharaan. Secara sederhana, bisa dihitung sebagai produksi ikan konsumsi per unit luas (m2) atau volume (m3). | Jumlah produksi ikan konsumsi (kg) / luas kolam yang diusahakan (m3)             | 4.96          | kg/meter <sup>3</sup>   | 4.99         | 5.05   | 5.10   | 5.15  | 5.20   | 5.25   | 5.25                  | IKU |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran                                          | Indikator                                    | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                    | Baseline 2024  | Satuan        | Target Tahun   |                |                |                |                |                |                       | Ket |
|----|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----|
|    |                                     |        |                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                |               | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | akhir periode Renstra |     |
|    |                                     |        |                                                  | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Produktivitas pertanian adalah ukuran hasil atau output yang dihasilkan oleh tanaman pangan/horti utama dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam satuan berat per hektar. Tanaman pangan/horti utama meliputi : padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, sawi, cabe keriting, cabe rawit, terung, kangkung, belimbing. | Jumlah produksi (ton) / luas panen (ha)                                                                                                                                                  | 4.83           | ton/ha        | 5.14           | 5.23           | 5.33           | 5.43           | 5.53           | 5.63           | 5.63                  | IKU |
|    |                                     |        |                                                  | Produktivitas Susu                           | Ukuran kemampuan produksi susu tiap ekor ternak betina produktif selama 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah rata-rata produksi susu selama 1 tahun per ekor ternak (kg/ekor/tahun)                                                                                                            | 1739,95        | kg/ekor/tahun | 1739,95        | 1739,95        | 1739,95        | 1739,95        | 1739,95        | 1739,95        | 1739,95               | IKU |
|    |                                     |        |                                                  | Produktivitas Telur                          | Ukuran kemampuan produksi telur tiap ekor ternak betina produktif selama 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah rata-rata produksi telur selama 1 tahun per ekor ternak (kg/ekor/tahun)                                                                                                           | 6.49           | kg/ekor/tahun | 6.49           | 6.49           | 6.49           | 6.49           | 6.49           | 6.49           | 6.49                  | IKU |
|    |                                     |        | Meningkatnya nilai hasil pertanian dan perikanan | Nilai hasil perikanan prioritas              | Nilai hasil perikanan adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pemasaran ikan segar dan omset usaha olahan hasil perikanan yang dihitung kumulatif dalam satu tahun.                                                                                                                                                            | Nilai hasil perikanan segar + omset usaha produk olahan hasil perikanan.<br><br>Nilai hasil perikanan segar = Jumlah produksi hasil perikanan (kg) x harga tingkat pembudidaya (Rp./Kg.) | 12.835.000.000 | Rupiah        | 12.963.000.000 | 13.093.000.000 | 13.224.000.000 | 13.356.000.000 | 13.490.000.000 | 13.625.000.000 | 13.625.000.000        | IKU |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran                               | Indikator                       | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                            | Formulasi Perhitungan                                                 | Baseline 2024  | Satuan | Target Tahun   |                |                |                |                |                |                       | Ket |
|----|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----|
|    |                                     |        |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                |        | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | akhir periode Renstra |     |
|    |                                     |        |                                       | Nilai hasil pertanian prioritas | Nilai hasil pertanian adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dihitung kumulatif dalam satu tahun.                                                                              | Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.) | 66.059.050.000 | Rupiah | 84.858.908.060 | 85.113.099.825 | 85.660.306.963 | 86.227.534.264 | 86.695.603.865 | 87.140.463.755 | 87.140.463.755        | IKU |
|    |                                     |        | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai IKM Perangkat Daerah      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma. | Nilai IKM dalam Sukma-e Jatim.                                        | 87.70          | Indeks | 88             | 88.5           | 89             | 89.5           | 90             | 90.5           | 90.5                  |     |

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Strategi juga merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun melalui identifikasi isu strategis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 52 menyatakan bahwa arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memperhatikan strategi dan arah kebijakan fokus pembangunan RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029. Atas dasar tersebut maka Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029, adalah :

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

| Strategi RPJMD                       | Isu Strategis                                                        | Strategi Renstra                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | Kurangnya diversifikasi konsumsi dan ketersediaan pangan masyarakat. | Meningkatkan diversifikasi konsumsi dan ketersediaan pangan masyarakat                      |
|                                      | Alih Fungsi Lahan pertanian                                          | Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan                                           |
|                                      | Belum optimalnya produktivitas produk pertanian dan perikanan        | Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan                                          |
|                                      | Belum optimalnya daya saing produk pertanian dan perikanan           | Meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan                                      |
|                                      | Ancaman wabah penyakit hewan                                         | Meningkatkan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner                 |
|                                      | Perubahan iklim yang menyebabkan bencana dan ancaman OPT             | Meningkatkan pengelolaan dampak perubahan iklim dan OPT                                     |
|                                      | Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah       | Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan |

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

| Tahap I                                                        | Tahap II                                                                                                                              | Tahap III                                                                          | Tahap IV                                                                                         | Tahap V                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -2026                                                          | -2027                                                                                                                                 | -2028                                                                              | -2029                                                                                            | -2030                                                                                                                               |
| Peningkatan Ketahanan Pangan melalui peningkatan Kapasitas SDM | Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan daya saing, penguatan kelembagaan petani dan penguatan cadangan pangan rumah tangga. | Peningkatan Ketahanan Pangan melalui penerapan inovasi dan teknologi berkelanjutan | Peningkatan Ketahanan Pangan melalui kemandirian petani dan penguatan cadangan pangan pemerintah | Peningkatan ketahanan pangan melalui Stabilisasi Produksi, Penguatan Pasar dan budaya konsumsi pangan masyarakat yang berbasis B2SA |

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

| No | Operasionalisasi NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A. | URUSAN PANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|    | <p>Penyelenggaraan Ketahanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</li><li>- Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.</li><li>- Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li></ul> <p>Penanganan Kerawanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan</li><li>- Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.</li><li>- Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota</li></ul> <p>Keamanan Pangan</p> <p>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan implementasi teknologi smart farming dan smart marketing guna mewujudkan ketahanan pangan</li><li>- Peningkatan ketahanan pangan melalui smart farming dan stabilitas harga terkait usaha pertanian</li></ul>                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)</li><li>- Meningkatkan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan konsumsi pangan tingkat rumah tangga sekaligus peningkatan pendapatan</li><li>- Peningkatan pemantauan harga bahan pangan pokok</li><li>- Peningkatan penanganan rawan pangan melalui pemetaan rawan pangan dan pemberian bantuan pangan kepada masyarakat rentan rawan pangan</li><li>- Meningkatkan pengawasan psat pre market dan post market untuk menjamin peredaran pangan yg aman dikonsumsi</li></ul> |            |
| B. | URUSAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</li><li>- Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan</li><li>- Pengelolaan pembudidayaan ikan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming</li><li>- Peningkatan ketahanan pangan melalui smart farming dan stabilitas harga terkait usaha pertanian</li><li>- Peningkatan implementasi teknologi smart farming dan smart marketing guna mewujudkan ketahanan pangan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan penerapan perijinan produk hasil perikanan dan olahan hasil perikanan.</li><li>- Meningkatkan penerapan inovasi teknologi Budiaya Perikanan melalui implementasi smart farming yang berkelanjutan</li><li>- Peningkatan pemenuhan benih ikan</li><li>- Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan Peningkatan pemasaran hasil perikanan dengan teknologi smart marketing.</li><li>- Meningkatkan penerapan inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas olahan hasil perikanan.</li></ul>                                                                    |            |

| No | Operasionalisasi NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arah Kebijakan RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arah Kebijakan Renstra PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. | URUSAN PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|    | <p>Sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</li><li>- Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota</li><li>- Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota.</li><li>- Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</li></ul> <p>Prasarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengembangan prasarana pertanian.</li></ul> <p>Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah kabupaten/koa serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten/kota</li><li>- Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.</li><li>- Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</li><li>- Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</li></ul> <p>Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.</li></ul> <p>Perizinan Usaha Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota.</li><li>- Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</li><li>- Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi smart farming</li><li>- Peningkatan ketahanan pangan melalui smart farming dan stabilitas harga terkait usaha pertanian</li><li>- Peningkatan implementasi teknologi smart farming dan smart marketing guna mewujudkan ketahanan pangan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatkan ketersediaan sarana pertanian seperti benih unggul bersertifikat, alsintan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi</li><li>- Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</li><li>- Peningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian</li><li>- Peningkatkan penerapan inovasi teknologi pertanian melalui implementasi smart farming yang berkelanjutan</li><li>- Meningkatkan ketersediaan sarana peternakan seperti benih/bibit unggul, pakan berkualitas dan obat hewan berkualitas.</li><li>- Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak</li><li>- Peningkatan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat pengecer</li><li>- Peningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana pertanian.</li><li>- Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak dan produksi hasil peternakan</li><li>- Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak</li><li>- Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam penerapan Kesmavet</li><li>- Peningkatan penerapan dan pengawasan kesejahteraan hewan.</li><li>- Peningkatan pengendalian Organisme pengganggu tanaman OPT</li><li>- Peningkatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) untuk tanaman pangan dan hortikultura</li><li>- Peningkatan pemasaran hasil pertanian dengan teknologi smart marketing.</li><li>- Meningkatkan penerapan perijinan dan kualitas produk hasil pertanian dan peternakan.</li></ul> |            |

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

|                                                                      |                                                                               |                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi RPJMD Tahun 2025-2029                                           | : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN           |                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Misi                                                                 | : Misi 2 : Mewujudkan Kota Blitar sehat dan sejahtera                         |                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tujuan                                                               | : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat                                       |                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sasaran                                                              | : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat               |                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Isu Strategis                                                        | Tujuan                                                                        | Sasaran                                             | Strategi                                                                                                        | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurangnya diversifikasi konsumsi dan ketersediaan pangan masyarakat. | Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau | Tercukupinya Konsumsi Pangan Masyarakat             | Meningkatkan diversifikasi konsumsi dan ketersediaan pangan masyarakat                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)</li><li>- Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan konsumsi pangan tingkat rumah tangga sekaligus peningkatan pendapatan</li><li>- Peningkatan penanganan rawan pangan melalui pemetaan rawan pangan dan pemberian bantuan pangan kepada masyarakat rentan rawan pangan</li><li>- Peningkatan pengawasan psat pre market dan post market untuk menjamin peredaran pangan yg aman dikonsumsi</li></ul>          |
| Belum optimalnya produktivitas pertanian dan perikanan               | Meningkatnya Kesejahteraan Petani                                             | Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan | Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan ketersediaan dan pengawasan sarana pertanian dan peternakan yang berkualitas.</li><li>- Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana pertanian.</li><li>- Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian dan perikanan.</li><li>- Peningkatan penerapan inovasi teknologi pertanian dan perikanan</li><li>- Peningkatan pemenuhan benih ikan</li><li>- Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak dan produksi hasil peternakan</li><li>- Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak</li></ul> |
| Alih Fungsi Lahan pertanian                                          |                                                                               |                                                     | Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan                                                               | Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Perubahan iklim yang menyebabkan bencana dan ancaman OPT             |                                                                               |                                                     | Meningkatkan pengelolaan dampak perubahan iklim dan OPT                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan pengendalian Organisme pengganggu tanaman OPT</li><li>- Peningkatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) untuk tanaman pangan dan hortikultura</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ancaman wabah penyakit hewan                                         |                                                                               |                                                     | Meningkatkan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta penerapan kesejahteraan hewan | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam penerapan Kesmavet</li><li>- Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak</li><li>- Peningkatan penerapan dan pengawasan kesejahteraan hewan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Isu Strategis                                                  | Tujuan | Sasaran                                     | Strategi                                                                                    | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belum optimalnya daya saing produk pertanian dan perikanan     |        | Meningkatnya nilai produksi hasil pertanian | Meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatkan penerapan perijinan usaha pertanian, peternakan dan perikanan</li><li>- Peningkatan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan dengan teknologi smart marketing.</li><li>- Peningkatan penerapan inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.</li></ul>                   |
|                                                                |        | Meningkatnya nilai produksi hasil perikanan |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah |        | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah       | Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</li><li>- Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku</li><li>- Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.</li></ul> |

BAB IV  
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar merupakan program yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Blitar, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan terukur, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Adapun rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan berikut ini disusun secara sistematis berdasarkan keterkaitan antara tugas dan fungsi Perangkat Daerah, acuan NSPK, serta kontribusinya terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                | Tujuan                                                                        | Sasaran                                 | Outcome                                                    | Output                                                                                | Indikator                                                                                  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial |                                                                               |                                         |                                                            |                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                           |            |
|    | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN           |                                                                               |                                         |                                                            |                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                           |            |
|    |                                                    | Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau |                                         |                                                            |                                                                                       | Indeks Ketahanan Pangan (IKP)                                                              |                                                                                                                                                                           |            |
|    |                                                    |                                                                               | Tercukupinya Konsumsi Pangan Masyarakat |                                                            |                                                                                       | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)                 |                                                                                                                                                                           |            |
|    |                                                    |                                                                               |                                         | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat |                                                                                       | Skor Pola Pangan Harapan                                                                   | 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                               |            |
|    |                                                    |                                                                               |                                         |                                                            | Terjaganya pemenuhan bahan pangan                                                     | Persentase pemenuhan kebutuhan bahan pangan                                                | 2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |            |
|    |                                                    |                                                                               |                                         |                                                            | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                   |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                           | Indikator                                                                                                  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                   | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                              | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                       | 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                       |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis                                          | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis       |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                           | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                       | 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                       |            |
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya penyediaan cadangan pangan daerah                                                                   | Persentase jumlah cadangan pangan                                                                          | 2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                      |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                           | 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                         |            |
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya konsumsi pangan selain beras/terigu                                                                 | Persentase konsumsi pangan selain beras/terigu                                                             | 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun                  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                   | 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun           |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                          | Output                                                                            | Indikator                                                                    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                             | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |                                                  | Terlaksananya Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   | 2.09.03.2.04.0005 - Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   |            |
|    |                                     |        |         | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan         |                                                                                   | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                        | 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                             |            |
|    |                                     |        |         |                                                  | Meningkatnya penanganan keluarga rentan rawan pangan                              | Persentase keluarga rentan rawan pangan mendapatkan bantuan bahan pangan     | 2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                      |            |
|    |                                     |        |         |                                                  | Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                              | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                                | 2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                    |            |
|    |                                     |        |         |                                                  | Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota               | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota               | 2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota    |            |
|    |                                     |        |         | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan |                                                                                   | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan   | 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                              |            |
|    |                                     |        |         |                                                  | Meningkanya pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan        | Persentase pangan segar yang telah diuji                                     | 2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota         |            |
|    |                                     |        |         |                                                  | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                      | Tujuan                            | Sasaran                                             | Outcome                                  | Output | Indikator                                                                                                               | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                  | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | Meningkatnya Kesejahteraan Petani |                                                     |                                          |        | PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                                                                                 |                                                                                                                                |            |
|    |                                                          |                                   | Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan |                                          |        | Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Hias                                                                              |                                                                                                                                |            |
|    |                                                          |                                   |                                                     |                                          |        | Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Konsumsi                                                                          |                                                                                                                                |            |
|    |                                                          |                                   |                                                     | Meningkatnya produksi perikanan budidaya |        | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                                      | 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                               |            |
|    |                                                          |                                   |                                                     |                                          |        | Persentase Izin Usaha budidaya perikanan yang Diterbitkan                                                               |                                                                                                                                |            |
|    |                                                          |                                   |                                                     |                                          |        | Persentase usaha budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis                                                        | 3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |            |
|    |                                                          |                                   |                                                     |                                          |        | Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                |            |
|    |                                                          |                                   |                                                     |                                          |        | Meningkatnya pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan pengelolaan pembudidayaan ikan                                  |                                                                                                                                |            |
|    |                                                          |                                   |                                                     |                                          |        | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                            |                                                                                                                                |            |
|    |                                                          |                                   |                                                     |                                          |        | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                           | 3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                             |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran                                                   | Outcome                                     | Output                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                         | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |                                                           |                                             | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |            |
|    |                                     |        |                                                           |                                             | Meningkatnya pemenuhan produksi perikanan budidaya                                                                                   | Persentase Pembudidaya Ikan yang Memenuhi Standart Mutu Budidaya Perikanan                                                                                    | 3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                         |            |
|    |                                     |        |                                                           |                                             | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             |            |
|    |                                     |        |                                                           |                                             | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      | 3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      |            |
|    |                                     |        |                                                           |                                             | Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                               | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                       | 3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                              |            |
|    |                                     |        | Meningkatnya nilai produksi hasil pertanian dan perikanan |                                             |                                                                                                                                      | Nilai produksi hasil perikanan prioritas                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |            |
|    |                                     |        |                                                           | Meningkatnya konsumsi ikan oleh rnasvarakat |                                                                                                                                      | Persentase Izin Usaha pengolahan hasil perikanan yang Diterbitkan                                                                                             | 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                            |            |
|    |                                     |        |                                                           |                                             |                                                                                                                                      | Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya usaha pengolahan perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis                                                                                    | Persentase usaha pengolahan perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis                                                                                                                                                    | 3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                                 |            |
|    |                                     |        |         |         | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                     | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                                                                           | 3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                  |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                            | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                                                                               | 3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko |            |
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya unit usaha hasil perikanan yang memiliki standar jaminan mutu                                                                                  | Persentase unit usaha hasil perikanan yang memiliki standar jaminan mutu                                                                                                                                                  | 3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                     |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | 3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko        |            |
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi                                                                                                      | Persentase pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi                                                                                                                                                                      | 3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                       |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan         | Tujuan | Sasaran                           | Outcome                                                    | Output                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                           | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                             | Keterangan |
|----|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |        | Meningkatnya IKM Perangkat Daerah |                                                            | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                         | 3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            |            |
|    |                                             |        |                                   |                                                            |                                                                                                                                         | Nilai IKM Perangkat Daerah                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |            |
|    |                                             |        |                                   | Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah |                                                                                                                                         | Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku                                                                     | 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                     |            |
|    |                                             |        |                                   |                                                            | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                                           | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar                                                         | 3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |            |
|    |                                             |        |                                   |                                                            | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       |            |
|    |                                             |        |                                   |                                                            | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     |            |
|    |                                             |        |                                   |                                                            | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                 | 3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                |            |
|    |                                             |        |                                   |                                                            | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                              | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                                    | 3.27.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                   |            |
|    |                                     |        |         |         | Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan      | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | 3.27.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan |            |
|    |                                     |        |         |         | Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah                                                                                           | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar                                                                                       | 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                | 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                      |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD              | 3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                        |            |
|    |                                     |        |         |         | Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                                                                | Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar                                                                            | 3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                      |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                               | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                       | 3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                            |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                 | Indikator                                                                          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                        | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Terpenuhinya pelayanan administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah    | 3.27.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah            |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                       | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                        | 3.27.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           |            |
|    |                                     |        |         |         | Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah       | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar | 3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | 3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | 3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |            |
|    |                                     |        |         |         | Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah             | Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar          | 3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                               | Indikator                                                                            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                          | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |            |
|    |                                     |        |         |         | Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan         | Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan          | 3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | 3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | 3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel                                                    |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 3.27.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |            |
|    |                                     |        |         |         | Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran            | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar                           | 3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                              | Indikator                                                                                              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                           | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |            |
|    |                                     |        |         |         | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan                                                      | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan                                       | 3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                        | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | 3.27.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                      |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        | 3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran                                               | Outcome                                               | Output                                                                                                   | Indikator                                                                                                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                               | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        | Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan   |                                                       |                                                                                                          | Produktivitas Daging                                                                                           |                                                                                                                             |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       |                                                                                                          | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                                                   |                                                                                                                             |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       |                                                                                                          | produktivitas Susu                                                                                             |                                                                                                                             |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       |                                                                                                          | Produktivitas Telur                                                                                            |                                                                                                                             |            |
|    |                                     |        | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian |                                                                                                          | Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura                                                                   | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                              |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       |                                                                                                          | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                                                                 |                                                                                                                             |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       |                                                                                                          | Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan                                                           |                                                                                                                             |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       | Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian                                                      | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian                                                              | 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                       |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                         | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan                                                 | Persentase peternak yang dibina                                                                                | 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota         |            |
|    |                                     |        |                                                       |                                                       | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                  | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                      | 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                  |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                  | Indikator                                                                          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                     | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Meningkatkan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan | Persentase Pengawasan Penggunaan Pakan Ternak yang Sesuai Standar                  | 3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |            |
|    |                                     |        |         |         | Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil              | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil   | 3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                     |            |
|    |                                     |        |         |         | Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak               | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                      |            |
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer                                  | Persentase Obat Hewan yang Sudah Teregister                                        | 3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                          |            |
|    |                                     |        |         |         | Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan                                     | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar              | 3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                   |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                 | Persentase benih/bibit yang tersedia                                               | 3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain    |            |
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                 | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                 | 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                         |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                  | Output                                                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                                    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian |                                                                                                                                                                              | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B                                                                                                    | 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                                |            |
|    |                                     |        |         |                                                          |                                                                                                                                                                              | Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |            |
|    |                                     |        |         |                                                          | Menurunnya alih fungsi lahan pertanian                                                                                                                                       | Jumlah alih fungsi lahan pertanian                                                                                                                           | 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                  |            |
|    |                                     |        |         |                                                          | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                              | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                     | 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                            |            |
|    |                                     |        |         |                                                          | Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                             | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                                                   | 3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota                                                      |            |
|    |                                     |        |         |                                                          | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCPB di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |            |
|    |                                     |        |         |                                                          | Meningkatnya prasarana pertanian yang tersedia sesuai standar                                                                                                                | Persentase prasarana pertanian yang tersedia sesuai standar                                                                                                  | 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                   |            |
|    |                                     |        |         |                                                          | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani                                                                                                                | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                                | 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                  |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                                      | Output                                                                                             | Indikator                                                                                                   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                        | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |                                                                              | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air                                             | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                               | 3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air                                             |            |
|    |                                     |        |         |                                                                              | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara   | 3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya |            |
|    |                                     |        |         |                                                                              | Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani                                      | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                      | 3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                        |            |
|    |                                     |        |         |                                                                              | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas                                 | Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                              | 3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas                           |            |
|    |                                     |        |         |                                                                              | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan                        | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                     | 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                  |            |
|    |                                     |        |         | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner |                                                                                                    | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                    |            |
|    |                                     |        |         |                                                                              |                                                                                                    | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)                                                |                                                                                                                      |            |
|    |                                     |        |         |                                                                              | Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner                                  | Persentase penyakit ternak/hewan yang tertangani sesuai standar                                             | 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota          |            |
|    |                                     |        |         |                                                                              | Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium                                                            | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                          | 3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                           |            |
|    |                                     |        |         |                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                      |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                               | Indikator                                                                                                 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                           | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                     | 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                                             |            |
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner                                             | 1.Pesentase unit usaha produk hewan yang dibina                                                           | 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                 |            |
|    |                                     |        |         |         | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                         | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                        | 3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                                           |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                  | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                              | 3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                                 |            |
|    |                                     |        |         |         | Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi                                      | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi             | 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                                                                                         |            |
|    |                                     |        |         |         | Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM                     | 3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat                                                              | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan | 3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan                                                                                            |            |
|    |                                     |        |         |         | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan                                                                | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara penanganan kesmavet yang baik          | 3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                                    |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                        | Output                                                                                         | Indikator                                                                                                               | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                     | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |                                                                | Meningkatnya penerapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan                                  | Persentase pengawasan persyaratan teknis kesrawan                                                                       | 3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                                    |            |
|    |                                     |        |         |                                                                | Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha                          | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan                                                    | 3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha                                       |            |
|    |                                     |        |         | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian |                                                                                                | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian                                                         | 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                               |            |
|    |                                     |        |         |                                                                |                                                                                                | Persentase Penanganan Bencana Pertanian                                                                                 |                                                                                                                   |            |
|    |                                     |        |         |                                                                | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                                 | Luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang tertangani sesuai prosedur                                    | 3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                   |            |
|    |                                     |        |         |                                                                | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |            |
|    |                                     |        |         |                                                                | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan        | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                 | 3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          |            |
|    |                                     |        |         | Meningkatnya nilai produksi hasil pertanian dan perikanan      |                                                                                                | Nilai produksi hasil pertanian prioritas                                                                                |                                                                                                                   |            |
|    |                                     |        |         | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian  |                                                                                                | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan                                                                        | 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                       |            |
|    |                                     |        |         |                                                                |                                                                                                | Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan                                                                       |                                                                                                                   |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                                                               | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya Usaha Pertanian yang memenuhi rekomendasi teknis                                                                                                                          | Persentase produk pertanian yang memenuhi rekomendasi teknis                                                                                                                            | 3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                         |            |
|    |                                     |        |         |         | Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian                                                                                                                     | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                                                                                     | 3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                                                                   |            |
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya pengawasan izin usaha produksi bibit, pakan dan fasilitas peternakan lainnya                                                                                              | Persentase produk benih/bibit/pakan/fasilitas pemeliharaan hewan/rumah potong hewan yang memenuhi rekomendasi teknis                                                                    | 3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan                                               |            |
|    |                                     |        |         |         | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                                                                                                               | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi                                                                                                                    | 3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                                                                                                               |            |
|    |                                     |        |         |         | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                                                                                                                  | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi                                                                                                                                       | 3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                                                                                                                  |            |
|    |                                     |        |         |         | Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan | Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi | 3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan |            |
|    |                                     |        |         |         | Meningkatnya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang terbit                                                                                                | Persentase usaha pengecer obat hewan yang memenuhi rekomendasi teknis                                                                                                                   | 3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                                                                                             |            |

| No | NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                                                    | Output                                                                                       | Indikator                                                                                        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                             | Keterangan |
|----|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                     |        |         |                                                                                            | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                       | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi                                               | 3.27.06.2.03.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan |            |
|    |                                     |        |         | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan pmbinaan kelembagaan usaha tani   |                                                                                              | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan                                              | 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                    |            |
|    |                                     |        |         |                                                                                            |                                                                                              | Persentase Kelembagaan yang Dibentuk dan Beroperasi Koperasi Tani                                |                                                                           |            |
|    |                                     |        |         | Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian                                                       |                                                                                              | Persentase petani/kelompok tani/ikan yang menerapkan teknologi pertanian                         | 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                           |            |
|    |                                     |        |         |                                                                                            |                                                                                              | Persentase tenaga penyuluh pertanian yang aktif melakukan pendampingan                           |                                                                           |            |
|    |                                     |        |         | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |                                                                           |            |
|    |                                     |        |         | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa              | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya               | 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa              |                                                                           |            |
|    |                                     |        |         | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                             | 3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian         |                                                                           |            |
|    |                                     |        |         | Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian                                     | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                        | 3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                      |                                                                           |            |

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output          | Indikator Outcome / Output                                                 | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                           | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                  | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Satuan                          | 2026  |                | 2027  |                | 2028  |                | 2029  |                | 2030  |                | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                             | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6             | 7                               | 8     | 9              | 10    | 11             | 12    | 13             | 14    | 15             | 16    | 17             | 18                    | 19               | 20   |
|    | Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau | Indeks Ketahanan Pangan (IKP)                                              | Suatu sistem penilaian yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.                                   | Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (zona hijau menandakan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik). IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. | 80.80         | Angka                           | 81.56 |                | 82.31 |                | 83.06 |                | 84.81 |                | 84.56 |                | 84.56                 |                  |      |
|    | Tercukupinya Konsumsi Pangan Masyarakat                                       | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. | Presentase penduduk yang mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan energinya. Pengkatagorian persentase PoU dibagi dalam 5 status yaitu sangat rendah bila PoU <2,5%, rendah nilai PoU 2,5% sd 4%, sedang nilai PoU 5%-19%, tinggi nilai PoU 20%-34% dan sangat tinggi nilai PoU > 35%.                                                                                         | 5.42          | Persen                          | 5.28  |                | 5.08  |                | 4.88  |                | 4.68  |                | 4.48  |                | 4.48                  |                  |      |
|    | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |       | 578.555.400,00 |       | 516.000.000,00 |       | 557.000.000,00 |       | 557.000.000,00 |       | 567.700.000,00 |                       | 2.776.255,40     |      |
|    | 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                 |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                  |      |
|    | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat                    | Skor Pola Pangan Harapan                                                   | Susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan                                                                                                                                                                            | Pembobotan kelompok pangan utama berdasarkan sumbangan energinya terhadap                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88.87         | Angka                           | 89.13 | 403.882.300,00 | 89.26 | 381.000.000,00 | 89.39 | 382.000.000,00 | 89.52 | 382.000.000,00 | 89.74 | 392.700.000,00 | 89,74                 | 1.941.582.300,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                                      | Indikator Outcome / Output                                        | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                  | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |                |      |                |       |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------|------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |               | Satuan                          | 2026  |                | 2027 |                | 2028  |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |               |                                 | K     | Rp             | K    | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                      | 6             | 7                               | 8     | 9              | 10   | 11             | 12    | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                   | energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. PPH                                                                                                                        | energi total sesuai dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 (kkal/kap/hari) dan komposisi ideal bahan makanan. Nilai maksimum Skor PPH = 100 |               |                                 |       |                |      |                |       |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | 2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |               |                                 |       |                |      |                |       |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terjaganya pemenuhan bahan pangan                                                                                                                                         | Persentase pemenuhan kebutuhan bahan pangan                       | Perbandingan jml. Pemenuhan kebutuhan pangan keseluruhan dalam ton/tahun dengan jml prognosa kebutuhan bahan pangan dalam ton lalu dikalikan 100%. Bahan Pangan meliputi minimal terdiri dari 11 bahan pokok yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe kecil, cabe besar, telur ayam, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng. | jml. Pemenuhan kebutuhan bahan pangan<br>----- x 100%<br>jml prognosa kebutuhan bahan pangan                                                           | 112,5         | Persen                          | 102,5 | 127.346.200,00 | 105  | 114.000.000,00 | 107,5 | 115.000.000,00 | 110  | 115.000.000,00 | 112  | 125.700.000,00 | 112                   | 597.046.200,00 |      |
|    | 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |               |                                 |       |                |      |                |       |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan                                                                                                              | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan | Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau kegiatan distribusi pangan pokok dan tertentu                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan                                                                            | 1             | Laporan                         | 1     | 56.399.600,00  | 1    | 25.000.000,00  | 1     | 25.000.000,00  | 1    | 25.000.000,00  | 1    | 32.500.000,00  | 5                     | 163.899,600,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                      | Indikator Outcome / Output                                                                                 | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formulasi Perhitungan                                                                                      | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                          | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    | Pokok dan Pangan Lainnya                                                                                  | Pokok dan Pangan Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pangan Lainnya dalam 1 tahun                                                                               |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                       | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                       | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga merupakan kegiatan yang difokuskan dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui pemenuhan konsumsi pangan mulai dari tingkat individu antara lain melalui kegiatan rumah pangan B2SA, fasilitasi pelaku usaha pengolah pangan lokal, promosi dan edukasi konsumsi pangan B2SA serta kegiatan sejenis yang mendukung.                                    | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dalam 1 tahun                         | 0             | Keluarga                        | 21   | 30.000.000,00 | 21   | 50.000.000,00 | 21   | 50.000.000,00 | 21   | 50.000.000,00 | 21   | 50.000.000,00 | 105                   | 230.000.000,00 |      |
|    | 2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis                                   | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | Koordinasi, sinkronisasi pemantauan situasi stok, pasokan dan harga pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional sesuai dengan Perpres 66/2021 dilakukan dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/ penggilingan/pedagang/asosiasi/distributor dan pelaku usaha pangan lainnya. Pemantauan pasokan pangan dari jumlah stok di produsen/ penggilingan/pedagang/distributor dan pelaku usaha pangan lainnya, | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 1             | Laporan                         | 1    | 33.446.600,00 | 1    | 31.000.000,00 | 1    | 32.000.000,00 | 1    | 32.000.000,00 | 1    | 35.000.000,00 | 5                     | 163.446.600,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output       | Indikator Outcome / Output           | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formulasi Perhitungan                                                                                                     | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |                |       |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |                | 2028  |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                          | 3                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                         | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11             | 12    | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                            |                                      | sedangkan pemantauan harga pangan dilakukan di tingkat produsen dan konsumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |               |                                 |      |               |      |                |       |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |                                 |      |               |      |                |       |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)                                     | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | Penyusunan Neraca Bahan Makanan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi berupa tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah provinsi kab/kota dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hari), protein (gram/hari), lemak (gram/hari).<br><br>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan yang dihasilkan kegiatan Penyusunan NBM akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan. | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dalam 1 tahun                                                                        | 1             | Dokumen                         | 1    | 7.500.000,00  | 1    | 8.000.000,00   | 1     | 8.000.000,00   | 1    | 8.000.000,00   | 1    | 8.200.000,00   | 5                     | 39.700.000,00  |      |
|    | 2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |               |                                 |      |               |      |                |       |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya penyediaan cadangan pangan daerah                             | Persentase jumlah cadangan pangan    | Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100% Target Jumlah Cadangan Pangan berdasarkan Perbadan 15/2023) | Persen        | 0                               | 8,66 | 99.999.800,00 | 9,62 | 100.000.000,00 | 10,56 | 100.000.000,00 | 11,5 | 100.000.000,00 | 12   | 100.000.000,00 | 12                    | 499.999.800,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                            | Indikator Outcome / Output                       | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                        | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                              | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |                |      |                |       |                |       |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |               | Satuan                          | 2026  |                | 2027 |                | 2028  |                | 2029  |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |               |                                 | K     | Rp             | K    | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                               | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                  | 6             | 7                               | 8     | 9              | 10   | 11             | 12    | 13             | 14    | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                                 |                                                  | pangan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama dalam situasi krisis atau bencana.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |               |                                 |       |                |      |                |       |                |       |                |      |                |                       |                |      |
|    | 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |               |                                 |       |                |      |                |       |                |       |                |      |                |                       |                |      |
|    | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan jumlah dan jenis pangan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota terkait Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun                                                                                                     | 0             | Ton                             | 6     | 99.999.800,00  | 6    | 100.000.000,00 | 6     | 100.000.000,00 | 6     | 100.000.000,00 | 6    | 100.000.000,00 | 30                    | 499.999.800,00 |      |
|    | 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |               |                                 |       |                |      |                |       |                |       |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya konsumsi pangan selain beras/terigu                                                                | Persentase konsumsi pangan selain beras/terigu   | Perbandingan jumlah konsumsi bahan pangan selain beras/terigu dengan jumlah konsumsi pangan keseluruhan lalu dikalikan 100%. Bahan pangan selain beras/terigu meliputi : umbi umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah.                       | Jml. Konsumsi pangan selain beras terigu (gr/kapita)<br>----- x 100%<br>jml. Konsumsi pangan keseluruhan (gr/kapita)<br>(Diambil dari data survei konsumsi pangan) | 51,15         | Persen                          | 51,39 | 176.536.300,00 | 51,9 | 167.000.000,00 | 52,42 | 167.000.000,00 | 52,92 | 167.000.000,00 | 53   | 167.000.000,00 | 53                    | 844.536.300,00 |      |
|    | 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |               |                                 |       |                |      |                |       |                |       |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat                                                                  | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat          | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam                                                                                                                      | 4             | Laporan                         | 2     | 61.536.400,00  | 2    | 62.000.000,00  | 2     | 62.000.000,00  | 2     | 62.000.000,00  | 2    | 62.000.000,00  | 10                    | 309.536.400,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                  | Indikator Outcome / Output                                                               | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                               | Formulasi Perhitungan                                                                                  | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                     | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                      | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    | dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                     | dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                        | Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan Desa Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Rumah Pangan B2SA dan Fasilitasi Peralatan pengolahan Pangan Lokal. | Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dalam 1 tahun                              |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Target Pencapaian Konsumsi per Kapita per Tahun. Tersusunnya direktori perkembangan konsumsi pangan                                                                                            | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun dalam 1 tahun | 1             | Laporan                         | 1    | 75.000.000,00  | 1    | 70.000.000,00  | 1    | 70.000.000,00  | 1    | 70.000.000,00  | 1    | 70.000.000,00  | 5                     | 355.000.000,00 |      |
|    | 2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                     | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               | Promosi penganekaragaman pangan dilakukan melalui berbagai kegiatan (gerakan, sosialisasi, kampanye) dan media baik elektronik dan cetak.                                                                                          | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dalam 1 tahun               | 1             | Dokumen                         | 1    | 39.999.900,00  | 1    | 35.000.000,00  | 1    | 35.000.000,00  | 1    | 35.000.000,00  | 1    | 35.000.000,00  | 5                     | 179.999.900,00 |      |
|    | 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya penanganan kerawanan pangan                                                              | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                                    | Rasio jumlah kelurahan yang berada dalam kategori rentan terhadap total kelurahan yang masuk dalam semua kategori, berdasarkan data FSVA.                                                                                          | Jumlah kelurahan rentan rawan pangan ----- x 100%<br>Jumlah total kelurahan di kota                    | 1             | Persen                          | 1    | 154.999.600,00 | 1    | 115.000.000,00 | 0.9  | 155.000.000,00 | 0.9  | 155.000.000,00 | 0.8  | 155.000.000,00 | 0,8                   | 734.999.600,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output   | Indikator Outcome / Output                                               | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                      | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                          | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    | 2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya penanganan kelarga rentan rawan pangan                    | Persentase keluarga rentan rawan pangan mendapatkan bantuan bahan pangan | Perbandingan Jml. keluarga rentan rawan pangan yang mendapatkan bantuan bahan pangan dengan jml. keluarga rentan rawan pangan keseluruhan lalu dikalikan 100%. Keluarga rentan rawan pangan adalah keluarga miskin dan yg memiliki balita gizi kurang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jml. keluarga rentan rawan pangan yang mendapatkan bantuan bahan pangan (keluarga miskin dan yg memiliki balita gizi kurang) ----- x 100%<br>jml. keluarga rentan rawan pangan keseluruhan | 0             | Persen                          | 4    | 154.999.600,00 | 5    | 115.000.000,00 | 6    | 155.000.000,00 | 7    | 155.000.000,00 | 8    | 155.000.000,00 | 8                     | 734.999.600,00 |      |
|    | 2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                   | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi                            | Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan atau hasil analisis kewaspadaan pangan dan gizi atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) atau Kesiapsiagaan Krisis Pangan atau analisis kerawanan pangan lainnya ditingkat kabupaten/kota. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain pemberian paket bantuan pangan, penyelamatan pangan, kegiatan edukasi dan pemberian makanan bergizi untuk siswa, dan | Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam 1 tahun                                                                                                                                | 2             | Dokumen                         | 2    | 69.999.600,00  | 2    | 50.000.000,00  | 2    | 70.000.000,00  | 2    | 70.000.000,00  | 2    | 70.000.000,00  | 10                    | 329.999.600,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                   | Indikator Outcome / Output                                                 | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Formulasi Perhitungan                                                                                                                               | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                      | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                   | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                        |                                                                            | intervensi lainnya kepada masyarakat untuk pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | 2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                    | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota             | Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, dilihat dari aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Ruang lingkup analisis menggunakan data level kecamatan                                                                                        | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota dalam 1 tahun                                                                        | 1             | Dokumen                         | 1    | 85.000.000,00 | 1    | 65.000.000,00 | 1    | 85.000.000,00 | 1    | 85.000.000,00 | 1    | 85.000.000,00 | 5                     | 405.000.000,00 |      |
|    | 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan                                       | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan kemandirian pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilance) sebesar 40%. Apabila tidak ada pangajuan registrasi PSAT PDUK, maka untuk persentase pangan segar yang memenuhi | Jumlah sampel jenis pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan<br>----- x 100%<br>Jumlah sampel jenis pangan segar yang diuji | 100           | Persen                          | 100  | 19.673.500,00 | 100  | 20.000.000,00 | 100  | 20.000.000,00 | 100  | 20.000.000,00 | 100  | 20.000.000,00 | 100                   | 99.673.500,00  |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                      | Indikator Outcome / Output                                                   | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                               | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|---------------|------|
|    |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |               |      |
|    |                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp            |      |
| 1  | 2                                                                                         | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                   | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19            | 20   |
|    |                                                                                           |                                                                              | persyaratan dan mutu keamanan pangan hanya diambil dari hasil post market.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               |      |
|    | 2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               |      |
|    | Meningkanya pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemandan pangan               | Persentase pangan segar yang telah diuji                                     | Perbandingan jumlah jenis sampel pangan segar yang telah diuji dengan jumlah total kebutuhan jenis sampel pangan segar yang harus diuji lalu dikalikan 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jumlah jenis sampel pangan segar yang diuji ----- x 100%<br>jumlah total jenis sampel pangan segar yang harus diuji | 20            | Persen                          | 20   | 19.673.500,00 | 40   | 20.000.000,00 | 60   | 20.000.000,00 | 80   | 20.000.000,00 | 100  | 20.000.000,00 | 100                   | 99.673.500,00 |      |
|    | 2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               |      |
|    | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar di daerah berupa Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten/Kota sebagai pelaksana fasilitasi pelayanan pemberian izin keamanan pangan segar, Rekomendasi Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/Kota, dan pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan. Ruang lingkup penguatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan mencakup internal OKKPD kabupaten/kota dan/atau pelaku usaha mikro dan kecil. Kegiatan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan, penerapan | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun                          | 1             | Dokumen                         | 5    | 19.673.500,00 | 5    | 20.000.000,00 | 5    | 20.000.000,00 | 5    | 20.000.000,00 | 5    | 20.000.000,00 | 25                    | 99.673.500,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output | Indikator Outcome / Output                     | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                           | Baseline 2024   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                       |    | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------------|----|------|
|    |                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                 | Satuan                          | 2026            |    | 2027            |    | 2028            |    | 2029            |    | 2030            |    | Akhir Periode Renstra |    |      |
|    |                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                 |                                 | K               | Rp | K               | Rp | K               | Rp | K               | Rp | K               | Rp | K                     | Rp |      |
| 1  | 2                                                                    | 3                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                               | 6               | 7                               | 8               | 9  | 10              | 11 | 12              | 13 | 14              | 15 | 16              | 17 | 18                    | 19 | 20   |
|    |                                                                      |                                                | SOP kelembagaan, pelatihan/peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan keamanan dan mutu Pangan segar, dan/atau pembinaan pelaku usaha mikro dan kecil. Dokumen kelembagaan keamanan pangan segar diperlukan untuk mendukung penerapan sistem manajemen keamanan pangan pada proses fasilitasi pelayanan pemberian izin keamanan pangan segar asal tumbuhan, dan rekomendasi Keamanan Pangan Segar daerah Kabupaten/ Kota. |                                                                                                                 |                 |                                 |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                       |    |      |
|    | Meningkatnya Kesejahteraan Petani                                    | PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan        | Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.                                                                                                                                                                                                                                         | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar | 200.430.000.000 | Rupiah                          | 200.630.000.000 |    | 200.830.000.000 |    | 201.030.000.000 |    | 201.230.000.000 |    | 201.430.000.000 |    | 201.430.000.000       |    |      |
|    | Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan                  | Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Hias     | Produktivitas perikanan budidaya ikan hias dihitung dengan membandingkan jumlah produksi ikan hias dengan luas lahan atau volume tempat pemeliharaan. Secara sederhana, bisa dihitung sebagai jumlah ikan hias (ekor) per unit luas (m2) atau volume (m3).                                                                                                                                                                    | Jumlah ikan hias (ekor) / luas kolam yang diusahakan (m3)                                                       | 103.03          | ekor/meter 3                    | 103.57          |    | 103.78          |    | 104             |    | 104.21          |    | 104.41          |    | 104.41                |    |      |
|    |                                                                      | Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Konsumsi | Produktivitas perikanan budidaya ikan konsumsi dihitung dengan membandingkan jumlah produksi ikan konsumsi dalam kg dengan luas lahan atau volume tempat pemeliharaan. Secara sederhana, bisa                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah produksi ikan konsumsi (kg)/luas kolam yang diusahakan (m3)                                              | 4.96            | kg/meter3                       | 5.05            |    | 5.10            |    | 5.15            |    | 5.20            |    | 5.25            |    | 5.25                  |    |      |



| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                    | Indikator Outcome / Output                                                                                      | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulasi Perhitungan                                                                                                          | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                              | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                 | bidang budidaya perikanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | 3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Meningkatnya usaha budidaya perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis                                                                  | Persentase usaha budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis                                                | Perbandingan jumlah Usaha budidaya perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis dengan jumlah usaha budidaya perikanan keseluruhan lalu dikalikan 100% dan dihitung secara kumulatif. Standar teknis yang di maksud meliputi pemenuhan persyaratan perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.                                                                                 | jumlah Usaha budidaya perikanan yang memenuhi standar teknis<br><br>----- x 100<br>jumlah usaha budidaya perikanan keseluruhan | 13,16         | Persen                          | 15   | 25.372.000,00 | 17   | 32.000.000,00 | 18   | 32.000.000,00 | 20   | 33.000.000,00 | 22   | 33.000.000,00 | 22                    | 155.372.000,00 |      |
|    | 3.25.04.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota | Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran) | Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota dalam 1 tahun  | 23.68         | Rekomendasi                     | 25   | 25.372.000,00 | 25   | 32.000.000,00 | 25   | 32.000.000,00 | 25   | 33.000.000,00 | 25   | 33.000.000,00 | 125                   | 155.372.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                    | Indikator Outcome / Output                                                                                                             | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                       | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                         | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                             | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    | 3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan pengelolaan pembudidayaan ikan                                                                  | Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan pengelolaan pembudidayaan ikan                                                   | Perbandingan antara jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh Pembinaan (meliputi : pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis) dengan jumlah pembudidaya ikan keseluruhan lalu dikalikan 100% dan dihitung secara kumulatif. | Jumlah pembudiaya yang memperoleh pembinaan ----- x 100%<br>jumlah pembudidaya keseluruhan                                                                                    | 65,31         | Persen                          | 70   | 175.351.500,00 | 74   | 163.000.000,00 | 78   | 158.000.000,00 | 82   | 158.000.000,00 | 86   | 163.000.000,00 | 86                    | 817.351.500,00 |      |
|    | 3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                            | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                          | Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya                                                                                 | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas dalam 1 tahun                                                                                   | 2             | Kelompok                        | 2    | 89.192.900,00  | 2    | 75.000.000,00  | 2    | 70.000.000,00  | 2    | 70.000.000,00  | 2    | 75.000.000,00  | 10                    | 379.192.900,00 |      |
|    | 3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                  | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan | Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,                                                                | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam 1 tahun | 3             | Kelompok                        | 10   | 86.158.600,00  | 10   | 88.000.000,00  | 10   | 88.000.000,00  | 10   | 88.000.000,00  | 10   | 88.000.000,00  | 50                    | 438.158.600,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                      | Indikator Outcome / Output                                                              | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                  | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |               | Satuan                          | 2026  |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |               |                                 | K     | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                                                         | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                      | 6             | 7                               | 8     | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19               | 20   |
|    |                                                                                                           | Pendidikan dan Pelatihan                                                                | Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                |                                                                                                        |               |                                 |       |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | 3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |               |                                 |       |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Meningkatnya pemenuhan produksi perikanan budidaya                                                        | Persentase Pembudidaya Ikan yang Memenuhi Standart Mutu Budidaya Perikanan              | Perbandingan pembudidaya yang telah memenuhi standar mutu dengan jumlah pembudiaya keseluruhan lalu dikalikan 100% dan dihitung secara komulatif. Standar mutu budidaya perikanan meliputi CPIB, CBIB, SJMKHP | Jumlah pembudidaya yang memenuhi standar mutu budidaya ----- x 100 %<br>jumlah pembudidaya keseluruhan | 26,31         | Persen                          | 28,94 | 218.694.500,00 | 31   | 226.702.000,00 | 34   | 207.080.000,00 | 36   | 208.744.000,00 | 39   | 204.000.000,00 | 39                    | 1.065.220.500,00 |      |
|    | 3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |               |                                 |       |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                         | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun        | 1             | Dokumen                         | 1     | 24.563.000,00  | 1    | 28.000.000,00  | 1    | 28.000.000,00  | 1    | 28.000.000,00  | 1    | 28.000.000,00  | 5                     | 136.563.000,00   |      |
|    | 3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |               |                                 |       |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                | Prasarana Pembudidayaan Ikan yang didistribusikan kepada UPTD dan Masyarakat                                                                                                                                  | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun                 | 1             | Unit                            | 1     | 120.000.000,00 | 1    | 130.000.000,00 | 1    | 130.000.000,00 | 1    | 130.000.000,00 | 1    | 130.000.000,00 | 1                     | 640.000.000,00   |      |
|    | 3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                  | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Pembinaan dan Pemantauan Bidang Perikanan Budidaya                                                                                                                                                            | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat dalam 1 tahun  | 50            | unit                            | 50    | 74.131.500,00  | 50   | 68.702.000,00  | 50   | 49.080.000,00  | 50   | 50.744.000,00  | 50   | 46.000.000,00  | 250                   | 288.657.500,00   |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                     | Indikator Outcome / Output                                             | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                    | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |               | Satuan                          | 2026  |                | 2027  |                | 2028  |                | 2029  |                | 2030  |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                        | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6             | 7                               | 8     | 9              | 10    | 11             | 12    | 13             | 14    | 15             | 16    | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    | 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya kualitas produk perikanan                                                                   | Persentase Izin Usaha pengolahan hasil perikanan yang Diterbitkan      | Perbandingan jumlah izin usaha pengolahan hasil perikanan melalui aplikasi OSS dan melalui instansi teknis dengan jumlah izin usaha pengolahan hasil perikanan yang diajukan melalui aplikasi OSS dan instnasi teknis lalu dikalikan 100% dan dihitung dalam tahun berjalan. Izin usaha hasil perikanan meliputi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. | jumlah izin usaha pengolahan hasil perikanan melalui aplikasi OSS dan melalui instansi teknis terkait<br><br>----- x 100%<br>jumlah izin usaha pengolahan hasil perikanan yang diajukan melalui aplikasi OSS dan instansi teknis terkait | 0             | Persen                          | 100   | 260.500.000,00 | 100   | 176.900.000,00 | 100   | 177.100.000,00 | 100   | 177.300.000,00 | 100   | 177.500.000,00 | 100                   | 969.300.000,00 |      |
|    |                                                                                                          | Angka Konsumsi Ikan                                                    | Rata-rata konsumsi ikan per kapita dalam suatu populasi per tahun, biasanya diukur dalam kilogram per kapita per tahun. Angka ini mencerminkan seberapa banyak ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam suatu periode waktu tertentu.                                                                                                                             | Konsumsi ikan dalam rumah tangga + Konsumsi ikan di luar rumah tangga + Konsumsi ikan tidak tercatat<br><br>-----x 100%<br>Jumlah penduduk.                                                                                              | 18.84         | kg/kapita/tahun                 | 23.20 |                | 23.31 |                | 23.42 |                | 23.53 |                | 23.64 |                | 23,64                 |                |      |
|    | 3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                 |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya usaha pengolahan perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis                                 | Persentase usaha pengolahan perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis | Perbandingan jumlah Usaha pengolahan perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis dengan jumlah usaha hasil perikanan lalu dikalikan 100% dan dihitung secara komulatif. Standar teknis yang di maksud meliputi pemenuhan persyaratan perijinan NIB dan ijin edar sesuai dengan                                                                                         | jumlah Usaha pengolahan perikanan yang memenuhi rekomendasi teknis<br><br>--X 100%<br>jumlah usaha hasil perikanan                                                                                                                       | 100           | Persen                          | 100   | 83.667.750,00  | 100   | 81.200.000,00  | 100   | 81.500.000,00  | 100   | 81.700.000,00  | 100   | 81.700.000,00  | 100                   | 409.767.750,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                                     | Indikator Outcome / Output                                                                                  | Definisi Operasional                                                                                                                        | Formulasi Perhitungan                                                                                                     | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                           | 5                                                                                                                         | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | peraturan yang berlaku. Usaha hasil perikanan meliputi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan binaan dinas.                         |                                                                                                                           |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | 3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                  | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan             | Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pengolahan dan Pemasaran Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 tahun             | 0             | Rekomendasi                     | 1    | 33.667.750,00 | 1    | 33.200.000,00 | 1    | 33.500.000,00 | 1    | 33.700.000,00 | 1    | 33.700.000,00 | 5                     | 167.767.750,00 |      |
|    | 3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                         | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko | Data dan informasi usaha berdasarkan skala usaha pengolahan dan pemasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                 | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko dalam 1 tahun | 1             | Dokumen                         | 1    | 50.000.000,00 | 1    | 48.000.000,00 | 1    | 48.000.000,00 | 1    | 48.000.000,00 | 1    | 48.000.000,00 | 5                     | 242.000.000,00 |      |
|    | 3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Meningkatnya unit usaha hasil perikanan yang memiliki standar jaminan mutu                                                                                               | Persentase unit usaha hasil perikanan yang memiliki standar jaminan mutu                                    | Perbandingan jumlah Usaha pengolahan perikanan yangmemiliki standar mutu dengan jumlah usaha hasil perikanan lalu dikalikan                 | Perbandingan jumlah Usaha pengolahan perikanan yang memiliki standar mutu ----- x 100%                                    | 100           | Persen                          | 100  | 34.853.800,00 | 100  | 22.516.000,00 | 100  | 32.070.000,00 | 100  | 32.989.000,00 | 100  | 40.243.000,00 | 100                   | 162.671.800,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                              | Indikator Outcome / Output                                                                                                                                                                                                | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                     | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                   | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                 | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|-----------------|------|
|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                 |      |
|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp              |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19              | 20   |
|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | 100% dan dihitung secara kumulatif. Standarmutu yang dimaksud meliputi pemenuhan persyaratan mutu produk Halal, SKP SNI sesuai dengan perturan yang berlaku. Usaha hasil perikanan meliputi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan binaan dinas. | jumlah usaha hasil perikanan                                                                                                                                                                                                            |               |                                 |      |                |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                 |      |
|    | 3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |      |                |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                 |      |
|    | Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko       | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko | Pembinaan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diberikan terkait Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran sesuai Skala Usaha dan Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan       | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko dalam 1 tahun | 2             | unit usaha                      | 2    | 34.853.800,00  | 2    | 22.516.000,00 | 2    | 32.070.000,00 | 2    | 32.989.000,00 | 2    | 40.243.000,00 | 10                    | 162.671.800 ,00 |      |
|    | 3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                 |      |                |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                 |      |
|    | Meningkatnya pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi                                                                                                            | Persentase pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi                                                                                                                                                                      | Perbandingan pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dengan jumlah pelaku usaha perikanan dan dikalikan 100%. Fasilitasi pelaku                                                                                                                        | jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi<br>----- x 100%<br>jumlah pelaku usaha perikanan                                                                                                                                       | 100           | Persen                          | 100  | 141.978.450,00 | 100  | 73.184.000,00 | 100  | 63.530.000,00 | 100  | 62.611.000,00 | 100  | 55.557.000,00 | 100                   | 396.860.450,00  |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                           | Indikator Outcome / Output                                                                                  | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formulasi Perhitungan                                                                                                     | Baseline 2024  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                       |                | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                | Satuan                          | 2026           |                | 2027           |               | 2028           |               | 2029           |               | 2030           |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                |                                 | K              | Rp             | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K              | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                         | 6              | 7                               | 8              | 9              | 10             | 11            | 12             | 13            | 14             | 15            | 16             | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                                                |                                                                                                             | usaha perikanan meliputi keikutsertaan dalam promosi, pameran, pelatihan.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                |                                 |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                       |                |      |
|    | 3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                |                                 |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                       |                |      |
|    | Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi dalam 1 tahun | 20             | pelaku usaha                    | 20             | 141.978.450,00 | 20             | 73.184.000,00 | 20             | 63.530.000,00 | 20             | 62.611.000,00 | 20             | 55.557.000,00 | 100                   | 396.860.450,00 |      |
|    | Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan                                                                            | Produktivitas Daging                                                                                        | Ukuran kemampuan produksi daging (karkas + edible offal) tiap ekor ternak                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah rata-rata produksi daging (karkas + edible offal)/ ekor ternak (kg/ekor)                                           | 45.73          | kg/ekor                         | 45.73          |                | 45.73          |               | 45.73          |               | 45.73          |               | 45.73          |               | 45.73                 |                |      |
|    |                                                                                                                                | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                                                                | Produktivitas pertanian adalah ukuran hasil atau output yang dihasilkan oleh tanaman pangan/horti utama dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam satuan berat per hektar. Tanaman pangan/horti utama meliputi : padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, sawi, cabe keriting, cabe rawit, terung, kangkung, belimbing. | Jumlah produksi (kwintal) / luas panen (ha)                                                                               | 4.83           | ton/ha                          | 5.23           |                | 5.33           |               | 5.43           |               | 5.53           |               | 5.63           |               | 5.63                  |                |      |
|    |                                                                                                                                | produktivitas Susu                                                                                          | Ukuran kemampuan produksi susu tiap ekor ternak betina produktif selama 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah rata-rata produksi susu selama 1 tahun per ekor ternak (kg/ekor/tahun)                                             | 1739,95        | kg/ekor/ta hun                  | 1739,95        |                | 1739,95        |               | 1739,95        |               | 1739,95        |               | 1739,95        |               | 1739,95               |                |      |
|    |                                                                                                                                | Produktivitas Telur                                                                                         | Ukuran kemampuan produksi telur tiap ekor ternak betina produktif selama 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah rata-rata produksi telur selama 1 tahun per ekor ternak (kg/ekor/tahun)                                            | 6.49           | kg/ekor/ta hun                  | 6.49           |                | 6.49           |               | 6.49           |               | 6.49           |               | 6.49           |               | 6.49                  |                |      |
|    | Meningkatnya nilai produksi hasil pertanian dan perikanan                                                                      | Nilai produksi hasil pertanian prioritas                                                                    | Nilai produksi hasil pertanian adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pertanian komoditas tanaman                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.)                                                     | 66.059.050.000 | Rupiah                          | 85.113.099.825 |                | 85.660.306.963 |               | 86.227.534.264 |               | 86.695.603.865 |               | 87.140.463.755 |               | 87.140.463.755        |                |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                          | Indikator Outcome / Output                                                                  | Definisi Operasional                                                                                                                                                                   | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                               | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |                  |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |                       |                   | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------|
|    |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |               | Satuan                          | 2026              |                  | 2027 |                   | 2028 |                   | 2029 |                   | 2030 |                   | Akhir Periode Renstra |                   |      |
|    |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |               |                                 | K                 | Rp               | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K                     | Rp                |      |
| 1  | 2                                                                                             | 3                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                   | 6             | 7                               | 8                 | 9                | 10   | 11                | 12   | 13                | 14   | 15                | 16   | 17                | 18                    | 19                | 20   |
|    |                                                                                               |                                                                                             | pangan dan hortikultura yang dihitung komulatif dalam satu tahun.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                   |                  |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |                       |                   |      |
|    | Meningkatnya IKM Perangkat Daerah                                                             | Nilai IKM Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                                                                                                                        | Nilai IKM dalam Sukma-e Jatim.                                                                                                                                                      | 87.70         | Indeks                          | 88.5              |                  | 89   |                   | 89.5 |                   | 90   |                   | 90.5 |                   | 90.5                  |                   |      |
|    | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |               |                                 | 13.160.042,155,00 |                  |      | 12.398.422,392,00 |      | 12.167.774,742,00 |      | 11.975.161,630,00 |      | 12.801.412,202,00 |                       | 62.502.813,1      |      |
|    | 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                   |                  |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |                       |                   |      |
|    | Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah                                     | Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku              | Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan                 | Jumlah fasilitas layanan kedinasan sesuai standar ketentuan yang berlaku ----- x 100%<br>jumlah fasilitas layanan kedinasan yang ada                                                | 100           | Persen                          | 100               | 9.223.910.322,00 | 100  | 9.243.144.586,00  | 100  | 9.014.087.829,00  | 100  | 8.983.071.085,00  | 100  | 9.325.561.907,00  | 100                   | 45.789.775.729,00 |      |
|    | 3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                   |                  |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |                       |                   |      |
|    | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar | Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100%<br>Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun | 100           | Persen                          | 100               | 93.935.400,00    | 100  | 96.700.000,00     | 100  | 102.100.000,00    | 100  | 108.500.000,00    | 100  | 115.200.000,00    | 100                   | 516.435.400,00    |      |
|    | 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |               |                                 |                   |                  |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |                       |                   |      |
|    | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 | Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan                                                                                                       | 5             | Dokumen                         | 2                 | 3.448.100,00     | 3    | 3.700.000,00      | 2    | 3.900.000,00      | 2    | 4.100.000,00      | 3    | 4.200.000,00      | 12                    | 19.348.100,00     |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                      | Indikator Outcome / Output                                                                                                                          | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                   | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                   | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                       | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | 3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan                                                                                                    | 4             | Laporan                         | 17   | 67.228.300,00 | 17   | 69.000.000,00 | 17   | 70.000.000,00 | 17   | 72.000.000,00 | 17   | 70.000.000,00 | 85                    | 348.228.300,00 |      |
|    | 3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                  | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                 | Data statistik sektoral merupakan hasil pendataan statistik sektoral yang digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai SOP pengumpulan data statistik sektoral yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani statistik | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah pada tahun berjalan                                                 | 0             | Data                            | 2    | 365.400,00    | 2    | 500.000,00    | 2    | 700.000,00    | 2    | 900.000,00    | 2    | 1.000.000,00  | 10                    | 3.465.400,00   |      |
|    | 3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan                          | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan | 0             | Berita acara                    | 1    | 13.300.000,00 | 1    | 12.500.000,00 | 1    | 15.000.000,00 | 1    | 17.500.000,00 | 1    | 25.000.000,00 | 5                     | 83.300.000,00  |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                       | Indikator Outcome / Output                                                                                                                                       | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                           | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |                       |               | Ket. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-----------------------|---------------|------|
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |               | Satuan                          | 2026 |              | 2027 |              | 2028 |              | 2029 |              | 2030 |              | Akhir Periode Renstra |               |      |
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |               |                                 | K    | Rp           | K    | Rp           | K    | Rp           | K    | Rp           | K    | Rp           | K                     | Rp            |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                               | 6             | 7                               | 8    | 9            | 10   | 11           | 12   | 13           | 14   | 15           | 16   | 17           | 18                    | 19            | 20   |
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | pemangku kepentingan terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |               |                                 |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |                       |               |      |
|    | 3.27.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |               |                                 |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |                       |               |      |
|    | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun                                                                                    | Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaan gender, profil perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan                                                                                    | 0             | Dokumen                         | 13   | 4.693.600,00 | 13   | 5.500.000,00 | 13   | 6.500.000,00 | 13   | 7.500.000,00 | 13   | 8.000.000,00 | 65                    | 32.193.600,00 |      |
|    | 3.27.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |               |                                 |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |                       |               |      |
|    | Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan         | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan       | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan | 0             | Berita acara                    | 1    | 4.900.000,00 | 1    | 5.500.000,00 | 1    | 6.000.000,00 | 1    | 6.500.000,00 | 1    | 7.000.000,00 | 5                     | 29.900.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                     | Indikator Outcome / Output                                                                                                                           | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                           | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                     | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                   | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|-----------------------|-------------------|------|
|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |               | Satuan                          | 2026 |                  | 2027 |                  | 2028 |                  | 2029 |                  | 2030 |                  | Akhir Periode Renstra |                   |      |
|    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |               |                                 | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K                     | Rp                |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                         | 6             | 7                               | 8    | 9                | 10   | 11               | 12   | 13               | 14   | 15               | 16   | 17               | 18                    | 19                | 20   |
|    | 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                   |      |
|    | Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah                                                                                            | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar                                                                           | Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan                                                                                      | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar<br><br>----- x 100 %<br><br>Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani | 100           | Persen                          | 100  | 6.705.338.042,00 | 100  | 6.788.340.180,00 | 100  | 6.898.917.531,00 | 100  | 6.800.733.907,00 | 100  | 7.006.752.661,00 | 100                   | 34.200.082.321,00 |      |
|    | 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                   |      |
|    | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan                                                                                                     | 672           | Orang/bulan                     | 576  | 6.702.424.042,00 | 576  | 6.785.140.180,00 | 576  | 6.895.417.531,00 | 576  | 6.797.033.907,00 | 576  | 7.002.852.661,00 | 2880                  | 34.182.868.321,00 |      |
|    | 3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                   |      |
|    | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan keuangan memuat laporan keuangan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan                                                                      | 5             | Laporan                         | 5    | 2.914.000,00     | 5    | 3.200.000,00     | 5    | 3.500.000,00     | 5    | 3.700.000,00     | 5    | 3.900.000,00     | 25                    | 17.214.000,00     |      |
|    | 3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                   |      |
|    | Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang                                                                                                               | Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah                                                                                                | Pelayanan administrasi barang milik daerah                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah                                                                                                                             | 100           | Perse n                         | 100  | 263.000,00       | 100  | 350.000,00       | 100  | 600.000,00       | 100  | 850.000,00       | 100  | 1.000.000,00     | 100                   | 3.063.000,00      |      |



| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output       | Indikator Outcome / Output                                                         | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                               | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                          | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                   | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19               | 20   |
|    | Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah           | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar | Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP                                                                                                                                      | Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100%<br><br>jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani | 100           | Persen                          | 100  | 81.634.950,00  | 100  | 86.000.000,00  | 100  | 88.000.000,00  | 100  | 90.000.000,00  | 100  | 92.000.000,00  | 100                   | 437.634.950,00   |      |
|    | 3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan seragam/kostum untuk mendukung event daerah                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan                                                                                                  | 2             | Paket                           | 2    | 14.564.000,00  | 2    | 15.000.000,00  | 2    | 15.000.000,00  | 2    | 15.000.000,00  | 2    | 15.000.000,00  | 10                    | 74.564.000,00    |      |
|    | 3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASN (PNS dan P3K) yang mengikuti pembinaan kepegawaian dan event daerah                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan                                                                                            | 98            | orang                           | 342  | 67.070.950,00  | 342  | 71.000.000,00  | 342  | 73.000.000,00  | 342  | 75.000.000,00  | 342  | 77.000.000,00  | 1710                  | 363.070.950,00   |      |
|    | 3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah                 | Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar          | Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar memuat ketersediaan komponen instalansi listrik, peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, arsip dinamis, dan pelaksanaan SPBE yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar ----- x 100%<br><br>Jumlah jenis administrasi umum yang harus disediakan                               | 100           | Persen                          | 100  | 349.130.290,00 | 100  | 283.978.000,00 | 100  | 237.340.000,00 | 100  | 238.890.000,00 | 100  | 241.250.000,00 | 100                   | 1.350.588.290,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                 | Indikator Outcome / Output                                                         | Definisi Operasional                                                                                                                                                                    | Formulasi Perhitungan                                                                                  | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                      | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    | 3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan mencakup komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan | 1             | Paket                           | 3    | 21.598.790,00 | 3    | 13.660.000,00 | 1    | 5.000.000,00  | 1    | 5.000.000,00  | 1    | 5.000.000,00  | 9                     | 50.258.790,00  |      |
|    | 3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan mencakup peralatan dan perlengkapan kantor kategori barang pakai habis/non modal yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan                     | 2             | Paket                           | 2    | 41.010.000,00 | 2    | 43.558.000,00 | 0    | 0             | 0    | 0             | 0    | 0             | 4                     | 84.568.000,00  |      |
|    | 3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran                                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan                                | 3             | Paket                           | 5    | 20.046.500,00 | 5    | 22.000.000,00 | 5    | 24.000.000,00 | 5    | 26.000.000,00 | 5    | 27.000.000,00 | 25                    | 119.046.500,00 |      |
|    | 3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan                                 | 4             | Paket                           | 4    | 28.600.000,00 | 4    | 30.000.000,00 | 4    | 30.000.000,00 | 4    | 31.000.000,00 | 4    | 31.000.000,00 | 20                    | 150.600.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output         | Indikator Outcome / Output                                                   | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                       | Formulasi Perhitungan                                                                            | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                            | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    | 3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran                                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan                  | 1             | Paket                           | 1    | 17.750.000,00  | 1    | 19.000.000,00  | 1    | 21.000.000,00  | 1    | 20.000.000,00  | 1    | 20.000.000,00  | 5                     | 97.750.000,00  |      |
|    | 3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran                          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan | 72            | Dokumen                         | 72   | 15.240.000,00  | 72   | 15.760.000,00  | 72   | 16.340.000,00  | 72   | 16.890.000,00  | 72   | 17.250.000,00  | 360                   | 81.480.000,00  |      |
|    | 3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan          | 56            | Laporan                         | 56   | 190.350.000,00 | 56   | 125.000.000,00 | 56   | 125.000.000,00 | 56   | 125.000.000,00 | 56   | 125.000.000,00 | 280                   | 690.350.000,00 |      |
|    | 3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib pengelolaan kearsipan dinamis pada perangkat daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan                         | 1             | Dokumen                         | 1    | 14.535.000,00  | 1    | 15.000.000,00  | 1    | 16.000.000,00  | 1    | 15.000.000,00  | 1    | 16.000.000,00  | 5                     | 76.535.000,00  |      |



[illegible]

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                 | Indikator Outcome / Output                                                             | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                            | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                             | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |               | Satuan                          | 2026 |                  | 2027 |                  | 2028 |                  | 2029 |                  | 2030 |                  | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |               |                                 | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                 | 6             | 7                               | 8    | 9                | 10   | 11               | 12   | 13               | 14   | 15               | 16   | 17               | 18                    | 19               | 20   |
|    | Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran                            | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar                             | Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar memuat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan, serta penyediaan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP | Jml jenis penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar<br><br>----- x 100 %<br>Jml jenis penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan | 100           | Persen                          | 100  | 1.572.866.340,00 | 100  | 1.574.776.406,00 | 100  | 1.532.630.298,00 | 100  | 1.583.097.178,00 | 100  | 1.482.859.246,00 | 100                   | 7.746.229.468,00 |      |
|    | 3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  |      |
|    | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memuat pembayaran listrik, air dan telepon yang menunjang kegiatan perkantoran                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan                                                        | 216           | Laporan                         | 216  | 196.113.840,00   | 216  | 200.000.000,00   | 216  | 200.000.000,00   | 216  | 200.000.000,00   | 216  | 209.000.000,00   | 1080                  | 1.005.113.840,00 |      |
|    | 3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  |      |
|    | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan                                                                          | 13            | Laporan                         | 13   | 1.376.752.500,00 | 13   | 1.374.776.406,00 | 13   | 1.332.630.298,00 | 13   | 1.383.097.178,00 | 13   | 1.273.859.246,00 | 65                    | 6.741.115.628,00 |      |
|    | 3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  |      |
|    | Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan                       | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan                       | Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan                                                                                                        | Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan<br><br>----- x 100%<br>jumlah jenis BMD yang harus dipelihara                                                  | 100           | Persen                          | 100  | 306.626.900,00   | 100  | 221.000.000,00   | 100  | 144.000.000,00   | 100  | 150.000.000,00   | 100  | 224.000.000,00   | 100                   | 1.045.626.900,00 |      |

[illegible]

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                   | Indikator Outcome / Output                                                                      | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                  | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                                                      | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                      | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19               | 20   |
|    | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                              | Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ                                                                                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan                                                                                 | 32            | Unit                            | 32   | 35.266.000,00  | 32   | 35.000.000,00  | 32   | 36.000.000,00  | 32   | 37.000.000,00  | 32   | 38.000.000,00  | 160                   | 181.266.000,00   |      |
|    | 3.27.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                           | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                        | Aset tak berwujud yang dipelihara adalah aplikasi/website yang dipelihara sesuai RKPBMĐ                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun berjalan                                                                                           | 0             | Unit                            | 1    | 10.000.000,00  | 1    | 15.000.000,00  | 0    | ,              | 0    | ,              | 1    | 15.000.000,00  | 3                     | 40.000.000,00    |      |
|    | 3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/ direhabilitasi sesuai RKPBMĐ                                                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan                           | 0             | Unit                            | 28   | 160.316.900,00 | 10   | 70.000.000,00  | 5    | 40.000.000,00  | 5    | 40.000.000,00  | 15   | 100.000.000,00 | 63                    | 410.316.900,00   |      |
|    | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian                                                  | Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura                                                    | Perbandingan jumlah produksi tanaman hortikultura prioritas pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, lalu dikalikan 100%. Tanaman hortikultura prioritas adalah jenis tanaman hortikultura yang paling sering dan secara luas dibudidayakan yaitu cabe rawit, cabe besar, kangkung, sawi daging dan belimbing. | Produksi Holtikultura Prioritas Tahun ini - Produksi hortikultura Prioritas Tahun Kemarin -----x 100%<br>Produksi hortikultura Prioritas tahun kemarin | 0.1           | Persen                          | 0.8  | 308.270.400,00 | 0.8  | 298.201.000,00 | 0.8  | 285.121.000,00 | 0.8  | 286.693.000,00 | 0.8  | 287.693.000,00 | 0,8                   | 1.465.978.400,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                        | Indikator Outcome / Output                              | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                    | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                                             | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan          | Perbandingan jumlah produksi tanaman pangan utama pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, lalu dikalikan 100%. Tanaman pangan utama adalah jenis tanaman yang secara luas dibudidayakan dan menjadi sumber utama makanan pokok bagi sebagian besar penduduk yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi rambat dan kacang tanah. | Produksi Tanaman Pangan Utama Tahun ini - Produksi Tanaman Pangan Utama Tahun Kemarin<br>----- x 100%<br>Produksi Tanaman Pangan Utama Tahun Kemarin | -38.03        | Persen                          | 0.2  |                | 0.2  |                | 0.2  |                | 0.2  |                | 0.2  |                | 0,2                   |                |      |
|    |                                                                                                                             | Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan    | Perbandingan jumlah produksi hasil peternakan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, lalu dikalikan 100%. Hasil produksi peternakan meliputi daging, susu dan telur.                                                                                                                                                  | Produksi komoditas Peternakan Tahun ini - Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin<br>----- x 100%<br>Produksi komoditas Peternakan Tahun Kemarin | 4.19          | Persen                          | 3    |                | 3    |                | 3    |                | 3    |                | 3    |                | 3                     |                |      |
|    | 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian                                                                         | Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian       | Cakupan jumlah kelompok tani yang diawasi dalam penggunaan sarana pertanian yang meliputi benih, bibit, pupuk, obat-obatan pertanian dan alsintan dibandingkan dengan jumlah kelompok tani keseluruhan dikalikan 100%.                                                                                                      | jumlah kelompok tani tanaman pangan horti yang dimonev<br>----- x 100%<br>jumlah total kelompok pangan horti                                         | 100           | Persen                          | 100  | 217.157.800,00 | 100  | 188.913.000,00 | 100  | 183.535.000,00 | 100  | 179.625.000,00 | 100  | 175.300.000,00 | 100                   | 944.530.800,00 |      |
|    | 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                           | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                              | 2             | Laporan                         | 2    | 72.111.600,00  | 2    | 58.913.000,00  | 2    | 53.535.000,00  | 2    | 50.000.000,00  | 2    | 50.000.000,00  | 10                    | 284.559.600,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                | Indikator Outcome / Output                                | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                           | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                   | 3                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                               | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    | Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                              | Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi    | kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                           | Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dalam 1 tahun                                            |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                    | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dalam 1 tahun                                         | 1             | Laporan                         | 1    | 145.046.200,00 | 1    | 130.000.000,00 | 1    | 130.000.000,00 | 1    | 129.625.000,00 | 1    | 125.300.000,00 | 5                     | 659.971.200,00 |      |
|    | 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan                                                            | Persentase peternak yang dibina                           | Perbandingan peternak yang memperoleh pelatihan , pembinaan, bimtek dengan jumlah peternak keseluruhan lalu dikalikan 100% dan dihitung secara akumulatif. Peternak yang dimaksud meliputi seseorang yang berusaha dibidang budidaya ternak baik ternak besar, kecil maupun unggas.           | Jumlah peternak yang mengikuti pelatihan/ pembinaan / bimtek ----- x 100%<br>jumlah peternak secara keseluruhan | 45            | Persen                          | 50   | 47.586.800,00  | 55   | 59.087.000,00  | 60   | 63.250.000,00  | 65   | 65.745.000,00  | 70   | 69.080.000,00  | 70                    | 304.748.800,00 |      |



| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output            | Indikator Outcome / Output                                                         | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formulasi Perhitungan                                                                                                    | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |              |      |              |      |              |      |              |      |               |                       |               | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------|-----------------------|---------------|------|
|    |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |               | Satuan                          | 2026  |              | 2027 |              | 2028 |              | 2029 |              | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |               |      |
|    |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |               |                                 | K     | Rp           | K    | Rp           | K    | Rp           | K    | Rp           | K    | Rp            | K                     | Rp            |      |
| 1  | 2                                                                               | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                        | 6             | 7                               | 8     | 9            | 10   | 11           | 12   | 13           | 14   | 15           | 16   | 17            | 18                    | 19            | 20   |
|    | Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |               |                                 |       |              |      |              |      |              |      |              |      |               |                       |               |      |
|    | Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak       | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar dakam 1 tahun                         | 2             | Laporan                         | 2     | 2.836.000,00 | 2    | 7.854.000,00 | 2    | 8.240.000,00 | 2    | 9.067.000,00 | 2    | 10.430.000,00 | 10                    | 38.427.000,00 |      |
|    | 3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |               |                                 |       |              |      |              |      |              |      |              |      |               |                       |               |      |
|    | Meningkatnya pengawasan obat hewan di tingkat pengecer                          | Persentase Obat Hewan yang Sudah Teregister                                        | Perbandingan jenis obat hewan yang dijualbelikan di pengecer yang sudah teregister dengan jumlah jenis obat hewan yang diperjualbelikan dipengecer secara keseluruhan dikalikan 100% dan dihitung secara akumulatif. Pengecer yang dimaksud meliputi poultry shop, toko obat hewan dan klinik kesehatan hewan. Obat hewan yang teregistrasi adalah obat hewan yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang membuktikan bahwa obat tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat untuk digunakan pada hewan. | Jumlah jenis obat hewan yang teregister ----- x 100%<br>jumlah jenis obat hewan yang diperjualbelikan secara keseluruhan | 89,4          | Persen                          | 89,45 | 4.775.000,00 | 89,6 | 5.547.000,00 | 89,6 | 5.981.000,00 | 89,7 | 6.476.000,00 | 89,8 | 6.843.000,00  | 89,8                  | 29.622.000,00 |      |
|    | 3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |               |                                 |       |              |      |              |      |              |      |              |      |               |                       |               |      |
|    | Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan                             | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar              | Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan adalah proses kegiatan pengujian mutu untuk menilai khasiat dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar dalam 1 tahun                                      | 1             | Laporan                         | 1     | 4.775.000,00 | 1    | 5.547.000,00 | 1    | 5.981.000,00 | 1    | 6.476.000,00 | 1    | 6.843.000,00  | 5                     | 29.622.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                           | Indikator Outcome / Output                                         | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formulasi Perhitungan                                                                                     | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                                                                              | 3                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                         | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19               | 20   |
|    |                                                                                                                                |                                                                    | keamanan sediaan obat hewan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | 3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                        | Persentase benih/bibit yang tersedia                               | Perbandingan jumlah bibit ternak yang disediakan dengan jumlah kebutuhan lalu dikalikan 100%.                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah bibit ternak yang disediakan<br>----- x 100%<br>jumlah kebutuhan bibit ternak                      | 0             | Persen                          | 100  | 16.285.800,00  | 100  | 15.000.000,00  |      | ,              |      | ,              |      | ,              | 100                   | 31.285.800,00    |      |
|    | 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                                        | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Pengadaan bibit ternak yang dimaksud adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan bibit ternak yang bermutu dalam jumlah yang cukup berdasarkan perhitungan supply demand.<br><br>Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain dalam 1 tahun                          | 0             | ekor                            | 1    | 16.285.800,00  | 1    | 15.000.000,00  | 0    |                | 0    |                | 0    |                | 2                     | 31.285.800,00    |      |
|    | 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                                                                       | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B          | Perbandingan luas baku sawah yang masuk dalam LP2B dengan luas baku sawah keseluruhan lalu dikalikan 100%. Luas baku sawah yang masuk dalam LP2B                                                                                                                                                                            | Luas baku sawah calon LP2B atau yang telah ditetapkan LP2B<br>----- x 100%<br>luas baku sawah keseluruhan | 0             | Persen                          | 30   | 953.277.400,00 | 30   | 561.500.000,00 | 30   | 563.000.000,00 | 30   | 413.000.000,00 | 30   | 700.102.232,00 | 30                    | 3.190.879.632,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                  | Indikator Outcome / Output                                               | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formulasi Perhitungan                                                                     | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                         | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                       |                                                                          | merupakan luas sawah yang merupakan calon LP2B sesuai hasil kajian atau luas sawah yang sudah ditetapkan menjadi LP2B.                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    |                                                                                       | Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)       | Perbandingan jumlah penyembelihan hewan di RPH Dimoro yang memenuhi persyaratan ASUH dengan jumlah penyembelihan hewan di RPH Dimoro secara keseluruhan lalu dikalikan 100%. Penyembelihan hewan di RPH meliputi sapi, kambing, babi dan unggas. ASUH berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) | Jumlah penyembelian hewan RPH yang ASUH ----- x 100%<br>Jumlah penyembelihan hewan di RPH | 100           | Persen                          | 100  |               | 100  |               | 100  |               | 100  |               | 100  |               | 100                   |                |      |
|    | 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Menurunnya alih fungsi lahan pertanian                                                | Jumlah alih fungsi lahan pertanian                                       | Jumlah penurunan luas baku sawah akibat beralih fungsi menjadi peruntukan selain kegiatan budidaya pertanian                                                                                                                                                                                               | Jumlah alih fungsi lahan pertanian dalam satu tahun                                       | -15           | Ha                              | -15  | 22.390.000,00 | -15  | 11.500.000,00 | -15  | 13.000.000,00 | -15  | 13.000.000,00 | -15  | 58.000.000,00 | -75                   | 117.890.000,00 |      |
|    | 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi<br>b. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi<br>c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan                                   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dalam 1 tahun    | 1             | Laporan                         | 1    | 5.600.000,00  | 1    | 6.500.000,00  | 1    | 8.000.000,00  | 1    | 8.000.000,00  | 1    | 8.000.000,00  | 5                     | 36.100.000,00  |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                                                             | Indikator Outcome / Output                                                                                                                                   | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                       | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |              |      |              |      |              |      |               |                       |               | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------|-----------------------|---------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |              | 2028 |              | 2029 |              | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |               |      |
|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp           | K    | Rp           | K    | Rp           | K    | Rp            | K                     | Rp            |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                           | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11           | 12   | 13           | 14   | 15           | 16   | 17            | 18                    | 19            | 20   |
|    | 3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |               |                                 |      |               |      |              |      |              |      |              |      |               |                       |               |      |
|    | Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                                                 | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan                                                                                   | Tertetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Perda/Perbup/SK Bupati, yang selanjutnya secara sinkron akan ditetapkan di dalam Perda RTRWK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 tahun                                                                                                    | 0             | Dokumen                         | 1    | 16.790.000,00 | 0    |              | 0    |              | 0    |              | 0    |               | 1                     | 16.790.000,00 |      |
|    | 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |               |                                 |      |               |      |              |      |              |      |              |      |               |                       |               |      |
|    | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota                    | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota dalam 1 tahun | 0             | Dokumen                         | 0    | 0             | 1    | 5.000.000,00 | 1    | 5.000.000,00 | 1    | 5.000.000,00 | 1    | 50.000.000,00 | 4                     | 65.000.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output | Indikator Outcome / Output                                  | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                 | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |                |      |                |      |                |       |                |      |                |                       |                  | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------|----------------|------|----------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |               | Satuan                          | 2026  |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029  |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |               |                                 | K     | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                     | 6             | 7                               | 8     | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14    | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19               | 20   |
|    |                                                                      |                                                             | yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. |                                                                                                                                                                                       |               |                                 |       |                |      |                |      |                |       |                |      |                |                       |                  |      |
|    | 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |               |                                 |       |                |      |                |      |                |       |                |      |                |                       |                  |      |
|    | Meningkatnya prasarana pertanian yang tersedia sesuai standar        | Persentase prasarana pertanian yang tersedia sesuai standar | Perbandingan jumlah prasarana pertanian yang tersedia sesuai dengan standar dengan jumlah kebutuhan prasarana pertanian lalu dikalikan 100% dan dihitung secara kumulatif. Prasarana pertanian meliputi jalan pertanian (jalan produksi, jalan usaha tani) jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), pintu air, Balai Penyuluhan Pertanian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Jumlah JITUT tersedia + Jumlah JUT/JP tersedia + Jumlah Pintu Air tersedia) ----- x 100%<br>( Jumlah kebutuhan JITUT + Jumlah kebutuhan JUT/JP + Jumlah Jumlah kebutuhan pintu air ) | 68            | Persen                          | 69,49 | 930.887.400,00 | 70,2 | 550.000.000,00 | 70,9 | 550.000.000,00 | 71,61 | 400.000.000,00 | 72,1 | 642.102.232,00 | 72,1                  | 3.072.989.632,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output            | Indikator Outcome / Output                                    | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulasi Perhitungan                                                                                                         | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |       |                |       |                |      |               |      |                |                       |                | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|---------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027  |                | 2028  |                | 2029 |               | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |               |                                 | K    | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K    | Rp            | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                               | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                             | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10    | 11             | 12    | 13             | 14   | 15            | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                 |                                                               | Longstorage dan dihitung dalam satuan titik lokasi/unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |               |                                 |      |                |       |                |       |                |      |               |      |                |                       |                |      |
|    |                                                                                 | Persentase prasarana RPH dan Puskesmas yang ditingkatkan      | Perbandingan jumlah prasarana RPH dan Puskesmas dengan jumlah kebutuhan prasarana RPH dan Puskesmas lalu dikalikan 100% dan dihitung secara kumulatif.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah prasarana RPH dan Puskesmas yang tersedia dan dalam kondisi baik / jumlah kebutuhan prasarana RPH dan puskesmas x 100% | 70,83         | Persen                          | 75   |                | 79,16 |                | 83,33 |                | 87,5 |               | 90   |                | 90                    |                |      |
|    | 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |               |                                 |      |                |       |                |       |                |      |               |      |                |                       |                |      |
|    | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani                   | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian. | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam 1 tahun                                                   | 2             | unit                            | 2    | 425.000.000,00 | 1     | 150.000.000,00 | 1     | 150.000.000,00 | 0    | 0             | 1    | 150.000.000,00 | 5                     | 875.000.000,00 |      |
|    | 3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |               |                                 |      |                |       |                |       |                |      |               |      |                |                       |                |      |
|    | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air                          | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dalam 1 tahun                                                   | 0             | unit                            | 2    | 65.945.000,00  | 1     | 30.000.000,00  | 1     | 30.000.000,00  | 1    | 30.000.000,00 | 4    | 122.102.232,00 | 9                     | 278.047.232,00 |      |

[illegible]

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                | Indikator Outcome / Output                                                                                  | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulasi Perhitungan                                                                                           | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                  | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |               | Satuan                          | 2026  |                | 2027  |                | 2028  |                | 2029  |                | 2030  |                | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |               |                                 | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K     | Rp             | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                                                   | 3                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                               | 6             | 7                               | 8     | 9              | 10    | 11             | 12    | 13             | 14    | 15             | 16    | 17             | 18                    | 19               | 20   |
|    | Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |               |                                 |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                  |      |
|    | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas                                  | Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                              | Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.                                                                                                                                                 | Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi dalam 1 tahun                    | 0             | unit                            | 1     | 34.057.500,00  | 1     | 30.000.000,00  | 1     | 30.000.000,00  | 1     | 30.000.000,00  | 1     | 30.000.000,00  | 1                     | 154.057.500,00   |      |
|    | 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |               |                                 |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                  |      |
|    | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan                         | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                     | Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.umum.Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian. | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi dalam1 tahun            | 3             | unit                            | 3     | 171.800.000,00 | 3     | 175.000.000,00 | 3     | 175.000.000,00 | 3     | 175.000.000,00 | 3     | 175.000.000,00 | 3                     | 871.800.000,00   |      |
|    | 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |               |                                 |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                       |                  |      |
|    | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner                        | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | Perbandingan jumlah unit usaha pangan asal hewan yang telah memiliki sertifikat pra NKV atau NKV dengan jumlah unit usaha pangan asal hewan                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV ----- x 100%<br>jumlah unit usaha | 40.54         | Persen                          | 43.24 | 265.998.700,00 | 45.94 | 281.399.200,00 | 48.65 | 290.595.000,00 | 51.35 | 297.579.000,00 | 54.05 | 407.283.000,00 | 54,05                 | 1.542.854.900,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                        | Indikator Outcome / Output                                      | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                                                            | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |               | Satuan                          | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |               |                                 | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                           | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                | 6             | 7                               | 8    | 9              | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                             |                                                                 | secara keseluruhan lalu dikalikan 100% dan dihitung secara kumulatif.                                                                                                                                         | pangan asal hewan                                                                                                                                |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    |                                                                                                             | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)    | Perbandingan jumlah kejadian penyakit hewan menular (PHMS) yang ditangani secara prosedur dengan jumlah kejadian penyakit hewan menular secara keseluruhan lalu dikalikan 100% dan dihitung dalam satu tahun. | Jumlah kejadian penyakit hewan PHMS yang dapat dikelndalikan sesuai prosedur ----- x 100% jumlah kejadian penyakit hewan PHMS secara keseluruhan | 100           | Persen                          | 100  |                | 100  |                | 100  |                | 100  |                | 100  |                | 100                   |                |      |
|    | 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner                                           | Persentase penyakit ternak/hewan yang tertangani sesuai standar | Perbandingan jumlah penyakit ternak/hewan yang dapat ditangani sesuai standar dengan jumlah kejadian penyakit ternak secara keseluruhan lalu dikalikan 100% dan dihitung dalam satu tahun.                    | Jumlah kejadian penyakit ternak/hewan yang tertangani sesuai standar ----- x 100% jumlah kejadian penyakit ternak atau hewan secara keseluruhan  | 100           | Persen                          | 100  | 135.707.800,00 | 100  | 140.000.000,00 | 100  | 140.000.000,00 | 100  | 140.000.000,00 | 100  | 240.798.000,00 | 100                   | 796.505.800,00 |      |
|    | 3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                     | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium                              | Pelayanan jasa Laboratorium Veteriner yang dimaksud adalah pelayanan di laboratorium sederhana yang ada di Puskesmas.                                                                                         | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dalam 1 tahun                                                                                                 | 1             | Laporan                         | 1    | 8.862.000,00   | 1    | 10.000.000,00  | 1    | 10.000.000,00  | 1    | 10.000.000,00  | 1    | 60.062.001,00  | 5                     | 98.924.001,00  |      |
|    | 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |               |                                 |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                  | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                           | Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam                                                                       | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam 1 tahun                                                                                              | 5             | Laporan                         | 5    | 126.845.800,00 | 5    | 130.000.000,00 | 5    | 130.000.000,00 | 5    | 130.000.000,00 | 5    | 180.735.999,00 | 25                    | 697.581.799,00 |      |

[illegible]

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                                                      | Indikator Outcome / Output                                                                    | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                       | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|---------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |               |      |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp            |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                           | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19            | 20   |
|    | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                                       | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                  | Pelaksanaan pengujian produk hewan dilaksanakan di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, yaitu laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba, residu, resistensi, antimikroba, prion dan organisme hasil rekayasa genetik (Genetic Modified Organism/GMO). | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam 1 tahun                                  | 1             | Dokumen                         | 1    | 12.194.900,00 | 1    | 12.345.000,00 | 1    | 13.080.000,00 | 1    | 14.310.000,00 | 1    | 15.560.000,00 | 5                     | 67.489.900,00 |      |
|    | 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               |      |
|    | Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi                                                                                                           | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | Pembinaan unit usaha dalam rangka penerapan persyaratan higiene sanitasi mencakup penilaian dan penerbitan NKV. Sertifikat NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.                                                          | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi dalam 1 tahun | 21            | unit usaha                      | 23   | 10.070.000,00 | 25   | 10.850.000,00 | 25   | 11.630.000,00 | 25   | 12.470.000,00 | 25   | 13.550.000,00 | 123                   | 58.570.000,00 |      |
|    | 3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               |      |
|    | Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi                                                                                                                                                       | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran,                                                 | Pengelolaan Penerbitan rekomendasi pemasukan merupakan proses                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat                                                    | 324           | Dokumen                         | 330  | 6.237.000,00  | 333  | 7.088.000,00  | 335  | 8.467.000,00  | 337  | 9.560.000,00  | 340  | 10.905.000,00 | 1675                  | 42.257.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                           | Indikator Outcome / Output                                                                                | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formulasi Perhitungan                                                                                                   | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                              | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                       | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    | Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM               | Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM                                                                   | penerbitan rekomendasi yang dilakukan Pejabat Otoritas Veteriner yang memuat persyaratan kesehatan hewan sebagai syarat pemasukan HPM ke dalam wilayah provinsi.<br><br>Pengelolaan Penerbitan rekomendasi pengeluaran merupakan proses penerbitan rekomendasi yang dilakukan Pejabat Otoritas Veteriner terkait pengeluaran HPM dari wilayah provinsi sebagai syarat lalu lintas HPM antar provinsi.<br><br>Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Veteriner merupakan proses sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan kesehatan he<br><br>SKKH/SKPH adalah pengelolaan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Surat Keamanan Produk Hewan (SKKH/SKPH) | Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM dalam1 tahun                                                                               |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | 3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat                                        | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan | Peningkatan kesadaran masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka edukasi kepada masyarakat tentang Kesehatan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan dalam 1 tahun | 187           | orang                           | 200  | 62.612.500,00 | 200  | 65.316.200,00 | 200  | 67.168.000,00 | 200  | 68.739.000,00 | 200  | 70.720.000,00 | 1000                  | 334.555.700,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output           | Indikator Outcome / Output                                                                       | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                    | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                              | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                        | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                |                                                                                                  | veteriner dan kesejahteraan hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | 3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan                          | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara penanganan kesmavet yang baik | Pengawasan Unit Usaha produk Hewan adalah pengawasan terhadap penerapan cara yang baik pada rumah potong dan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan. Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan. Unit Usaha produk Hewan dapat menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan. | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik dalam 1 tahun                                                               | 8             | unit usaha                      | 10   | 5.785.000,00  | 10   | 6.250.000,00  | 10   | 7.000.000,00  | 10   | 7.250.000,00  | 10   | 7.500.000,00  | 50                    | 33.785.000,00  |      |
|    | 3.27.04.2.05 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |               |                                 |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |                |      |
|    | Meningkatnya penerapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan                  | Persentase pengawasan persyaratan teknis kesrawan                                                | Perbandingan jumlah unit usaha yang wajib menerapkan penyelenggaraan kesrawan yang diawasi dengan jumlah total unit usaha yang wajib menerapkan kesrawan lalu dikalikan 100%.<br><br>Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah unit usaha yang wajib menerapkan penyelenggaraan kesrawan yang diawasi ----- x 100%<br><br>Jumlah total unit usaha yang wajib menerapkan kesrawan | 56            | Persen                          | 58   | 27.732.000,00 | 60   | 32.000.000,00 | 62   | 35.000.000,00 | 64   | 37.000.000,00 | 66   | 40.000.000,00 | 66                    | 171.732.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output        | Indikator Outcome / Output                                           | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Formulasi Perhitungan                                                                         | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                           | 3                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                             | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                             |                                                                      | dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.                                                                                                                                                                   |                                                                                               |               |                                 |      |               |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | 3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |               |                                 |      |               |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha       | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan | Pembinaan dilakukan pada unit kesejahteraan hewan untuk menjamin penyelenggaraan kesehatan hewan<br><br>Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia. | Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan dalam 1 tahun            | 63            | Unit Usaha                      | 63   | 27.732.000,00 | 63   | 32.000.000,00  | 63   | 35.000.000,00  | 63   | 37.000.000,00  | 63   | 40.000.000,00  | 315                   | 171.732.000,00 |      |
|    | 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |               |                                 |      |               |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian              | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian      | Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dampak bencana perubahan iklim = kekeringan esktrim , banjir                                                                                                                                                                                                                               | luas terkena DPI yang ditangani tahun ini (ha)<br>----- x 100%<br>luas terkena DPI total (ha) | 1             | Persen                          | 5    | 78.804.000,00 | 10   | 100.000.000,00 | 15   | 100.000.000,00 | 20   | 100.000.000,00 | 25   | 100.000.000,00 | 25                    | 478.804.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                              | Indikator Outcome / Output                                                                                              | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Formulasi Perhitungan                                                                                                                 | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                | Ket. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                     | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11             | 12   | 13             | 14   | 15             | 16   | 17             | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                                   | Persentase Penanganan Bencana Pertanian                                                                                 | Perbandingan Luas areal pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan luas arealseranganorganisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pagan dan hortikultura lalu dikalkan 100 dan dihitung per tahun                                                                                                                                                    | luas areal serangan OPT yang ditangani tahun ini (ha)<br>----- x 100%<br>luas serangan OPT tahun ini (ha)                             | 100           | Persen                          | 100  |               | 100  |                | 100  |                | 100  |                | 100  |                | 100                   |                |      |
|    | 3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |               |                                 |      |               |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                                                    | Luas serangan OPT dan area terdampak perubahan iklim yang tertangani sesuai prosedur                                    | Luas total serangan HPT dan dampak perubahan iklim yang dapat tertangani yang terjadi dalam satu tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Luas total serangan HPT yang dikendalikan (ha) + Luas total dampak perubahan iklim yang dikendalikan (ha)                             | 110           | Ha                              | 120  | 78.804.000,00 | 130  | 100.000.000,00 | 130  | 100.000.000,00 | 130  | 100.000.000,00 | 130  | 100.000.000,00 | 700                   | 478.804.000,00 |      |
|    | 3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |               |                                 |      |               |      |                |      |                |      |                |      |                |                       |                |      |
|    | Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani dan tidak difasilitasi oleh pusat.Pengendalian OPTsebagai salah satu upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), menjamin mutu hasil sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat. Tindakan pengendalian dapat dilakukan secara | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan dalam 1 tahun | 100           | Ha                              | 100  | 21.722.000,00 | 100  | 50.000.000,00  | 100  | 50.000.000,00  | 100  | 50.000.000,00  | 100  | 50.000.000,00  | 500                   | 221.722.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                     | Indikator Outcome / Output                                                                              | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                        | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                      | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                       |                | Ket. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |               | Satuan                          | 2026  |               | 2027  |               | 2028  |               | 2029  |               | 2030  |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |               |                                 | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K     | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                                        | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                          | 6             | 7                               | 8     | 9             | 10    | 11            | 12    | 13            | 14    | 15            | 16    | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    |                                                                                                          |                                                                                                         | preventif (pencegahan) maupun kuratif (telah terjadi serangan), dilaksanakan dengan prinsip PHT baik skala kecil/individual maupun skala luas.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |               |                                 |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                       |                |      |
|    | 3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |               |                                 |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                       |                |      |
|    | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                  | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah pengendalian terhadap DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani dan yang tidak difasilitasi pusat.                                                         | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani dalam 1 tahun                                                      | 10            | Ha                              | 20    | 57.082.000,00 | 30    | 50.000.000,00 | 30    | 50.000.000,00 | 30    | 50.000.000,00 | 30    | 50.000.000,00 | 140                   | 257.082.000,00 |      |
|    | 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |               |                                 |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                       |                |      |
|    | Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian                                            | Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan                                                        | Perbandingan jumlah izin usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan melalui aplikasi OSS dengan jumlah izin usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang diajukan melalui aplikasi OSS lalu dikalikan 100% dan dihitung dalam tahun berjalan. | Jumlah ijin pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan dalam OSS ----- x 100% jumlah pengajuan penerbitan izin tanaman pangan dan hortikultura melalui OSS | 62.22         | Persen                          | 62.84 | 28.165.600,00 | 63.47 | 59.998.000,00 | 64.11 | 63.651.000,00 | 64.75 | 69.050.000,00 | 65.39 | 70.050.000,00 | 65,39                 | 290.914.600,00 |      |
|    |                                                                                                          | Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan                                                       | Perbandingan jumlah izin usaha peternakan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS dan instansi                                                                                                                                                                                | Jumlah ijin peternakan yang diterbitkan dalam OSS dan instansi teknis terkait                                                                                              | N/A           | Perssen                         | 19    |               | 19.5  |               | 20    |               | 20.5  |               | 20.5  |               | 20,5                  |                |      |

[illegible]

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                        | Indikator Outcome / Output                                                                                           | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                             | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |               |      |               |      |               |       |               |      |               |                       |                | Ket. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------------|----------------|------|
|    |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Satuan                          | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029  |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |                |      |
|    |                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K     | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp             |      |
| 1  | 2                                                                                           | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6             | 7                               | 8    | 9             | 10   | 11            | 12   | 13            | 14    | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19             | 20   |
|    | Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |      |               |      |               |      |               |       |               |      |               |                       |                |      |
|    | Meningkatnya pengawasan izin usaha produksi bibit, pakan dan fasilitas peternakan lainnya   | Persentase produk benih/bibit/pakan/fasilitas pemeliharaan hewan/rumah potong hewan yang memenuhi rekomendasi teknis | Perbandingan jumlah Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang memenuhi rekomendasi teknis dengan jumlah usahaUsaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan lalu dikalikan 100% dan dihitung secara kumulatif. Rekomendasi teknis yang di maksud meliputi pemenuhan persyaratan perijinan OSS dan mutu produk sesuai dengan perturan yang berlaku (NKV dan Halal). | Jumlah pelaku Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan ----- x 100%<br>jumlah pelaku Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 0             | Persen                          | 48,9 | 16.125.400,00 | 49   | 27.293.000,00 | 49,5 | 29.605.000,00 | 49,95 | 31.765.000,00 | 50   | 27.344.000,00 | 50                    | 132.132.400,00 |      |
|    | 3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |      |               |      |               |      |               |       |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                    | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi                                                 | Kesesuaian antara izin usaha yang diterbitkan dengan jenis usaha yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi dalam 1 tahun                                                                                                                                                                                | 1             | Laporan                         | 1    | 6.313.400,00  | 1    | 7.850.000,00  | 1    | 8.135.000,00  | 1     | 8.010.000,00  | 1    | 5.444.000,00  | 5                     | 35.752.400,00  |      |
|    | 3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                 |      |               |      |               |      |               |       |               |      |               |                       |                |      |
|    | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                       | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi                                                                    | Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi dalam 1 tahun                                                                                                                                                                                                   | 1             | Laporan                         | 1    | 6.512.000,00  | 1    | 8.880.000,00  | 1    | 10.470.000,00 | 1     | 12.555.000,00 | 1    | 10.600.000,00 | 5                     | 49.017.000,00  |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                                                                                                                                      | Indikator Outcome / Output                                                                                                                                                                    | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                 | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |              |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               | Ket. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|---------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |               | Satuan                          | 2026 |              | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               | Akhir Periode Renstra |               |      |
|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |               |                                 | K    | Rp           | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K                     | Rp            |      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                     | 6             | 7                               | 8    | 9            | 10   | 11            | 12   | 13            | 14   | 15            | 16   | 17            | 18                    | 19            | 20   |
|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |      |              |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               |      |
|    | 3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |      |              |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               |      |
|    | Terawasinya pelaksanaaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan                   | Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi Hewan | Pengawasan terhadap Operasional pelayanan jasa medik veteriner yang diberikan kepada pasien dan klien di Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner. pasar hewan adalah pasar tempat berlangsung nya jual beli hewan ternak seperti sapi,kerbau,kambing,dan lain sebagainya | Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi dalam 1 tahun | 1             | Laporan                         | 1    | 3.300.000,00 | 1    | 10.563.000,00 | 1    | 11.000.000,00 | 1    | 11.200.000,00 | 1    | 11.300.000,00 | 5                     | 47.363.000,00 |      |
|    | 3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |               |                                 |      |              |      |               |      |               |      |               |      |               |                       |               |      |
|    | Meningkatnya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang terbit                                                                                                                   | Persentase usaha pengecer obat hewan yang memenuhi rekomendasi teknis                                                                                                                         | Perbandingan jumlah usaha pengecer obat hewan yang memenuhi rekomendasi teknis dengan jumlah usaha pengecer obat hewan yang memenuhi rekomendasi teknis lalu dikalikan 100% dan dihitung secara komulatif. rekomendasi teknis yang di maksud meliputi persyaratan                                                                                                       | Jumlah pelaku usaha pengecer obat hewan yang memenuhi rekomendasi teknis ----- x 100%<br>jumlah pelaku usaha pengecer obat hewan yang memenuhi rekomendasi teknis                                     | 53,1          | Persen                          | 53,1 | 5.370.000,00 | 55,2 | 17.225.000,00 | 57,4 | 16.526.000,00 | 59,5 | 17.625.000,00 | 50   | 21.266.000,00 | 50                    | 78.012.000,00 |      |

| No | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output                     | Indikator Outcome / Output                                              | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                     | Formulasi Perhitungan                                                                                                     | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  | Ket. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|-----------------------|------------------|------|
|    |                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |               | Satuan                          | 2026 |                  | 2027 |                  | 2028 |                  | 2029 |                  | 2030 |                  | Akhir Periode Renstra |                  |      |
|    |                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |               |                                 | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K    | Rp               | K                     | Rp               |      |
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                         | 6             | 7                               | 8    | 9                | 10   | 11               | 12   | 13               | 14   | 15               | 16   | 17               | 18                    | 19               | 20   |
|    |                                                                                          |                                                                         | perijinan OSS dan rekomendasi teknis lainnya sesuai dengan perturan yang berlaku.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  |      |
|    | 3.27.06.2.03.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  |      |
|    | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                   | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi                      | Pengawasan izin usaha pengecer obat hewan Kewenangan Kabupaten/Kota di tingkat pengecer                                                                                                                                                                  | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi dalam1 tahun                                                           | 1             | Laporan                         | 1    | 5.370.000,00     | 1    | 17.225.000,00    | 1    | 16.526.000,00    | 1    | 17.625.000,00    | 1    | 21.266.000,00    | 5                     | 78.012.000 k00   |      |
|    | 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  |      |
|    | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan pmbinaan kelembagaan usaha tani | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan                     | Perbandingan jumlah penyuluh pertanian yang menerima peningkatan kapasitas dengan jumlah penyuluh pertanian keseluruhan lalu dikalikan 100% . Peningkatan kapasitas meliputi kegiatan bimtek, pelatihan, sosialisasi baik dari internal maupun eksternal | Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti bimtek, pelatihan, sosialisas ----- x 100% jumlah penyuluh pertanian keseluruhan | 100           | Persen                          | 100  | 2.301.615.733,00 | 100  | 1.854.179.606,00 | 100  | 1.851.319.913,00 | 100  | 1.825.768.545,00 | 100  | 1.910.722.063,00 | 100                   | 9.743.605.860k00 |      |
|    |                                                                                          | Persentase Kelembagaan yang Dibentuk dan Beroperasi Koperasi Tani       | Perbandingan jumlah kopresai tani yang terbentuk dan beroperasi dengan jumlah kelembagaan petani lalu dikalikan 100%. Kelembagaan petani merupakan Gapoktan Kelurahan.                                                                                   | Jumlah kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi ----- x 100% jumlah kelembagaan petani (gapoktan)           | 0             | Persen                          | 0    |                  | 4    |                  | 9    |                  | 14   |                  | 14   |                  | 14                    |                  |      |
|    | 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |               |                                 |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |                       |                  |      |
|    | Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian                                                     | Persentase petani/keompok tani/ikan yang menerapkan teknologi pertanian | Teknologi pertanian meliputi : teknologi pengolahan limbah menjadi pupuk, teknologi budidaya ramah lingkungan, teknologi alat / mesin pertanian modern, teknologi smart farming. Kelompok tani meliputi : gapoktan,                                      | Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian ----- x 100% jumlah kelompok tani keseluruhan                    | 19            | Persen                          | 35   | 2.301.615.733,00 | 40   | 1.854.179.606,00 | 45   | 1.851.319.913,00 | 51   | 1.825.768.545,00 | 55   | 1.910.722.063,00 | 55                    | 9.743.605.860k00 |      |



| No           | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan / Output        | Indikator Outcome / Output                                            | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                               | Formulasi Perhitungan                                                               | Baseline 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |                       |                   | Ket. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------|
|              |                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |               | Satuan                          | 2026 |                   | 2027 |                   | 2028 |                   | 2029 |                   | 2030 |                   | Akhir Periode Renstra |                   |      |
|              |                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |               |                                 | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K    | Rp                | K                     | Rp                |      |
| 1            | 2                                                                           | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                   | 6             | 7                               | 8    | 9                 | 10   | 11                | 12   | 13                | 14   | 15                | 16   | 17                | 18                    | 19                | 20   |
|              | Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian     | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                      | Penyediaan dan penggunaan sarana prasarana yang mendukung dalam kegiatan penyuluhan pertanian                                                                                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dalam 1 tahun                      | 1             | unit                            | 1    | 3.442.500,00      | 1    | 15.000.000,00     | 1    | 3.500.000,00      | 1    | 3.500.000,00      | 1    | 15.000.000,00     | 5                     | 40.442.500,00     |      |
|              | 3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |               |                                 |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |      |                   |                       |                   |      |
|              | Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian                      | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | Penyediaan penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan daerah, pengembangan karir penyuluh ASN serta Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ASN, Penyuluh Swadaya, dan Swasta melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta kerjasama dengan pihak terkait/stakeholders lain. | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya dalam 1 tahun | 14            | orang                           | 9    | 46.510.500,00     | 7    | 47.000.000,00     | 7    | 47.000.000,00     | 7    | 47.000.000,00     | 7    | 47.000.000,00     | 7                     | 234.510.500,00    |      |
| JUMLAH TOTAL |                                                                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |               |                                 |      | 14.418.515.555,00 |      | 13.513.024.392,00 |      | 13.298.954.742,00 |      | 13.109.205.630,00 |      | 13.946.612.202,00 |                       | 68.286.312.521,00 |      |

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

| No | Program Prioritas                                                                   | Outcome/Output                                                                                                   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Memfasilitasi dan pendampingan pertanian model Urban Farming dan Pola Tanam Organik | Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat                                                       | 2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                                                               |            |
|    |                                                                                     | Terjaganya pemenuhan bahan pangan                                                                                | 2.09.03.2.01 - Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan |            |
|    |                                                                                     | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Dan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya                            | 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya                                                                   |            |
|    |                                                                                     | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                              | 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                 |            |
|    |                                                                                     | Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis                                          | 2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                 |            |
|    |                                                                                     | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                           | 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (Nbm)                                                                                                                 |            |
|    |                                                                                     | Meningkatnya Penyediaan Cadangan Pangan Daerah                                                                   | 2.09.03.2.02 - Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                |            |
|    |                                                                                     | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                            | 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                   |            |
|    |                                                                                     | Meningkatnya Konsumsi Pangan Selain Beras/Terigu                                                                 | 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           |            |
|    |                                                                                     | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                             |            |
|    |                                                                                     | Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                  | 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                                                                     |            |
|    |                                                                                     | Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                | 2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                   |            |
|    |                                                                                     | Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan                                                                         | 2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                                                             |            |
|    |                                                                                     | Meningkatnya Penanganan Kelarga Rentan Rawan Pangan                                                              | 2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                      |            |
|    |                                                                                     | Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi                                                             | 2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi                                                                                                    |            |
|    |                                                                                     | Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota                                              | 2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota                                                                                    |            |
|    |                                                                                     | Meningkatnya Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan                                                                 | 2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                                                              |            |
|    |                                                                                     | Meningkanya Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Dan Mutu Kemanan Pangan                                       | 2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         |            |
|    |                                                                                     | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                 | 2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |            |
| No | Program Prioritas                                                                   | Outcome/Output                                                                                                   | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Keterangan |
|    |                                                                                     | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidava                                                                         | 3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                                                          |            |

|    |                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                   | Meningkatnya Usaha Budidaya Perikanan Yang Memenuhi Rekomendasi Teknis                                                                                      | 3.25.04.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           |            |
|    |                   | Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 3.25.04.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                  |            |
|    |                   | Meningkatnya Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Pembinaan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                      | 3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                      |            |
|    |                   | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                | 3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                       |            |
|    |                   | Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan                      | 3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan                  |            |
|    |                   | Meningkatnya Pemenuhan Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                          | 3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                            |            |
|    |                   | Tersedianya Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                |            |
|    |                   | Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | 3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                         |            |
|    |                   | Terbinanya Pembudidayaan Ikan Di Darat                                                                                                                      | 3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat                                                                                                 |            |
|    |                   | Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Rnasvarakat                                                                                                                 | 3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                                                               |            |
|    |                   | Meningkatnya Usaha Pengolahan Perikanan Yang Memenuhi Rekomendasi Teknis                                                                                    | 3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil                                                                 |            |
|    |                   | Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                     | 3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                  |            |
|    |                   | Tersedianya Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha Dan Risiko                                            | 3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Skala Usaha Dan Risiko |            |
|    |                   | Meningkatnya Unit Usaha Hasil Perikanan Yang Memiliki Standar Jaminan Mutu                                                                                  | 3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil                                                     |            |
|    |                   | Terlaksananya Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko | 3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha Dan Risiko        |            |
|    |                   | Meningkatnya Pelaku Usaha Perikanan Yang Terfasilitasi                                                                                                      | 3.25.06.2.03 - Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                       |            |
| No | Program Prioritas | Outcome/Output                                                                                                                                              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Keterangan |

|    |                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |            |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                   | Tersedianya Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | 3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |            |
|    |                   | Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Sarana Pertanian                                                                                                                         | 3.27.02 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                                                                                   |            |
|    |                   | Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                                                           | 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                                                                            |            |
|    |                   | Terawasnya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi                                                                       | 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi                                                                      |            |
|    |                   | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                              | 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                           |            |
|    |                   | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan                                                                                                                      | 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                              |            |
|    |                   | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                                                                       | 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman                                                                                                                                       |            |
|    |                   | Meningkatkan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan                                                                                       | 3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                |            |
|    |                   | Terawasnya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                                                                     | 3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                                                                    |            |
|    |                   | Terawasnya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                                                                      | 3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                                                                     |            |
|    |                   | Meningkatnya Pengawasan Obat Hewan Di Tingkat Pengecer                                                                                                                        | 3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan Di Tingkat Pengecer                                                                                                                                         |            |
|    |                   | Terperiksanya Mutu, Khasiat Dan Keamanan Obat Hewan                                                                                                                           | 3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat Dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                                                                                  |            |
|    |                   | Tersedianya Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                                       | 3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                   |            |
|    |                   | Tersedianya Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                                       | 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                                                        |            |
|    |                   | Meningkatnya Distribusi Dan Kualitas Prasarana Pertanian                                                                                                                      | 3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                |            |
|    |                   | Menurunnya Alih Fungsi Lahan Pertanian                                                                                                                                        | 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                  |            |
|    |                   | Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                               | 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                            |            |
|    |                   | Ditetapkannya Kawasan, Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten/Kota                                                                              | 3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Secara Numerik Dan Spasial Di Kabupaten/Kota                                                      |            |
|    |                   | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Di Kabupaten/Kota | 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lcp2b Di Kabupaten/Kota |            |
| No | Program Prioritas | Outcome/Output                                                                                                                                                                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Keterangan |

|    |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                   | Meningkatnya Prasarana Pertanian Yang Tersedia Sesuai Standar                                                        | 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                            |            |
|    |                   | Terbangun, Terehabilitasi Dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani                                                        | 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                           |            |
|    |                   | Terbangun, Terehabilitasi Dan Terpeliharanya Pintu Air                                                               | 3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Pintu Air                                                                                                                  |            |
|    |                   | Terbangun, Terehabilitasi Dan Terpeliharanya Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya                   | 3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya                                                                      |            |
|    |                   | Terehabilitasi Dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                        | 3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                                             |            |
|    |                   | Terbangun, Terehabilitasi, Terpelihara Dan Beroperasinya Puskesmas                                                   | 3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Dan Operasionalisasi Puskesmas                                                                                                |            |
|    |                   | Terbangun, Terehabilitasi, Terpelihara Dan Beroperasinya Rumah Potong Hewan                                          | 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                                                                       |            |
|    |                   | Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                         | 3.27.04 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                         |            |
|    |                   | Meningkatnya Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner                                                    | 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                               |            |
|    |                   | Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                              | 3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                                                |            |
|    |                   | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                           | 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                                             |            |
|    |                   | Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                             | 3.27.04.2.04 - Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                 |            |
|    |                   | Terawasinya Peredaran Hewan Dan Produk Hewan                                                                         | 3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan Dan Produk Hewan                                                                                                                           |            |
|    |                   | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                  | 3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                                 |            |
|    |                   | Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi                                      | 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan                                                                                         |            |
|    |                   | Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner Dan SKKH/SKPH Untuk HPM | 3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, Dan Skkh/Skph Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (Hpm) |            |
|    |                   | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat                                                              | 3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesmavet Dan Kesejahteraan Hewan                                                                                            |            |
|    |                   | Terlaksananya Pengawasan Pada Unit Usaha Produk Hewan                                                                | 3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                                    |            |
|    |                   | Meningkatnya Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                                                        | 3.27.04.2.05 - Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                                                                                                            |            |
|    |                   | Terlaksananya Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha                                                | 3.27.04.2.05.0003 - Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha                                                                                                               |            |
|    |                   | Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                       | 3.27.05 - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                                                                       |            |
| No | Program Prioritas | Outcome/Output                                                                                                       | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Keterangan |

|    |                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                   | Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                                                                         | 3.27.05.2.01 - Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                                                           |            |
|    |                   | Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan                                                                                          | 3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan                                                                                         |            |
|    |                   | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan                                                                                                | 3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Dpi) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan                                                                                                  |            |
|    |                   | Meningkatnya Kualitas Dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian                                                                                                                          | 3.27.06 - Program Perizinan Usaha Pertanian                                                                                                                                                               |            |
|    |                   | Meningkatnya Usaha Pertanian Yang Memenuhi Rekomendasi Teknis                                                                                                                          | 3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          |            |
|    |                   | Terbina Dan Terawasinya Penerapan Standar Dan Izin Usaha Pertanian                                                                                                                     | 3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Dan Izin Usaha Pertanian                                                                                                                   |            |
|    |                   | Meningkatnya Pengawasan Izin Usaha Produksi Bibit, Pakan Dan Fasilitas Peternakan Lainnya                                                                                              | 3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan                                               |            |
|    |                   | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan                                                                                                               | 3.27.06.2.02.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan                                                                                                               |            |
|    |                   | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                                                                                                                  | 3.27.06.2.02.0005 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan                                                                                                                                  |            |
|    |                   | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, Atau Pasar Hewan | 3.27.06.2.02.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, Atau Pasar Hewan |            |
|    |                   | Meningkatnya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Yang Terbit                                                                                                | 3.27.06.2.03 - Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                                                                                             |            |
|    |                   | Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                                                 | 3.27.06.2.03.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                                                 |            |
|    |                   | Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian Dan Pmbinaan Kelembagaan Usaha Tani                                                                                               | 3.27.07 - Program Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                                    |            |
|    |                   | Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian                                                                                                                                                   | 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                           |            |
|    |                   | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa                                                                                             | 3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa                                                                                                          |            |
|    |                   | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa                                                                                                          | 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa                                                                                                                       |            |
|    |                   | Tersedia Dan Termanfaatkannya Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                                                | 3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                                                  |            |
|    |                   | Tersedia Dan Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian                                                                                                                                 | 3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian                                                                                                                               |            |
| No | Program Prioritas | Outcome/Output                                                                                                                                                                         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Keterangan |

|    |                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |            |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. | Bantuan Peralatan Dan Fasilitas Pendukung Di Bidang Pertanian | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                                                                                                                      | 3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                |            |
|    |                                                               | Menurunnya alih fungsi lahan pertanian                                                                                                                                        | 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                  |            |
|    |                                                               | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                               | 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                            |            |
|    |                                                               | Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                              | 3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Secara Numerik Dan Spasial Di Kabupaten/Kota                                                      |            |
|    |                                                               | Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | 3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Di Kabupaten/Kota |            |
|    |                                                               | Meningkatnya prasarana pertanian yang tersedia sesuai standar                                                                                                                 | 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                   |            |
|    |                                                               | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani                                                                                                                 | 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                  |            |
|    |                                                               | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air                                                                                                                        | 3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Pintu Air                                                                                                                         |            |
|    |                                                               | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                            | 3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya                                                                             |            |
|    |                                                               | terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani                                                                                                                 | 3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                                                    |            |
|    |                                                               | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas                                                                                                            | 3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Dan Operasionalisasi Puskesmas                                                                                                       |            |
|    |                                                               | Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan                                                                                                   | 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                                                                              |            |
| 3. | Pengelolaan Tata Niaga Produk Pertanian Dan UMKM Melalui BUMD | Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                                                                                    | 2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                                                                                      |            |
|    |                                                               | Terjaganya Pemenuhan Bahan Pangan                                                                                                                                             | 2.09.03.2.01 - Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan                        |            |
|    |                                                               | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Dan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya                                                                                         | 2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya                                                                                          |            |
|    |                                                               | Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                           | 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                                        |            |
|    |                                                               | Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                                                       | 2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                                        |            |
|    |                                                               | Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                                        | 2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (Nbm)                                                                                                                                        |            |
|    |                                                               | Meningkatnya Penyediaan Cadangan Pangan Daerah                                                                                                                                | 2.09.03.2.02 - Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                                       |            |
| No | Program Prioritas                                             | Outcome/Output                                                                                                                                                                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Keterangan |

|  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                 |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                            | 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                         |  |
|  |  | Meningkatnya Konsumsi Pangan Selain Beras/Terigu                                                                 | 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi |  |
|  |  | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   |  |
|  |  | Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                  | 2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun           |  |
|  |  | Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                | 2.09.03.2.04.0005 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                         |  |

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang merupakan indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi/perangkat daerah yang terbagi dalam masing-masing urusan pemerintahan dan dipantau langsung oleh pemerintah pusat. IKK merupakan indikator kinerja yang strategis, relevan, terukur, dan berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri urusan pangan, pertanian dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

| No | Indikator                                                                 | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Satuan | Baseline<br>2024 | Target Tahun |       |       |       |       |       |                          | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-----|
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | akhir periode<br>Renstra |     |
| 1  | Indeks Ketahanan Pangan (IKP)                                             | Suatu sistem penilaian yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.                                  | Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (zona hijau menandakan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik). IKP dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. | Angka  | 80.80            | 80.95        | 81.56 | 82.31 | 83.06 | 84.81 | 84.56 | 84.56                    |     |
| 2  | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. | Presentase penduduk yang mengonsumsi makanan kurang dari kebutuhan energinya. Pengkategorian persentase PoU dibagi dalam 5 status yaitu sangat rendah bila PoU <2,5%, rendah nilai PoU 2,5% sd 4%, sedang nilai PoU 5%-19%, tinggi nilai PoU 20%-34% dan sangat tinggi nilai PoU > 35%.                                                                                         | Persen | 5.42             | 5.48         | 5.28  | 5.08  | 4.88  | 4.68  | 4.48  | 4.48                     |     |

| No | Indikator                                      | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                       | Formulasi Perhitungan                                                                                           | Satuan                  | Baseline<br>2024 | Target Tahun    |                 |                 |                 |                 |                 |                          | Ket |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----|
|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                         |                  | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | akhir periode<br>Renstra |     |
| 3  | PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan        | Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.                                                                                      | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam miliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar | Rupiah                  | 200.430.000.000  | 200.430.000.000 | 200.630.000.000 | 200.830.000.000 | 201.030.000.000 | 201.230.000.000 | 201.430.000.000 | 201.430.000.000          |     |
| 4  | Produktivitas Daging                           | Ukuran kemampuan produksi daging (karkas + edible offal) tiap ekor ternak                                                                                                                                                                                                  | Jumlah rata-rata produksi daging (karkas + edible offal)/ ekor ternak (kg/ekor)                                 | kg/ekor                 | 45.73            | 45.73           | 45.73           | 45.73           | 45.73           | 45.73           | 45.73           | 45.73                    |     |
| 5  | Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Hias     | Produktivitas perikanan budidaya ikan hias dihitung dengan membandingkan jumlah produksi ikan hias dengan luas lahan atau volume tempat pemeliharaan. Secara sederhana, bisa dihitung sebagai jumlah ikan hias (ekor) per unit luas (m2) atau volume (m3).                 | Jumlah ikan hias (ekor) / luas kolam yang diusahakan (m3)                                                       | ekor/meter <sup>3</sup> | 103.03           | 103.36          | 103.57          | 103.78          | 104             | 104.21          | 104.41          | 104.41                   |     |
| 6  | Produktivitas Perikanan Budidaya Ikan Konsumsi | Produktivitas perikanan budidaya ikan konsumsi dihitung dengan membandingkan jumlah produksi ikan konsumsi dalam kg dengan luas lahan atau volume tempat pemeliharaan. Secara sederhana, bisa dihitung sebagai produksi ikan konsumsi per unit luas (m2) atau volume (m3). | Jumlah produksi ikan konsumsi (kg)/luas kolam yang diusahakan (m3)                                              | kg/meter <sup>3</sup>   | 4.96             | 4.99            | 5.05            | 5.10            | 5.15            | 5.20            | 5.25            | 5.25                     |     |

| No | Indikator                                    | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formulasi Perhitungan                                                                                    | Satuan            | Baseline<br>2024   | Target Tahun       |                    |                    |                    |                    |                    |                          | Ket |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----|
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                   |                    | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               | akhir periode<br>Renstra |     |
| 7  | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Produktivitas pertanian adalah ukuran hasil atau output yang dihasilkan oleh tanaman pangan/horti utama dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam satuan berat per hektar. Tanaman pangan/horti utama meliputi : padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, sawi, cabe keriting, cabe rawit, terung, kangkung, belimbing. | Jumlah produksi (kwintal) / luas panen (ha)                                                              | ton/ha            | 4.83               | 5.14               | 5.23               | 5.33               | 5.43               | 5.53               | 5.63               | 5.63                     |     |
| 8  | Produktivitas Susu                           | Ukuran kemampuan produksi susu tiap ekor ternak betina produktif selama 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah rata-rata produksi susu selama 1 tahun per ekor ternak (kg/ekor/tahun)                            | kg/ekor/ta<br>hun | 1739,95            | 1739,95            | 1739,95            | 1739,95            | 1739,95            | 1739,95            | 1739,95            | 1739,95                  |     |
| 9  | Produktivitas Telur                          | Ukuran kemampuan produksi telur tiap ekor ternak betina produktif selama 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah rata-rata produksi telur selama 1 tahun per ekor ternak (kg/ekor/tahun)                           | kg/ekor/ta<br>hun | 6.49               | 6.49               | 6.49               | 6.49               | 6.49               | 6.49               | 6.49               | 6.49                     |     |
| 10 | Nilai hasil perikanan prioritas              | Nilai hasil perikanan adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pemasaran ikan segar dan omset usaha olahan hasil perikanan yang dihitung komulatif dalam satu tahun.                                                                                                                                                            | Nilai hasil perikanan segar + omset usaha produk olahan hasil perikanan.                                 | Rupiah            | 12.835.0<br>00.000 | 12.963.000<br>.000 | 13.093.000<br>.000 | 13.224.000<br>.000 | 13.356.000<br>.000 | 13.490.000<br>.000 | 13.625.000<br>.000 | 13.625.000.0<br>00       |     |
|    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai hasil perikanan segar = Jumlah produksi hasil perikanan (kg) x harga tingkat pembudidaya (Rp./Kg.) |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |     |
| 11 | Nilai hasil pertanian prioritas              | Nilai hasil pertanian adalah nominal uang yang dihasilkan dari usaha pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dihitung komulatif dalam satu tahun.                                                                                                                                                                    | Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.)                                    | Rupiah            | 66.059.0<br>50.000 | 84.858.908<br>.060 | 85.113.099<br>.825 | 85.660.306<br>.963 | 86.227.534<br>.264 | 86.695.603<br>.865 | 87.140.463<br>.755 | 87.140.463.7<br>55       |     |

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar

| No | Indikator                                                   | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formulasi Perhitungan                                                                                                                                                                                                            | Satuan | Baseline | Target Tahun |       |       |       |       |       |                 | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2024     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | Akhir           |            |
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |       |       |       |       |       | Periode Renstra |            |
| A. | 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |       |       |       |       |       |                 |            |
| 1. | Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama dalam situasi krisis atau bencana.                                             | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100%<br>Target Jumlah Cadangan Pangan berdasarkan Perbadan 15/2023                                                                                                      | Persen | 12,5     | 12,7         | 12,9  | 13,1  | 13,3  | 13,5  | 13,7  | 13,7            |            |
| 2. | Skor Pola Pangan Harapan                                    | Susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. PPH | Pembobotan kelompok pangan utama berdasarkan sumbangan energinya terhadap energi total sesuai dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 (kkal/kap/hari) dan komposisi ideal bahan makanan. Nilai maksimum Skor PPH = 100 | Nilai  | 88,87    | 88,9         | 89,13 | 89,26 | 89,39 | 89,52 | 89,56 | 89,56           |            |
| 3. | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                       | Rasio jumlah kelurahan yang berada dalam kategori rentan terhadap total kelurahan yang masuk dalam semua kategori, berdasarkan data FSVA.                                                                                                                                                                     | Jumlah kelurahan rentan rawan pangan ----- x 100%<br>Jumlah total kelurahan di kota                                                                                                                                              | Persen | -        | 1            | 1     | 1     | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9             |            |

| No | Indikator                                                                  | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formulasi Perhitungan                                                                                                                               | Satuan | Baseline | Target Tahun |      |      |      |      |      |                 | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------|------------|
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |        | 2024     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Akhir           |            |
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |        |          |              |      |      |      |      |      | Periode Renstra |            |
| 4. | Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan kemandirian pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%. Apabila tidak ada pangajuan registrasi PSAT PDUK, maka untuk persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan hanya diambil dari hasil post market. | Jumlah sampel jenis pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan<br>----- x 100%<br>Jumlah sampel jenis pangan segar yang diuji | Persen | 100      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100             |            |
| B. | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |        |          |              |      |      |      |      |      |                 |            |
| 1. | Presentase Produksi Perikanan Budidaya                                     | Perbandingan antara jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun n dengan jumlah target produksi perikanan budidaya pada tahun n lalu dikalikan 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produksi Perikanan Budi Daya<br>----- x 100%<br>Target Produksi Perikanan Budi Daya                                                                 | Persen | 100,57   | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100             |            |
| C. | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |        |          |              |      |      |      |      |      |                 |            |
| 1. | Peningkatan produksi tanaman pangan                                        | Perbandingan jumlah produksi tanaman pangan utama pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, lalu dikalikan 100%. Tanaman pangan utama adalah jenis tanaman yang secara luas dibudidayakan dan menjadi sumber utama makanan pokok bagi sebagian besar penduduk yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi rambat dan kacang tanah.                                                                                                                                                                                           | (Produksi Tanaman Pangan Tahun ini - Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin)<br>----- x 100%<br>Produksi Tanaman Pangan Tahun Kemarin                | Persen | -38,03   | 0,2          | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2             |            |



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah Kota Blitar. Selain itu, Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Renstra sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan lima tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2025-2029 menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
  - a. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029;
  - b. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar tahun 2025-2029;
  - c. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Renja dan Renstra Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar tahun 2025-2029;
  - d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025-2029;
  - e. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra tahun 2025-2029 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

### 3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Strategis (Renstra) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 tentu juga

dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.